Peraturan Bupati Boalemo Nomor 22 Tahun 2024

Tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

PENDAPATAN

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Kabupaten Boalemo
Tahun 2024

BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 105, Pasal 106 ayat (5), dan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP

6. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
17. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
18. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang di distribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan an minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collncalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
41. Pendaftaran adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek/Wajib Pajak/Retribusi yang belum terdapat dalam administrasi pajak/retribusi.
42. Pemutakhiran adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek Pajak/Retribusi atau Wajib Pajak/Retribusi yang telah terdaftar dalam administrasi Pajak/Retribusi.
43. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak/Retribusi dan/atau Wajib Pajak/Retribusi, termasuk informasi geografis objek Pajak/Retribusi untuk keperluan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
44. Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek Pajak/Retribusi atau Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak/Retribusi dan Wajib Pajak/Retribusi untuk keperluan administrasi Pajak/Retribusi.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

48. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

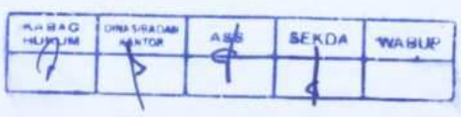

58. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
59. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan.
60. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. *Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang* menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
66. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
72. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
75. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
76. *Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan* data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retibusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
77. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
78. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
79. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/ atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
80. Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2.
81. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
82. *Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan bangunan* berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/penggunaannya.

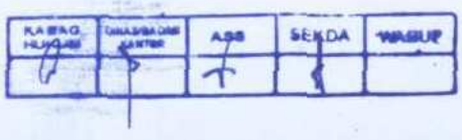

83. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual Barang yang telah disita.
84. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
85. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
86. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayatermasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atakenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajakatau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturaperundang-undangan perpajakan daerah.
87. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
88. *Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.*
89. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
90. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan (*online*) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
91. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
92. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
93. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
94. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
95. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

96. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
97. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
98. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
99. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
100. Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen lain termasuk Data Elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.
101. Data Elektronik adalah data yang dikelola secara elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik.
102. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
103. Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
104. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya
105. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
106. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
107. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.
108. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *Computer Assisted Valuation (CAV)* dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA)*.
109. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.

KABAG HUKUM		ASS	SEKDA	WABUP

110. Bank Penerima adalah bank daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
111. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
112. Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk pemerintah daerah untuk menempatkan RKUD.
113. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
114. Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses Instrumen Pembayaran Nontunai dalam transaksi pembayaran.
115. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
116. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
117. Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
118. Pengurusan Piutang Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
119. Penghapusan Secara Bersyarat adalah menghapuskan Piutang Daerah Pemerintah Daerah dengan tidak tagih daerah.
120. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
121. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
122. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
123. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
124. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

125. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
126. Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi.
127. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
128. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
129. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II
PENGATURAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pajak
Paragraf 1

Jenis Pajak
Pasal 2

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
   a. PBB-P2;
   b. Pajak Reklame;
   c. PAT;
   d. Opsen PKB; dan
   e. Opsen BBNKB.
(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
   a. BPHTB;
   b. PBJT atas:
      1. Makanan dan/atau Minuman;
      2. Tenaga Listrik;
      3. Jasa perhotelan;
      4. Jasa Parkir;
      5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
   c. Pajak MBLB; dan
   d. Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Masa Pajak Dan Tahun Pajak
Pasal 3

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/SEKTOR	ASS	SEKDA	WABUP

undangan mengenai perpajakan Daerah.

(2) *Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu* yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(5) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

(6) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(3) Besaran persentase kelompok objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan nilai sewa Reklame.
(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
(3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
(4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(4) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 8

(1) Dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
(2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
    a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
    b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
    c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
    d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
    e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
    f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
    g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

akta jual beli.

(4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
   a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
   b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
   c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
   d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
   e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

(5) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
   a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
   b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
   c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
   d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
   e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(6) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 10

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
   a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
   a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
   b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
   a. kapasitas tersedia;
   b. tingkat penggunaan listrik;
   c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
   d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 11

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

(5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

(6) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan nilai jual sarang Burung Walet.

(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

(3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

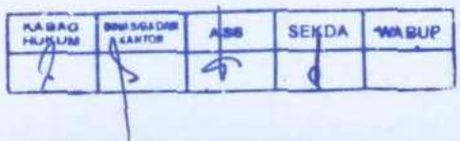

(4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Ketiga
Retribusi

Paragraf 1
Jenis Retribusi
Pasal 13

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.
(2) *Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud* pada ayat (1) diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
(3) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Umum
Pasal 14

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;dan
d. pelayanan pasar.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) *Detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud* pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

(7) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 16

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
   a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
   b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
   c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
   d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
   e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 17

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

KABAG HUKUM	KABAG UMUM DAN KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

(3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BLUD.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 20

(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
   e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
   h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing- masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

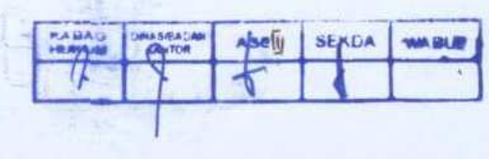

Pasal 21

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 23

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Pasal 27

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

(1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
   a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
   b. kerja sama pemanfaatan;
   c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
   d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
(4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 29

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 4

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 30

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi:
   a. persetujuan Bangunan gedung;dan
   b. penggunaan tenaga kerja asing.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
(4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk

melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 31

(1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 32

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 33

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
(3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
(4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 5
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 34

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) *kegiatan yang berkaitan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

meliputi :

a. Penyelenggaraan Layanan Retribusi ; dan/atau
b. Pembinaan dan Pengawasan.

(3) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BLUD.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 35

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
   a. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;dan
   b. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e.

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
   a. *Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan* usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
   b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

KABAG HUKUM	DINAS/BAGIAN KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Pasal 36

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
(2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
(3) Khusus PBJT makanan dan/atau minuman, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan wajib pajak.

Pasal 37

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
    a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
    b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua

Penilaian PBB-P2

Pasal 38

(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
    a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
    b. nilai perolehan baru; atau

c. nilai jual pengganti.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Pasal 39

NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dibedakan menjadi:

a. NJOP Bumi;
b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau
c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 40

(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi permeter persegi.
(2) NJOP Bumi permeter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR permeter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
(3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
(4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 41

(1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan permeter persegi.
(2) NJOP Bangunan permeter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
(3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
(4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dihitung melalui Individual.
(5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
(6) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 42

(1) Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

(2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata *transaksi jual beli yang terjadi secara wajar* dan telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 43

(1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan dengan *menyusun DBKB* untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.
(2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
    a. perumahan;
    b. perkantoran;
    c. pabrik;
    d. toko/apotek/pasar/ruko;
    e. rumah sakit/klinik;
    f. olah raga/rekreasi;
    g. hotel/restoran/wisma;
    h. bengkel/gudang/pertanian;
    i. gedung pemerintah;
    j. lain-lain;
    k. bangunan tidak kena pajak;
    l. bangunan parkir;
    m. apartemen/kondominium;
    n. pompa bensin (kanopi);
    o. tangki minyak; dan
    p. gedung sekolah.

Pasal 44

(1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
    a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
    b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
    c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
(2) Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 45

(1) *Penilai PBB-P2 paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
    a. minimal lulusan Program Diploma I dengan pangkat serendah-rendahnya *Pengatur Muda dengan golongan II/a atau minimal lulusan* Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan pangkat serendah-rendahnya *Pengatur Muda Tingkat I dengan golongan II/b;*

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	Asst	SEKDA	WABUP

b. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan keterampilan sebagai Penilai PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai penilain;
c. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilan sebagai penilai;
d. tidak sedang menduduki Jabatan Struktural, Pemeriksa, Penelaah Keberatan (KP) atau Jurusita; dan
e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.

(2) Dalam hal kriteria Penilai tidak dapat dipenuhi dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan instansi teknis terkait yang memiliki kompetensi dalam bidang penilaian.

Pasal 46

Kepala Daerah menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Pasal 47

(1) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan pendataan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan objek retribusi dalam 1(satu) periode tertentu.
(4) Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditatausahakan tiap wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Pasal 48

(1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) periode tertentu.
(2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
   a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
   b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 50

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Huruf b, dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 2
Pajak Reklame

Pasal 51

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).

Pasal 52

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi, penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

(5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
a. *nilai jual objek Pajak Reklame; dan*
b. nilai strategis lokasi reklame.

(6) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan reklame usaha minuman beralkohol dan rokok ditambah 50% (lima puluh persen).

(7) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan reklame dalam ruangan (*indoor*) dihitung 50% (lima puluh persen) dari Nilai Sewa Reklame.

Pasal 53

Perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pajak MBLB

Pasal 54

Harga patokan jenis MBLB tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pajak Air Tanah

Pasal 55

(1) Perhitungan Pajak Air tanah diperoleh dari hasil perkalian antara volume pemakaian air tanah, nilai perolehan air tanah dan tarif pajak air tanah
(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud ayat pada (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penetapan Besaran Retribusi Terutang
Pasal 56

(1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

(6) *Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan* dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 57

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

(5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lama:
   a. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);dan
   b. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

(6) *Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak* terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

(9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
   a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
   b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

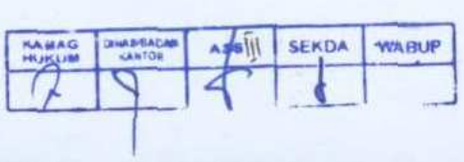

(10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 58

(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
   a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
   b. *melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta* atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
   b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
   a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
   b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui sistim elektronik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 59

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keenam
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 61

(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
   a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASSIS	SEKDA	WABUP

yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
2. pada basis data PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB- P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan

f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Ketujuh

Pemungutan Retribusi

Pasal 62

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

(5) Pembayaran atau penyetoran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran atau penyetoran berbasis elektronik.
(6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia atau mengalami kendala teknis, pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
(7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
(5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
(6) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
(7) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kesembilan
Pembukuan

Pasal 64

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

			SEKDA	WABUP

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan Pajak

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 65

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 66

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
(4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 67

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).*

Pasal 68

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD
Pasal 69

(1) *Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang* disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).
(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
    b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
    c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah

KABAG HUKUM	DINAS/KOOR KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 70

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 71

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada pasal 70 dilakukan dalam hal:
   a. wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
   b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
   c. wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
   a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
   b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.

Pasal 72

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 73

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Pasal 74

(1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa.

(2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berijazah serendah-rendahnya pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
   b. berpangkat serendah -rendahnya Muda/Golongan II/a;
   c. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
   d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
   e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
   f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Kepala Daerah Wajib menunjuk PNS sebagai Pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

(4) Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dipenuhi, Kepala Daerah dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak Daerah sebagai Pemeriksa sampai dengan di penuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 75

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelaj ari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama;
b. emeriksaan dilaksanakan dengan melakukan penguj ian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun;
c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
e. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama -sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

g. pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan;
h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 76

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai:
a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan;
c. dasar pembuatan LHP;
d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

Pasal 77

(1) Standar pelaporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dituangkan dalam LHP, yang disusun secara ringkas dan jelas yang memuat:
    a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan; dan
    b. simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
(2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. penugasan Pemeriksaan;
    b. identitas Wajib Pajak;
    c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
    d. pemenuhan kewajiban perpajakan;
    e. data/ informasi yang tersedia;
    f. buku dan dokumen yang dipinj am;
    g. materi yang diperiksa;
    h. uraian hasil Pemeriksaan;
    i. ikhtisar hasil Pemeriksaan;
    j. penghitungan Pajak terutang; dan
    k. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 78

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib:
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	Asisten	SEKDA	WABUP

b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
   1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
   2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; dan
   3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
f. *menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;*
g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
h. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dari dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
i. pajak dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
j. menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak;
k. melakukan pembinaan ;
l. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepa dariya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 79

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
   a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dari dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, *pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;*
   b. memasuki dari memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau ti dak bergerak yang di duga atau patut di duga digunakan untuk men yimpan buku atau catatan, dokumen yang menja di dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
   c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
   d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
   e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 80

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;
b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan J en1s Pemeriksaan Lapangan;
c. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
d. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
e. menerima SPHP;
f. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan; dan
g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 81

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS[illegible]	SEKDA	WABUP

b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar *pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang* yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
a. *memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan* waktu yang ditentukan;
b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
c. *memberi* bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Pasal 82

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:
a. jangka waktu pengujian; dan
b. *jangka waktu PAHP dan pelaporan.*

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan ke pada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, *jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling* lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan ke pada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(4) Jangka waktu *PAHP* dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada *Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang* telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

KABAG HUKUM			SEKDA	WABUP

(5) Jangka waktu PAHP sampai dengan ditetapkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 83

(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
    a. Pemeriksaan Lapangandiperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
    b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada Pihak Ketiga;
    c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis Pajak; dan/atau
    d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 84

(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
    a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
    b. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada Pihak Ketiga;
    c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis Pajak; dan/atau
    d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 85

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), kepala unit pelaksana Pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian dimaksud secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 86

(1) Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) atau perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 harus memperhatikan

KA.BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP

jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 87

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara:

a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; atau
b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak dan/atau STPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan.

Pasal 88

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dilakukan dalam hal:

a. wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawal, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
   1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau
   2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.
b. pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya; dan
c. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Pasal 89

(1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dalam hal:
   a. wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan.
   b. wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan:
      1. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1); atau
      2. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).
(2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:
   a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1); atau

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.

Pasal 90

Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila di kemudian hari Wajib Pajak ditemukan.

Pasal 91

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa berdasarkan SP2.
(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa tahun dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama, atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.
(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, kepala unit pelaksana Pemeriksaan harus menerbitkan surat perubahan tim Pemeriksa.
(4) Dalam hal tim Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4), tenaga ahli bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 92

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP 2.

Pasal 93

(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wajib Pajak tidak

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS[illegible]	[illegible]KDA	WABUP

berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:

a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:
   1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan;
   2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi; atau
   3. pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 yang dapat mewakili Wajib Pajak.

(3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.

(4) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti *pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.*

Pasal 94

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d.

(2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

(3) *Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan,* pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan setelah Pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

(4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan.

(7) Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita acara hasil pertemuan dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berita acara

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan.

Pasal 95

(1) Pemeriksa dapat melakukan peminjaman Dokumen kepada Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.
(2) Ruang lingkup peminjaman Dokumen meliputi peminjaman dan pengembalian Dokumen.
(3) Tata cara mengenai peminjaman Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 96

(1) Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan Dokumen dan benda- benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
(2) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 97

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak meneima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak ada di tempat maka:
    a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau
    b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
(4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemeriksa dapat melakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1).
(5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat dan/atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan,

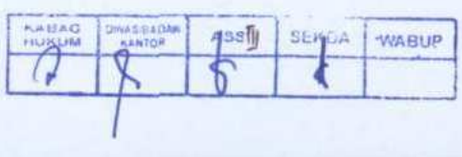

Pemeriksa meminta kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.

(6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.

(7) Dalam hal pegawai atau telah dewasa dari Wajib anggota keluarga yang Pajak menolakuntuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 98

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 99

Pemeriksa berdasarkan:

a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), atau Pasal 98 ayat (1);
b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), atau Pasal 98 ayat (2);
c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3).;
d. surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6); atau
e. berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (7), dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Pasal 100

(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
(2) SPHP daridaftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau Jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dari Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.
(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara penolakan menenma SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
(5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian undangan tertulis untuk menghadiri PAHP.

Pasal 101

(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP daridaftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dalam bentuk:
    a. pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
    b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.
(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
(5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri PAHP dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis.
(6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan

		ASS	SEKDA	WABUP

oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 102

(1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam PAHP.

(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya PAHP.

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
   a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) atau ayat (3); atau
   b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.

(4) Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, undangan tertulis untuk menghadiri PAHP disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPHP.

(5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau Jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 103

(1) Pemeriksa membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan membuat berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dari Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:
   a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a; dan
   b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2)

(2) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:

KABAG HUKUM	DINASKAN KANTOR	ASSIII	SEKDA	WABUP

a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a; dan
b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).

(3) Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dengan mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:
a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b; dan
b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).

(4) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan surat sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:
a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b; dan
b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).

(5) Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:
a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1); dan
b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) .

Pasal 104

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) atau ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut.

Pasal 105

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP pada hari dan tanggal sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) , PAHP dianggap telah dilakukan.

(2) Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 106

Pelaksanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) atau ayat (5) harus mempertimbangkan jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4).

KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP

Pasal 107

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) atau ayat (5) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat berita acara PAHP yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir.

Pasal 108

(1) Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pemeriksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP.
(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
(3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima surat panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP.
(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Pemeriksa membuat berita acara penolakan menenma surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 109

(1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP diterima oleh Wajib Pajak.
(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), namun menolak menandatangani berita acara PAHP, Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan pada berita acara PAHP.
(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 108 ayat (1), Pemeriksa membuat catatan pada berita acara PAHP mengenai tidak dipenuhinya panggilan.

Pasal 110

(1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
(2) Risalah pembahasan dan/atau berita acara PAHP, merupakan bagian yang *tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
(3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan
(4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai *dasar penerbitan surat ketetapan Pajak atau STPD.*
(5) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan PAHP, kecuali:
    a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP

dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pajak yang terutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;

c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.

Pasal 111

Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian Dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

Pasal 112

(1) *Surat ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:*
   a. penyampaian SPHP; atau
   b. PAHP,
   dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/atau PAHP.

(3) Prosedur penyampaian SPHP dan/atau pelaksanaan PAHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, *Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan:*
   a. surat ketetapan Pajak sesuai dengan PAHP apabila jangka waktu belum melampaui 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
   b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilampaui, surat ketetapan Pajak belum ditetapkan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan; atau
   c. SKPDLB sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima.

(5) Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa untuk melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda dengan susunan keanggotaan tim Pemeriksa sebelumnya, Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah diterbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

Pasal 113

(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SPI'PD yang telah

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sepanjang Pemeriksa belum menyampaikan SPHP.

(2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke kantor Badan Pendapatan Daerah atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak terkait.

(3) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
   a. penghitungan Pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan
   b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar;

(4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran Pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSPD.

Pasal 114

(1) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan Pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta *memperhitungkan pokok Pajak yang telah dibayar.*

(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.

Pasal 115

(1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Bupati.

(2) Instruksi atau persetujuan Bupati untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya, Bupati menerbitkan SKPDKBT.

(4) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai penghentian tersebut.

Pasal 116

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 dilakukan dengan kriteria antara lain:

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 117

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 118

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
(3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 119

Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) adalah standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 120

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) meliputi:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, *sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang* seksama;
b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain;
c. pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
d. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa;
e. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP

Pasal 121

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. KKP berfungsi sebagai:
   1. bukti bahwa Pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan
   2. dasar pembuatan LHP.

b. KKP memberikan gambaran mengenai:
   1. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
   2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
   3. simpulan dan hal- hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 122

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;
b. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:
   1. Identitas Wajib Pajak;
   2. Penugasan Pemeriksaan;
   3. Tujuan Pemeriksaan;
   4. Buku dan dokumen yang dipinj am;
   5. Materi yang diperiksa;
   6. Uraian hasil Pemeriksaan; dan
   7. Simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 123

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak wajib:

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinj am dari Wajib Pajak; dan/ atau
g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Pasal 124

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
   a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
   b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
   c. memasuki darimemeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
   d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/ atau
   e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
   a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dari dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
   b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/ atau
   c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 125

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:
a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dari SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/ atau
e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASSET | SEKDA | WABUP

Pasal 126

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
   a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
   b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
   c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan/ atau
   d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
   a. memperlihatkan dan meminj amkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/ atau
   b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 127

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP.
(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.
(3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.
(4) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 128

(1) Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan dilakukan oleh perundang-undangan Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa berdasarkan SP2 .

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.

(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa perlu diubah, kepala unit pelaksana Pemeriksaan tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

Pasal 129

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2

Pasal 130

(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
   a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
   b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:
      1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan; atau
      2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi.

(3) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.

KABAG HUKUM	DANSEBADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP

Pasal 131

(1) Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
(2) Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

Pasal 132

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 133

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 134

(1) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133, Wajib Pajak diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
(2) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133, permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Pasal 135

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan, Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga.

(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 136

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.
(3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi *kepada kepala unit pelaksana Pemeriksaan.*

Pasal 137

Pemeriksa tidak dikenai sanksi dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 138

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, *kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:*
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
   b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
   c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, *hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:*
   a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
   b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
   c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
(3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAG. HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Bagian Keduabelas

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 139

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
   a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2); atau
   b. penghitungan secara jabatan karena:
      1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
      2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) atau Pasal 138 ayat (1).

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 140

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 141

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b; atau
b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak
Pasal 142

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:

a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
b. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan *Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo* pembayaran; atau
c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:

a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
d. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
2	8	1	1	

ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketigabelas
Penagihan Pajak

Pasal 143

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 144

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
   b. menerbitkan:
      1. surat Teguran;
      2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
      3. surat Paksa;
      4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
      5. surat perintah penyanderaan;
      6. surat pencabutan sita;
      7. pengumuman lelang;
      8. surat penentuan harga limit;
      9. pembatalan lelang; dan
      10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	Asisten	SEKDA	WABUP

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
(7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melaui kantor lelang terhadap barang yang disita.
(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 146

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 147

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal 148

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 11 ayat (5), dan Pasal 12 ayat (3), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SPPT atau SKPD.
(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
    b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA | WABUP

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 149

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5) *Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud* pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelimabelas

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 150

(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3).

(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1); dan
b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Paragraf 2

Penghapusan Piutang Daerah
yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 151

(1) Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:
   a. penghapusan secara bersyarat; dan
   b. penghapusan secara mutlak,
   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Paragraf 3

Penagihan

Pasal 152

(1) Penerbitan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.
(2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
   b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
(3) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan.
(4) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 154

(1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
      1. Kejaksaan;
      2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/ atau
      3. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
   c. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
   d. gugatan melalui lembaga peradilan;
   e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
   f. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
   g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau

KABAG HUKUM	GINASBSAN KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (debt to asset swap).

(2) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

(3) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 155

(1) Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.

(2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
   a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
   b. pola kerja penagihan bersama;
   c. pendanaan; dan
   d. jangka waktu kegiatan.

Paragraf 4

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 156

(1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.

(3) *Bentuk dan format surat PPDTO sesuai dengan contoh yang tercantum* dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 157

(1) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
   a. penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau *tidak diketahui tempat tinggalnya; dan*
   b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.

(2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Paragraf 5

Persyaratan PPDTO

Pasal 158

Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
d. penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
   1. kartu keluarga miskin;
   2. putusan pailit;
   3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
   4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
   5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Paragraf 6

Persyaratan PPDTO untuk Piutang Daerah
yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diserahkan
Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 159

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158

Pasal 160

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
d. penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
    1. kartu keluarga miskin;
    2. putusan pailit;
    3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
    4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
    5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 161

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
d. penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
    1. kartu keluarga miskin;
    2. putusan pailit;
    3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala · desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
    4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
    5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 162

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
d. penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
    1. kartu keluarga miskin;
    2. putusan pailit;
    3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
    4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau;
    5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi keberadaanya; dan
e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) sesuai wilayah kerjanya.

Paragraf 7

Kewenangan Penetapan Penghapusan

Pasal 163

Kewenangan menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan oleh:

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Paragraf 8

Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan

Secara Bersyarat atau Mutlak

Pasal 164

(1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN untuk jumlah:
   a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
   b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.

(3) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.

Pasal 165

(1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan *dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:*
   a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
   b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Dalam hal piutang daerah berupa tuntutan ganti rugi, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit
   a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 166

(1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
   a. daftar nominatif Penanggung Utang;
   b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
   c. surat keterangan dari aparat/ pejabat berwenang menyatakan bahwa Penanggung tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya. yang Utang untuk tidak Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

(3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
(4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 167

(1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf a dan Pasal 166 ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
   a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
   b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
   c. tanggal terjadinya piutang;
   d. tanggal piutang jatuh tempo/ dinyatakan macet;
   e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
   f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
(2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Penelitian dan Penetapan atas Usulan Penghapusan
Secara Bersyarat atau Secara Mutlak
Pasal 168

(1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
(2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
(3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 169

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164.

Pasal 170

Setelah ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 171

Bentuk dan format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 172

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Bagian Keenambelas
Keberatan

Paragraf 1
Keberatan Pajak
Pasal 173

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. bencana alam;
    b. kebakaran;
    c. kerusuhan massal atau huru-hara;
    d. wabah penyakit; dan/atau
    e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau

KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP

pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1).

Pasal 174

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (7).

(4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
   a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
   b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
   c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
   d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 175

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP

dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 176

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 177

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 178

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP

yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Paragraf 3

Banding

Pasal 179

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan *perundang-undangan.*

Pasal 180

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3) *Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi* administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh Belas

Gugatan Pajak

Pasal 181

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 176 ayat (1) dan Pasal 177; dan
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 182

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan
Pasal 183

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindak lanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
    a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
    b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
    c. menolak permohonan Wajib Pajak.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP

Pasal 184

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) dapat diajukan wajib pajak atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan; dan
c. melampirkan persyaratan minimal:
   1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/paspor/NPWPD);
   2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
   3. data pendukung yang dapat menunjukan bahwa STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan/atau SKPDLB tersebut tidak benar.

Bagian Kesembilan Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 185

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

Paragaraf 2

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi

Pasal 186

(1) Wajib pajak atau wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah, untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.

Pasal 187

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
   a. Fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
   b. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;
   c. *Fotokopi identitas penerima kuasa;*
   d. Bukti pembayaran pajak daerah atau SSRD asli;
   e. Fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama wajib pajak atau wajib retribusi; dan
   f. Dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai persyaratan administrasi pengembalian kelebihan pembayaran bagi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan alasan batal transaksi jual beli, berupa:
   a. Akta pembatalan;
   b. Surat pernyataan pembatalan jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing penjual dan pembeli yang dibubuhi materai;
   c. Surat kematian bagi wajib pajak dengan alasan batal transaksi yang disebabkan wajib pajak meninggal dunia

Bagian Kedua Puluh

Opsen

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 188

(1) *Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang* dari:
   a. PKB;
   b. BBNKB; dan
   c. Pajak MBLB.

(2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan,

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor, nomor polisi, merek dan type kendaraan, tahun pembuatan di wilayah Daerah.

(3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak.

(4) *Besaran Opsen dipungut bersamaan dengan pembayaran pokok pajak PKB* dan BBNKB.

(5) Besaran Opsen PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme pembayaran terpisah (split payment) secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

(6) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB secara Non Tunai, dilakukan dengan *cara 2 (dua) kali transaksi oleh wajib pajak* dengan rincian *Pajak* PKB dan Pajak BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.

(7) Dasar pengakuan atas penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Bukti Transaksi.

(8) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilakukan oleh wajib pajak, Bupati dapat melakukan penagihan.

(9) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak.

(10) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.

(11) Besaran Opsen MBLB disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi pada saat pembayan menggunakan SSPD.

Paragraf 2
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
Opsen Pajak MBLB
Pasal 189

(1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (9) dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

(2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.

(3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati dapat melakukan penagihan.

(4) Penagihan *sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk* Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.

(5) Dalam hal bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 190

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 185.

(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

(4) Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Kedua Puluh Satu

Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 191

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
   a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
   b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
   c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
   d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan / atau
   e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
   a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
   b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
   c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) *Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Bagian Kedua Puluh Dua
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah

Paragraf 1
Umum
Pasal 192

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.

(3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
   a. wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi;
   b. wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan
   c. wajib pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi piutang pajak dan retribusi.

(4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
   a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
   b. objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia;
   c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah; dan/atau
   d. kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka stimulus ekonomi ataupun sebab kenaikan penyesuaian nilai Pajak dan Retribusi.

			SEKDA	WABUP

Paragraf 2

Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan

Dan Penundaan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 193

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2).

(2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam SKPD, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 194

(1) Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan dalam bentuk:
   a. angsuran pembayaran pajak dan retribusi paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
   b. penundaan pembayaran pajak dan retribusi paling lama 12 (dua belas) bulan.

   (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(3) Pengurangan pajak dan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak dan retribusi.

(4) Pengurangan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah.

(5) Pembebasan pajak dan retribusi daerah diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok pajak dan retribusi.

Paragraf 3

Prosedur dan Persyaratan Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan

Dan Penundaan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 195

(1) Pemohon mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah secara tertulis kepada Bupati melalui:
   a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan untuk pajak daerah; atau
   b. kepala perangkat daerah pemungut untuk retribusi daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administrasi.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama:
   a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya STPD atau STRD;
   b. 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau SKRD; atau
   c. 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan daluarsa, kecuali Wajib Pajak atau Wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa terjadi bencana alam, bencana non alam, atau sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

KABAG HUKUM			SEKDA	WABUP

Pasal 196

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) terdiri dari:
   a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh wajib pajak atau wajib retribusi dengan disertai alasan yang jelas;
   b. fotocopy identitas pemohon yang masih berlaku;
   c. fotocopy SKPD, SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan;
   d. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan;
   e. tidak memiliki tunggakan Pajak dan Retribusi sebelumnya atas objek pajak dan objek retribusi yang dimohonkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah, kecuali terjadi kondisi objek pajak dan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c; dan
   f. tidak diajukan keberatan atas SKPD atau SKRD yang dimohonkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah, atau dalam hal diajukan keberatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib melampirkan surat kuasa.
(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f telah diajukan, pemohon tidak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 197

(1) Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195.
(2) Pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim teknis pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak atau Retribusi.
(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retribusi.
(4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang.
(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Bupati untuk menerima atau menolak.

Pasal 198

(1) Keputusan Bupati atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 secara lengkap dan benar.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. mengabulkan sebagian;
   b. mengabulkan seluruhnya; atau
   c. menolak.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan tidak ada suatu keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

(4) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa pajak dan retribusi.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 199

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
   a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
   b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
   a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
   b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan / atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

KA BAG HUKUM		ASISTEN	SEKDA	WABUP

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Empat
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 200

(1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
a. pemerintah;
b. pemerintah Daerah lain; dan/atau
c. pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

(4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 201

(1) Pemerintah Daerah dapat:
a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1); dan
b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 200 ayat (1).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
   a. subjek kerja sama;
   b. maksud dan tujuan;
   c. ruang lingkup;
   d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
   e. jangka waktu perjanjian;
   f. sumber pembiayaan;
   g. penyelesaian perselisihan;
   h. sanksi;
   i. korespondensi; dan
   j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 202

(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan / atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 203

Bentuk dan format:
a. SPTPD;
b. SPOPD;
c. SSPD;
d. SKPD;
e. SPPT;
f. SKPDKB;
g. SKPDT;
h. SKPDN;
i. SKPDLB;
j. STPD;
k. Karcis/Bill;
l. Surat Keputusan Pembetulan;
m. Surat Keputusan Keberatan;
n. NPWPD;
o. SKRD;
p. SSRD;

q. SKRDLB;
r. STRD; dan
s. Surat Teguran,

tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 204

Pada saat ini Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 33);
b. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 34); dan
c. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 205

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 30 September 2024
Pj. BUPATI BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta pada
tanggal, 30 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

RAHMAT BIYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR 22

BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 105, Pasal 106 ayat (5), dan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP

6. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
17. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
18. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang di distribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan an minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collncalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
41. Pendaftaran adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek/Wajib Pajak/Retribusi yang belum terdapat dalam administrasi pajak/retribusi.
42. Pemutakhiran adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek Pajak/Retribusi atau Wajib Pajak/Retribusi yang telah terdaftar dalam administrasi Pajak/Retribusi.
43. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak/Retribusi dan/atau Wajib Pajak/Retribusi, termasuk informasi geografis objek Pajak/Retribusi untuk keperluan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
44. Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak/Retribusi dan/atau Subjek Pajak/Retribusi atau Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak/Retribusi dan Wajib Pajak/Retribusi untuk keperluan administrasi Pajak/Retribusi.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

48. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

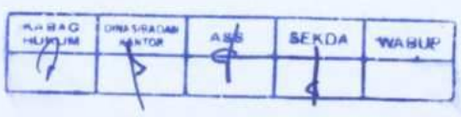

58. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
59. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan.
60. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. *Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang* menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
66. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
72. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
75. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
76. *Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan* data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retibusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
77. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
78. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
79. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/ atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
80. Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2.
81. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
82. *Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan bangunan* berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/penggunaannya.

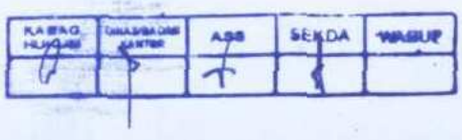

83. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual Barang yang telah disita.
84. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.
85. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
86. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayatermasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atakenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajakatau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturaperundang-undangan perpajakan daerah.
87. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
88. *Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.*
89. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
90. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan (*online*) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
91. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
92. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
93. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
94. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
95. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

96. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
97. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
98. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
99. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
100. Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen lain termasuk Data Elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.
101. Data Elektronik adalah data yang dikelola secara elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik.
102. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
103. Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
104. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya
105. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
106. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
107. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.
108. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *Computer Assisted Valuation (CAV)* dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA)*.
109. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.

KABAG HUKUM		ASS	SEKDA	WABUP

110. Bank Penerima adalah bank daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
111. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
112. Bank RKUD adalah bank yang ditunjuk pemerintah daerah untuk menempatkan RKUD.
113. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
114. Kanal Pembayaran Nontunai adalah media yang digunakan untuk memproses Instrumen Pembayaran Nontunai dalam transaksi pembayaran.
115. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
116. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
117. Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
118. Pengurusan Piutang Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
119. Penghapusan Secara Bersyarat adalah menghapuskan Piutang Daerah Pemerintah Daerah dengan tidak tagih daerah.
120. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
121. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
122. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
123. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
124. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

125. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
126. Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi.
127. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
128. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
129. Bupati adalah Bupati Boalemo.

BAB II
PENGATURAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pajak
Paragraf 1

Jenis Pajak
Pasal 2

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
   a. PBB-P2;
   b. Pajak Reklame;
   c. PAT;
   d. Opsen PKB; dan
   e. Opsen BBNKB.
(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
   a. BPHTB;
   b. PBJT atas:
      1. Makanan dan/atau Minuman;
      2. Tenaga Listrik;
      3. Jasa perhotelan;
      4. Jasa Parkir;
      5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
   c. Pajak MBLB; dan
   d. Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Masa Pajak Dan Tahun Pajak
Pasal 3

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/SEKTOR	ASS	SEKDA	WABUP

undangan mengenai perpajakan Daerah.

(2) *Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu* yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(5) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

(6) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:

a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(3) Besaran persentase kelompok objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan nilai sewa Reklame.
(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
(3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
(4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(4) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 8

(1) Dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
(2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
    a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
    b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
    c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
    d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
    e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
    f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
    g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

akta jual beli.

(4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
   a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
   b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
   c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
   d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
   e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

(5) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
   a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
   b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
   c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
   d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
   e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(6) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 10

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
   a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
   a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
   b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
   a. kapasitas tersedia;
   b. tingkat penggunaan listrik;
   c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
   d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 11

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

(5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

(6) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan nilai jual sarang Burung Walet.

(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

(3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

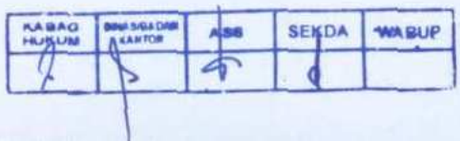

(4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Ketiga
Retribusi

Paragraf 1
Jenis Retribusi
Pasal 13

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.
(2) *Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud* pada ayat (1) diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
(3) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Retribusi Jasa Umum
Pasal 14

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;dan
d. pelayanan pasar.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) *Detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud* pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

(7) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 16

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
   a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
   b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
   c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
   d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
   e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 17

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

KABAG HUKUM	KABAG UMUM DAN KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

(3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BLUD.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 20

(1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
   e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
   h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing- masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

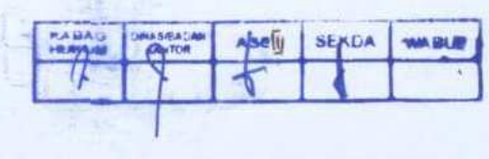

Pasal 21

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 23

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Pasal 27

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

(1) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
   a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
   b. kerja sama pemanfaatan;
   c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
   d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
(3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
(4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 29

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 4

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 30

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi:
   a. persetujuan Bangunan gedung;dan
   b. penggunaan tenaga kerja asing.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
(4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk

melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 31

(1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 32

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 33

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
(3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
(4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 5
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 34

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) *kegiatan yang berkaitan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

meliputi :

a. Penyelenggaraan Layanan Retribusi ; dan/atau
b. Pembinaan dan Pengawasan.

(3) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BLUD.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 35

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
   a. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;dan
   b. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e.

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

(5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
   a. *Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan* usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
   b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

KABAG HUKUM	DINAS/BAGIAN KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Pasal 36

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
(2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
(3) Khusus PBJT makanan dan/atau minuman, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan wajib pajak.

Pasal 37

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
    a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
    b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua

Penilaian PBB-P2

Pasal 38

(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
    a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
    b. nilai perolehan baru; atau

c. nilai jual pengganti.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Pasal 39

NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dibedakan menjadi:

a. NJOP Bumi;
b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau
c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 40

(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi permeter persegi.
(2) NJOP Bumi permeter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR permeter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
(3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
(4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 41

(1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan permeter persegi.
(2) NJOP Bangunan permeter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
(3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
(4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dihitung melalui Individual.
(5) Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
(6) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 42

(1) Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

(2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata *transaksi jual beli yang terjadi secara wajar* dan telah dilakukan penyesuaian.

Pasal 43

(1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan dengan *menyusun DBKB* untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.
(2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
    a. perumahan;
    b. perkantoran;
    c. pabrik;
    d. toko/apotek/pasar/ruko;
    e. rumah sakit/klinik;
    f. olah raga/rekreasi;
    g. hotel/restoran/wisma;
    h. bengkel/gudang/pertanian;
    i. gedung pemerintah;
    j. lain-lain;
    k. bangunan tidak kena pajak;
    l. bangunan parkir;
    m. apartemen/kondominium;
    n. pompa bensin (kanopi);
    o. tangki minyak; dan
    p. gedung sekolah.

Pasal 44

(1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
    a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
    b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
    c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
(2) Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 45

(1) *Penilai PBB-P2 paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
    a. minimal lulusan Program Diploma I dengan pangkat serendah-rendahnya *Pengatur Muda dengan golongan II/a atau minimal lulusan* Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan pangkat serendah-rendahnya *Pengatur Muda Tingkat I dengan golongan II/b;*

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	Asst	SEKDA	WABUP

b. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan keterampilan sebagai Penilai PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai penilain;
c. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilan sebagai penilai;
d. tidak sedang menduduki Jabatan Struktural, Pemeriksa, Penelaah Keberatan (KP) atau Jurusita; dan
e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.

(2) Dalam hal kriteria Penilai tidak dapat dipenuhi dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan instansi teknis terkait yang memiliki kompetensi dalam bidang penilaian.

Pasal 46

Kepala Daerah menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Pasal 47

(1) Setiap Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan pendataan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan objek retribusi dalam 1(satu) periode tertentu.
(4) Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditatausahakan tiap wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Pasal 48

(1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) periode tertentu.
(2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
   a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
   b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 50

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Huruf b, dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 2
Pajak Reklame

Pasal 51

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).

Pasal 52

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi, penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

(5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
a. *nilai jual objek Pajak Reklame; dan*
b. nilai strategis lokasi reklame.

(6) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan reklame usaha minuman beralkohol dan rokok ditambah 50% (lima puluh persen).

(7) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan reklame dalam ruangan (*indoor*) dihitung 50% (lima puluh persen) dari Nilai Sewa Reklame.

Pasal 53

Perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pajak MBLB

Pasal 54

Harga patokan jenis MBLB tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pajak Air Tanah

Pasal 55

(1) Perhitungan Pajak Air tanah diperoleh dari hasil perkalian antara volume pemakaian air tanah, nilai perolehan air tanah dan tarif pajak air tanah
(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud ayat pada (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penetapan Besaran Retribusi Terutang
Pasal 56

(1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

(6) *Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan* dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 57

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

(5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling lama:
   a. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);dan
   b. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

(6) *Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak* terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

(9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
   a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
   b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

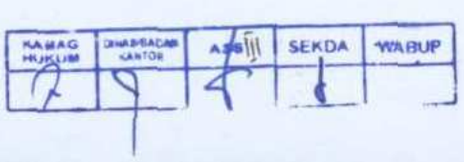

(10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 58

(1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
   a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
   b. *melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta* atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
   b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
   a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
   b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui sistim elektronik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 59

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keenam
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 61

(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
   a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASSIS	SEKDA	WABUP

yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
2. pada basis data PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB- P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan

f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Ketujuh

Pemungutan Retribusi

Pasal 62

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

(2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

(5) Pembayaran atau penyetoran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran atau penyetoran berbasis elektronik.
(6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia atau mengalami kendala teknis, pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
(7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
(5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
(6) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
(7) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kesembilan
Pembukuan

Pasal 64

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

			SEKDA	WABUP

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan Pajak

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 65

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

(6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 66

(1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
(4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 67

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).*

Pasal 68

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD
Pasal 69

(1) *Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang* disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).
(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
    b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
    c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah

KABAG HUKUM	DINAS/KOOR KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 70

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 71

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada pasal 70 dilakukan dalam hal:
   a. wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
   b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
   c. wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
   a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
   b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.

Pasal 72

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 73

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Pasal 74

(1) Standar umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa.

(2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berijazah serendah-rendahnya pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
   b. berpangkat serendah -rendahnya Muda/Golongan II/a;
   c. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
   d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
   e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
   f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Kepala Daerah Wajib menunjuk PNS sebagai Pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

(4) Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dipenuhi, Kepala Daerah dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak Daerah sebagai Pemeriksa sampai dengan di penuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 75

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelaj ari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama;
b. emeriksaan dilaksanakan dengan melakukan penguj ian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun;
c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
e. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;
f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama -sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

g. pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan;
h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
i. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 76

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai:
a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan;
c. dasar pembuatan LHP;
d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

Pasal 77

(1) Standar pelaporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dituangkan dalam LHP, yang disusun secara ringkas dan jelas yang memuat:
    a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan; dan
    b. simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
(2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. penugasan Pemeriksaan;
    b. identitas Wajib Pajak;
    c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
    d. pemenuhan kewajiban perpajakan;
    e. data/ informasi yang tersedia;
    f. buku dan dokumen yang dipinj am;
    g. materi yang diperiksa;
    h. uraian hasil Pemeriksaan;
    i. ikhtisar hasil Pemeriksaan;
    j. penghitungan Pajak terutang; dan
    k. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 78

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib:
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	Asisten	SEKDA	WABUP

b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
c. memperlihatkan surat yang berisi Pemeriksa kepada Wajib Pajak perubahan tim apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
   1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
   2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; dan
   3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
f. *menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;*
g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
h. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dari dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
i. pajak dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
j. menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak;
k. melakukan pembinaan ;
l. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepa dariya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 79

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
   a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dari dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, *pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;*
   b. memasuki dari memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau ti dak bergerak yang di duga atau patut di duga digunakan untuk men yimpan buku atau catatan, dokumen yang menja di dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
   c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
   d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
   e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 80

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;
b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan J en1s Pemeriksaan Lapangan;
c. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
d. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
e. menerima SPHP;
f. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan; dan
g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 81

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS[illegible]	SEKDA	WABUP

b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar *pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang* yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
a. *memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan* waktu yang ditentukan;
b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
c. *memberi* bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
e. meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Pasal 82

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:
a. jangka waktu pengujian; dan
b. *jangka waktu PAHP dan pelaporan.*

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan ke pada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, *jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling* lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan ke pada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(4) Jangka waktu *PAHP* dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada *Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang* telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

KABAG HUKUM			SEKDA	WABUP

(5) Jangka waktu PAHP sampai dengan ditetapkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 83

(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
    a. Pemeriksaan Lapangandiperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
    b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada Pihak Ketiga;
    c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis Pajak; dan/atau
    d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 84

(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
    a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
    b. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada Pihak Ketiga;
    c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis Pajak; dan/atau
    d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 85

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), kepala unit pelaksana Pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian dimaksud secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 86

(1) Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) atau perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 harus memperhatikan

KA.BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP

jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 87

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara:

a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; atau
b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak dan/atau STPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan.

Pasal 88

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dilakukan dalam hal:

a. wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawal, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
   1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau
   2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.
b. pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya; dan
c. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Pasal 89

(1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dalam hal:
   a. wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan.
   b. wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan:
      1. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1); atau
      2. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).
(2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:
   a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1); atau

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.

Pasal 90

Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila di kemudian hari Wajib Pajak ditemukan.

Pasal 91

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa berdasarkan SP2.
(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa tahun dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama, atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.
(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, kepala unit pelaksana Pemeriksaan harus menerbitkan surat perubahan tim Pemeriksa.
(4) Dalam hal tim Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4), tenaga ahli bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 92

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP 2.

Pasal 93

(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wajib Pajak tidak

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS[illegible]	[illegible]KDA	WABUP

berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:

a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:
   1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan;
   2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi; atau
   3. pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 yang dapat mewakili Wajib Pajak.

(3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.

(4) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti *pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.*

Pasal 94

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d.

(2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

(3) *Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan,* pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan setelah Pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

(4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan.

(7) Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita acara hasil pertemuan dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berita acara

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan.

Pasal 95

(1) Pemeriksa dapat melakukan peminjaman Dokumen kepada Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.
(2) Ruang lingkup peminjaman Dokumen meliputi peminjaman dan pengembalian Dokumen.
(3) Tata cara mengenai peminjaman Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 96

(1) Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan Dokumen dan benda- benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
(2) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 97

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak meneima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak ada di tempat maka:
    a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau
    b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
(4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemeriksa dapat melakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1).
(5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat dan/atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan,

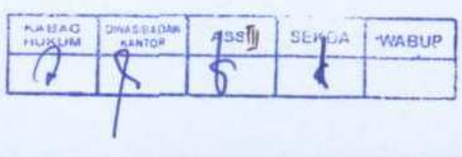

Pemeriksa meminta kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.

(6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.

(7) Dalam hal pegawai atau telah dewasa dari Wajib anggota keluarga yang Pajak menolakuntuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 98

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 99

Pemeriksa berdasarkan:

a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), atau Pasal 98 ayat (1);
b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), atau Pasal 98 ayat (2);
c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3).;
d. surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6); atau
e. berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (7), dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Pasal 100

(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
(2) SPHP daridaftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau Jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dari Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.
(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara penolakan menenma SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
(5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian undangan tertulis untuk menghadiri PAHP.

Pasal 101

(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP daridaftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dalam bentuk:
    a. pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
    b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.
(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
(5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri PAHP dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis.
(6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan

		ASS	SEKDA	WABUP

oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 102

(1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam PAHP.

(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya PAHP.

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
   a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) atau ayat (3); atau
   b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.

(4) Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, undangan tertulis untuk menghadiri PAHP disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPHP.

(5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau Jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 103

(1) Pemeriksa membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan membuat berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dari Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:
   a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a; dan
   b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2)

(2) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:

KABAG HUKUM	DINASKAN KANTOR	ASSIII	SEKDA	WABUP

a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a; dan
b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).

(3) Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dengan mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:
a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b; dan
b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).

(4) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan surat sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:
a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b; dan
b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).

(5) Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:
a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1); dan
b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) .

Pasal 104

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) atau ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut.

Pasal 105

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP pada hari dan tanggal sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) , PAHP dianggap telah dilakukan.

(2) Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 106

Pelaksanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) atau ayat (5) harus mempertimbangkan jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4).

KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS | SEKDA | WABUP

Pasal 107

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) atau ayat (5) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat berita acara PAHP yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir.

Pasal 108

(1) Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pemeriksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP.
(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
(3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima surat panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP.
(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Pemeriksa membuat berita acara penolakan menenma surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 109

(1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP diterima oleh Wajib Pajak.
(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), namun menolak menandatangani berita acara PAHP, Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan pada berita acara PAHP.
(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 108 ayat (1), Pemeriksa membuat catatan pada berita acara PAHP mengenai tidak dipenuhinya panggilan.

Pasal 110

(1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
(2) Risalah pembahasan dan/atau berita acara PAHP, merupakan bagian yang *tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
(3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan
(4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai *dasar penerbitan surat ketetapan Pajak atau STPD.*
(5) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan PAHP, kecuali:
    a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP

dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pajak yang terutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;

c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.

Pasal 111

Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian Dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

Pasal 112

(1) *Surat ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:*
   a. penyampaian SPHP; atau
   b. PAHP,
   dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/atau PAHP.

(3) Prosedur penyampaian SPHP dan/atau pelaksanaan PAHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, *Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan:*
   a. surat ketetapan Pajak sesuai dengan PAHP apabila jangka waktu belum melampaui 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
   b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilampaui, surat ketetapan Pajak belum ditetapkan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan; atau
   c. SKPDLB sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima.

(5) Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa untuk melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda dengan susunan keanggotaan tim Pemeriksa sebelumnya, Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah diterbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

Pasal 113

(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SPI'PD yang telah

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sepanjang Pemeriksa belum menyampaikan SPHP.

(2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke kantor Badan Pendapatan Daerah atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak terkait.

(3) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
   a. penghitungan Pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan
   b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar;

(4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran Pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSPD.

Pasal 114

(1) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan Pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta *memperhitungkan pokok Pajak yang telah dibayar.*

(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.

Pasal 115

(1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Bupati.

(2) Instruksi atau persetujuan Bupati untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya, Bupati menerbitkan SKPDKBT.

(4) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai penghentian tersebut.

Pasal 116

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 dilakukan dengan kriteria antara lain:

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 117

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 118

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
(3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 119

Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) adalah standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 120

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) meliputi:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, *sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang* seksama;
b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain;
c. pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
d. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa;
e. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASST	SEKDA	WABUP

Pasal 121

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. KKP berfungsi sebagai:
   1. bukti bahwa Pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan
   2. dasar pembuatan LHP.

b. KKP memberikan gambaran mengenai:
   1. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
   2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
   3. simpulan dan hal- hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Pasal 122

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;
b. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:
   1. Identitas Wajib Pajak;
   2. Penugasan Pemeriksaan;
   3. Tujuan Pemeriksaan;
   4. Buku dan dokumen yang dipinj am;
   5. Materi yang diperiksa;
   6. Uraian hasil Pemeriksaan; dan
   7. Simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 123

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak wajib:

a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinj am dari Wajib Pajak; dan/ atau
g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Pasal 124

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
   a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
   b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
   c. memasuki darimemeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
   d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/ atau
   e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:
   a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dari dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
   b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/ atau
   c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 125

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:
a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dari SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/ atau
e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

KABAG HUKUM | DINAS/BADAN KANTOR | ASSET | SEKDA | WABUP

Pasal 126

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
   a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
   b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
   c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan/ atau
   d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
   a. memperlihatkan dan meminj amkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/ atau
   b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 127

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP.
(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.
(3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.
(4) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 128

(1) Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan dilakukan oleh perundang-undangan Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa berdasarkan SP2 .

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.

(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa perlu diubah, kepala unit pelaksana Pemeriksaan tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

Pasal 129

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2

Pasal 130

(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
   a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
   b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:
      1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan; atau
      2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi.

(3) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.

KABAG HUKUM	DANSEBADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP

Pasal 131

(1) Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
(2) Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

Pasal 132

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 133

(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 134

(1) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133, Wajib Pajak diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
(2) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dan Pasal 133, permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Pasal 135

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan, Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga.

(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 136

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.
(3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi *kepada kepala unit pelaksana Pemeriksaan.*

Pasal 137

Pemeriksa tidak dikenai sanksi dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar Pemeriksaan, serta dilaksanakan berdasarkan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 138

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, *kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:*
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
   b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
   c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, *hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:*
   a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
   b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
   c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
(3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAG. HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Bagian Keduabelas

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 139

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
   a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2); atau
   b. penghitungan secara jabatan karena:
      1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
      2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) atau Pasal 138 ayat (1).

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 140

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 141

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b; atau
b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak
Pasal 142

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:

a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
b. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan *Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo* pembayaran; atau
c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:

a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
d. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
2	8	1	1	

ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketigabelas
Penagihan Pajak

Pasal 143

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 144

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
   b. menerbitkan:
      1. surat Teguran;
      2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
      3. surat Paksa;
      4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
      5. surat perintah penyanderaan;
      6. surat pencabutan sita;
      7. pengumuman lelang;
      8. surat penentuan harga limit;
      9. pembatalan lelang; dan
      10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	Asisten	SEKDA	WABUP

(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
(7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melaui kantor lelang terhadap barang yang disita.
(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 146

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
b. penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 147

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal 148

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (5), Pasal 11 ayat (5), dan Pasal 12 ayat (3), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SPPT atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SPPT atau SKPD.
(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
    a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
    b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

KABAG HUKUM | ASISTEN | SEKDA | WABUP

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 149

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5) *Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud* pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelimabelas

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 150

(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3).

(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1); dan
b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

Paragraf 2

Penghapusan Piutang Daerah
yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 151

(1) Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:
   a. penghapusan secara bersyarat; dan
   b. penghapusan secara mutlak,
   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Paragraf 3

Penagihan

Pasal 152

(1) Penerbitan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.
(2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
   b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
(3) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan.
(4) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 154

(1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
      1. Kejaksaan;
      2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/ atau
      3. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;
   c. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
   d. gugatan melalui lembaga peradilan;
   e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
   f. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
   g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau

KABAG HUKUM	GINASBSAN KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (debt to asset swap).

(2) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

(3) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 155

(1) Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.

(2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
   a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
   b. pola kerja penagihan bersama;
   c. pendanaan; dan
   d. jangka waktu kegiatan.

Paragraf 4

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 156

(1) Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan surat PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.

(3) *Bentuk dan format surat PPDTO sesuai dengan contoh yang tercantum* dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 157

(1) Piutang Daerah dengan kategori macet ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
   a. penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau *tidak diketahui tempat tinggalnya; dan*
   b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.

(2) Dalam hal diperlukan, sebelum menetapkan PPDTO, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat meminta reviu kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa Piutang Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Paragraf 5

Persyaratan PPDTO

Pasal 158

Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; dan
d. penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
   1. kartu keluarga miskin;
   2. putusan pailit;
   3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
   4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
   5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Paragraf 6

Persyaratan PPDTO untuk Piutang Daerah
yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diserahkan
Pengurusannya kepada PUPN

Pasal 159

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158

Pasal 160

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
d. penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
    1. kartu keluarga miskin;
    2. putusan pailit;
    3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
    4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
    5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Pasal 161

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:
a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
d. penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
    1. kartu keluarga miskin;
    2. putusan pailit;
    3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala · desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
    4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau
    5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Pasal 162

Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
b. kualitas piutang telah macet;
c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar;
d. penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
    1. kartu keluarga miskin;
    2. putusan pailit;
    3. surat keterangan dari kelurahan/kantor kepala desa/kantor kepala lingkungan/kantor instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
    4. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) atau program lain yang sejenis; dan/atau;
    5. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi keberadaanya; dan
e. telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) sesuai wilayah kerjanya.

Paragraf 7

Kewenangan Penetapan Penghapusan

Pasal 163

Kewenangan menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak terhadap Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan oleh:

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Paragraf 8

Tata Cara Pengajuan Usulan Penghapusan

Secara Bersyarat atau Mutlak

Pasal 164

(1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN untuk jumlah:
   a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
   b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.

(3) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.

Pasal 165

(1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan *dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:*
   a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
   b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Dalam hal piutang daerah berupa tuntutan ganti rugi, usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit
   a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 166

(1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan paling sedikit:
   a. daftar nominatif Penanggung Utang;
   b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
   c. surat keterangan dari aparat/ pejabat berwenang menyatakan bahwa Penanggung tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau diketahui tempat tinggalnya. yang Utang untuk tidak Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

(3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemilik piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
(4) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 167

(1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) huruf a dan Pasal 166 ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit:
   a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
   b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
   c. tanggal terjadinya piutang;
   d. tanggal piutang jatuh tempo/ dinyatakan macet;
   e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
   f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.
(2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Penelitian dan Penetapan atas Usulan Penghapusan
Secara Bersyarat atau Secara Mutlak
Pasal 168

(1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
(2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
(3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan penghapusan Piutang Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 169

Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2), Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164.

Pasal 170

Setelah ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Daerah diadministrasikan serta ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 171

Bentuk dan format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 172

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Bagian Keenambelas
Keberatan

Paragraf 1
Keberatan Pajak
Pasal 173

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. bencana alam;
    b. kebakaran;
    c. kerusuhan massal atau huru-hara;
    d. wabah penyakit; dan/atau
    e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau

KABAG HUKUM | DINAS/BADAN/KANTOR | ASS III | SEKDA | WABUP

pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1).

Pasal 174

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (7).

(4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
   a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
   b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
   c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
   d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 175

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP

dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 176

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 177

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 178

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP

yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Paragraf 3

Banding

Pasal 179

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan *perundang-undangan.*

Pasal 180

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3) *Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi* administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh Belas

Gugatan Pajak

Pasal 181

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 176 ayat (1) dan Pasal 177; dan
d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 182

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas
Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan
Pasal 183

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindak lanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
    a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
    b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
    c. menolak permohonan Wajib Pajak.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP

Pasal 184

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) dapat diajukan wajib pajak atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan; dan
c. melampirkan persyaratan minimal:
   1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/paspor/NPWPD);
   2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
   3. data pendukung yang dapat menunjukan bahwa STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan/atau SKPDLB tersebut tidak benar.

Bagian Kesembilan Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 185

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

Paragaraf 2

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi

Pasal 186

(1) Wajib pajak atau wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah, untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.

Pasal 187

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
   a. Fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
   b. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;
   c. *Fotokopi identitas penerima kuasa;*
   d. Bukti pembayaran pajak daerah atau SSRD asli;
   e. Fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama wajib pajak atau wajib retribusi; dan
   f. Dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai persyaratan administrasi pengembalian kelebihan pembayaran bagi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan alasan batal transaksi jual beli, berupa:
   a. Akta pembatalan;
   b. Surat pernyataan pembatalan jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing penjual dan pembeli yang dibubuhi materai;
   c. Surat kematian bagi wajib pajak dengan alasan batal transaksi yang disebabkan wajib pajak meninggal dunia

Bagian Kedua Puluh

Opsen

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 188

(1) *Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang* dari:
   a. PKB;
   b. BBNKB; dan
   c. Pajak MBLB.

(2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan,

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor, nomor polisi, merek dan type kendaraan, tahun pembuatan di wilayah Daerah.

(3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak.

(4) *Besaran Opsen dipungut bersamaan dengan pembayaran pokok pajak PKB* dan BBNKB.

(5) Besaran Opsen PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme pembayaran terpisah (split payment) secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

(6) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB secara Non Tunai, dilakukan dengan *cara 2 (dua) kali transaksi oleh wajib pajak* dengan rincian *Pajak* PKB dan Pajak BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.

(7) Dasar pengakuan atas penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB didasarkan pada Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Bukti Transaksi.

(8) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilakukan oleh wajib pajak, Bupati dapat melakukan penagihan.

(9) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak.

(10) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.

(11) Besaran Opsen MBLB disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi pada saat pembayan menggunakan SSPD.

Paragraf 2
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
Opsen Pajak MBLB
Pasal 189

(1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (9) dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

(2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.

(3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati dapat melakukan penagihan.

(4) Penagihan *sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk* Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.

(5) Dalam hal bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 190

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 185.

(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

(4) Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Kedua Puluh Satu

Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 191

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
   a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
   b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
   c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
   d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan / atau
   e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
   a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
   b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
   c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) *Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Bagian Kedua Puluh Dua
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah

Paragraf 1
Umum
Pasal 192

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.

(3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
   a. wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi;
   b. wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan
   c. wajib pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi piutang pajak dan retribusi.

(4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
   a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
   b. objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia;
   c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah; dan/atau
   d. kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka stimulus ekonomi ataupun sebab kenaikan penyesuaian nilai Pajak dan Retribusi.

			SEKDA	WABUP

Paragraf 2

Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan

Dan Penundaan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 193

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2).

(2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam SKPD, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 194

(1) Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan dalam bentuk:
   a. angsuran pembayaran pajak dan retribusi paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
   b. penundaan pembayaran pajak dan retribusi paling lama 12 (dua belas) bulan.

   (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(3) Pengurangan pajak dan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak dan retribusi.

(4) Pengurangan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah.

(5) Pembebasan pajak dan retribusi daerah diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok pajak dan retribusi.

Paragraf 3

Prosedur dan Persyaratan Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan

Dan Penundaan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 195

(1) Pemohon mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah secara tertulis kepada Bupati melalui:
   a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan untuk pajak daerah; atau
   b. kepala perangkat daerah pemungut untuk retribusi daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administrasi.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama:
   a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya STPD atau STRD;
   b. 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau SKRD; atau
   c. 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan daluarsa, kecuali Wajib Pajak atau Wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa terjadi bencana alam, bencana non alam, atau sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

KABAG HUKUM			SEKDA	WABUP

Pasal 196

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) terdiri dari:
   a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh wajib pajak atau wajib retribusi dengan disertai alasan yang jelas;
   b. fotocopy identitas pemohon yang masih berlaku;
   c. fotocopy SKPD, SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan;
   d. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan;
   e. tidak memiliki tunggakan Pajak dan Retribusi sebelumnya atas objek pajak dan objek retribusi yang dimohonkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah, kecuali terjadi kondisi objek pajak dan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c; dan
   f. tidak diajukan keberatan atas SKPD atau SKRD yang dimohonkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah, atau dalam hal diajukan keberatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib melampirkan surat kuasa.
(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f telah diajukan, pemohon tidak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 197

(1) Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195.
(2) Pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim teknis pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak atau Retribusi.
(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retribusi.
(4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang.
(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Bupati untuk menerima atau menolak.

Pasal 198

(1) Keputusan Bupati atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 secara lengkap dan benar.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. mengabulkan sebagian;
   b. mengabulkan seluruhnya; atau
   c. menolak.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan tidak ada suatu keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASISTEN	SEKDA	WABUP

(4) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa pajak dan retribusi.

Bagian Kedua Puluh Tiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 199

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
   a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
   b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
   a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
   b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan / atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dan huruf b, paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

KA BAG HUKUM		ASISTEN	SEKDA	WABUP

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Empat
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 200

(1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
a. pemerintah;
b. pemerintah Daerah lain; dan/atau
c. pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

(4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 201

(1) Pemerintah Daerah dapat:
a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1); dan
b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 200 ayat (1).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
   a. subjek kerja sama;
   b. maksud dan tujuan;
   c. ruang lingkup;
   d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
   e. jangka waktu perjanjian;
   f. sumber pembiayaan;
   g. penyelesaian perselisihan;
   h. sanksi;
   i. korespondensi; dan
   j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 202

(1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan / atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 203

Bentuk dan format:
a. SPTPD;
b. SPOPD;
c. SSPD;
d. SKPD;
e. SPPT;
f. SKPDKB;
g. SKPDT;
h. SKPDN;
i. SKPDLB;
j. STPD;
k. Karcis/Bill;
l. Surat Keputusan Pembetulan;
m. Surat Keputusan Keberatan;
n. NPWPD;
o. SKRD;
p. SSRD;

q. SKRDLB;
r. STRD; dan
s. Surat Teguran,

tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 204

Pada saat ini Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 33);
b. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 34); dan
c. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Pembagian Dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 205

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal, 30 September 2024
Pj. BUPATI BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta pada
tanggal, 30 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

RAHMAT BIYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR
22 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN PRESENTASI KELOMPOK OBJEK PBB-P2

NO	NILAI NJOP	DASAR PENGENAAN	TARIF	
			PBB-P2	PBB-P2 Lahan Produksi Pangan dan Ternak
1	Rp. 0 s.d Rp. 1.000.000.000	25%	0,5 %	0,4 %
2	Rp. 1.000.000.001 s.d Rp. 5.000.000.000	50 %	0,5 %	0,4 %
3	Rp. 5.000.000.001 Keatas	61 %	0,5 %	0,4 %

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR ...22.. TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KLASIFIKASI DAN BESARAN NJOP PERMUKAAN BUMI

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO
KECAMATAN: 010-MANANGGU
KELURAHAN: 01- MANANGGU

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DSN LATULA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN LATULA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN LATULA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN LATULA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN LATULA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL TRANS DUSUN LATULA	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL.DSN LATULA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DSN JAMBURA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN LATULA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN LATULA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN LATULA	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN LATULA	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL TRANS DUSUN LATULA	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS DUSUN LATULA	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	DSN 1 OTALOJINI	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DSN OTOLOJINI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DSN OTALOJINI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DSN OTOLOJINI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN JAMBURA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN LATULA	AG	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DUSUN OTALOJINI	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN OTOLOJINI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN OTOLOJINI	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN OTOLOJINI	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN OTOLOJINI	AG	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL SETAPAK	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN JAMBURA	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN JAMBURA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL TRANS DUSUN JAMBURA	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL.DSN JAMBURA	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DSN JAMBURA	AJ	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DSN OTALOJINI	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM		ASS	SEKDA	

004	JL.DSN JAMBURA	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DSN JAMBURA	AJ	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DSN OTALOJINI	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN JAMBURA	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL DUSUN JAMBURA	AJ	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DUSUN JAMBURA	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN JAMBURA	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN OTOLOJINI	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL TRANS DUSUN JAMBURA	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL TRANS DUSUN JAMBURA	AJ	086	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL DSN OTALOJINI	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DSN OTALOJINI	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN OTOLOJINI	AG	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL DUSUN OTOLOJINI	AI	086	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL DUSUN OTOLOJINI	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DUSUN OTOLOJINI	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL TRANS DUSUN OTOLOJINI	AG	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL DUSUN LATONDA	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL DUSUN LATULA	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL DUSUN LATULA	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL DUSUN LATULA	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL TRANS DSN LATULA	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL TRANS DUSUN LATULA	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL TRANS DUSUN LATULA	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150

KABAG HUKUM	DINASHUB DAN KANTOR	ASS	SEKDA	

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 010-MANANGGU
KELURAHAN: 02- TABULO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL LORONG TERMINAL	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL SAWAH	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL SAWAH DUSUN MEKAR	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL TERMINAL	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TERMINAL DUSUN MEKAR	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	TERMINAL DSN MEKAR	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN MEKAR	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN MEKAR	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL TERMINAL	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TERMINAL DSN MEKAR	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TERMINAL DUSUN MEKAR	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS DSN MEKAR	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL TRANS DUSUN MEKAR	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL TRANS SULAWESI	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	BENDUNGAN DSN MAKMUR	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL BENDUNGAN	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL BENDUNGAN DUSUN	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DUSUN MAKMUR	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN MAKMUR	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TRANS DUSUN MAKMUR	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL. BENDUNGAN DUSUN	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL. BENDUNGAN DUSUN	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL.DSN MAKMUR	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL BENDUNGAN	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL BENDUNGAN DUSUN	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DSN MAKMUR	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN MAKMUR	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL SAWAH DUSUN MAKMUR	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL TRANS	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL TRANS DUSUN MAKMUR	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL.DSN MAKMUR	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN SENTRAL	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL DUSUN SENTRAL	AG	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DUSUN SENTRAL	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL LAPANGAN DUSUN SENTRAL	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000

005	JL LAPANGAN DUSUN SENTRAL	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL PELABUHAN DUSUN	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL TRANS DUSUN SENTRAL	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL TRANS DUSUN SENTRAL	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL.PELABUHAN	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL.TRANS	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	PELABUHAN DSN SENTRAL	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DSN SENTRAL	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DUSUN SENTRAL	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL LAPANGAN DUSUN SENTRAL	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL LINGKAR	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL PELABUHAN	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL PELABUHAN DUSUN	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL PPK DUSUN SENTRAL	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL. LINGKAR KECAMATAN	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL. PELABUHAN SENTRAL	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL. PKK DSN SENTRAL	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	PELABUHAN	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	DSN SENTRAL	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL DUSUN SENTRAL	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL KEBUN DUSUN SENTRAL	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL PELABUHAN	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL PELABUHAN DUSUN	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL TRANS DUSUN SENTRAL	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL. PELABUHAN	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	PELABUHAN	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL DUSUN MEKAR	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL SAWAH DUSUN MEKAR	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL TRANS	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
008	JL TRANS DUSUN MEKAR	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
008	JL TRANS SULAWESI	AF	84	23.000	s/d	31.000	27.000
008	JL.SAWAH DSN MEKAR	AI	88	5.900	s/d	8.400	7.150

KABAG HUKUM	ADMINISTRASI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 010-MANANGGU
KELURAHAN: 003-BENDUNGAN

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DSN BOTULIONDU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN BOTULIYODU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN BOTULIOMONU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN BOTULIONDU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN BOTULIYODU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL IRIGASI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL SALAONDE	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL BERINGIN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL BERINGIN	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DSN BOTULIYODU	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN BERINGIN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN BOTULIOMONU	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN BOTULIONDU	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN BOTULIONDU	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN BOTULIONDU	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN BOTULIONDU	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN BOTULIYODU	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN IRIGASI	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN TERATAI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL IRIGASI	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL IRIGASI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TERATAI	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TERATAI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA	AH	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DESA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DESA	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL IRIGASI	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL IRIGASI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL IRIGASI	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL IRIGASI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL IRIGASI	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL IRIGASI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL IRIGASI	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	ORDA/KEUDA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL IRIGASI	AL	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL.IRIGASI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.IRIGASI	AL	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL IRIGASI	AM	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL LAMBU	AM	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL LAMBU	AN	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL LAMBU	AO	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL LAMBU	AP	088	5,900	s/d	8,400	7,150

KABAG HUKUM	DINAS/CABAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 010-MANANGGU
KELURAHAN: 04- KAARUYAN

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DESA DUSUN I	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA DUSUN I	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DESA DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DESA DUSUN III	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DESA DUSUN III	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA DUSUN III	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA DUSUN III	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DESA DUSUN III	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA DUSUN III	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DESA DUSUN III	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DESA	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA DUSUN I	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA DUSUN I	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DESA DUSUN II	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA DUSUN II	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DESA DUSUN II	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA DUSUN II	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA DUSUN II	AI	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DESA DUSUN II	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DESA DUSUN II	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA DUSUN III	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA DUSUN III	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DESA DUSUN III	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN IV	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL.DESA DSN II	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DESA	AI	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DESA	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DESA DSN I	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA DUSUN I	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA DUSUN I	AI	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DESA DUSUN I	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA DUSUN I	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DSN I	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	JL DSN I ESAMOKAN	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN PALATO BARAT	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS SULAWESI	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL TRANS SULAWESI DUSUN	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS SULAWESI DUSUN	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL.TRANS SULAWESI	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	TRANS SULAWESI	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000

KABAG HUKUM	DIKOORDINASIKAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 010-MANANGGU
KELURAHAN: 05- SALILAMA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN PALATO UTARA	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL BANDES	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DESA	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DSN PALATO UTARA	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN PALATO UTARA	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DSN PALATU UTARA	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN II	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN II	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN III	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN PALATO	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN PALATO UTARA	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN PALATO UTARA	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL.DESA	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL BANDES	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DSN PALATO TIMUR	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DSN PALATO UATARA	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DSN PALATO UTARA	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN II	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN PALATO TIMUR	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN PALATO TIMUR	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DUSUN PALATO UTARA	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL TRANS	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JLDSN PALATO UTARA	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	DSN PALATO	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DSN PALATO BARAT	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DUSUN PALATO BARAT	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DUSUN PALATO BARAT	AF	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	DUSUN PALATO TIMUR	AF	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL BANDES	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL BANDES	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL BANDES SALILAMA	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DSN PALATO BARAT	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DSN PALATO BARAT	AF	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DUSUN II	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN PALATO BARAT	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	JL TRANS	AF	A35	17,000	s/d	23,000		20,000
003	JL TRANS SULAWESI	AF	A35	17,000	s/d	23,000		20,000

KABAG HUKUM	ORGANISASI ANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 010-MANANGGU
KELURAHAN: 06- BUTI

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DESA	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DESA	AB	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL DESA	AD	085	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL DUSUN DEWU	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN DEWU	AB	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL DUSUN DEWU	AD	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL AMD	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL AMD DSN DEWU	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL AMD DUSUN DEWU	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL AMD DUSUN DEWU	AB	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL AMD DUSUN DEWU	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DESA	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA	AB	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DESA	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DESA	AD	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL DSN DEWU	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN DEWU	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN DEWU	AB	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DUSUN DEWU	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN DEWU	AD	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL.AMD DSN DEWU	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL.DSN DEWU	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL.DSN DEWU	AB	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL.DSN DEWU	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DSN DEWU	AD	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL BENDUNGAN	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DAN KEPALA KANTOR	ASS	SEKDA	WAKIL

003	JL BENDUNGAN	AD	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL BENDUNGAN	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL BENDUNGAN	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL BUTI	AD	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DUSUN TENGAH	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN TENGAH	AD	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DUSUN TENGAH	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TENGAH	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL TENGAH	AD	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DESA	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DESA	AD	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DESA	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DESA	AG	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DSN BUTI	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN	AG	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN BUTI	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN BUTI	AD	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN BUTI	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN BUTI	AG	088	5,900	s/d	8,400	7,150

KABAG HUKUM	BIRO/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 010-MANANGGU
KELURAHAN: 07- PONTOLO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DESA DUSUN III	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA DUSUN III	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DESA DUSUN III	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	DSN II POLOHUNGO	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA DUSUN III	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA DUSUN III	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DESA DUSUN III	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS SULAWESI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL. DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL.TRANS	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	TRANS SULAWESI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DESA DUSUN II	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL TRANS	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS SULAWESI	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000

KEPALA PENILAI	PENGENDALIAN KANTOR	A.P.S	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 010-MANANGGU
KELURAHAN: 08- KERAMAT

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN KRAMAT	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	DSN KRAMAT	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL BANDES	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL BANDES	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN KERAMAT	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN KRAMAT	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN KRAMAT	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN KRAMAT	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL TRANS DUSIN I	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL TRANS SULAWESI	AA	085	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JLN DSN KRAMAT	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	BANDES	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DUA JALUR KRAMAT	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL BANDES	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL BANDES	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL BANDES	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN KRAMAT	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN KRAMAT	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS SULAWESI	AB	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL BANDES DUSUN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL BANDES DUSUN	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN II MOLONUHUWA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN MOLOHUNUWA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN MOLOHUNUWA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TRANS DUSUN	AB	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TRANS DUSUN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS SULAWESI	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	BANDES DSN MOLONUHUWA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL BANDES DUSUN	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL BANDES DUSUN	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL BUKIT BAYALO	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN BOTOHUWAYO	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN BOTOHUWAYO	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN MOLOHUNUWA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

005	JL BANDES	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL BANDES DUSUN	AII	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL BANDES DUSUN	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL BANDES DUSUN	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN BOTOHUWAYO	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN BOTOHUWAYO	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	DSN BOTUHUWAYO	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL BANDES DSN MOLUNUHUW	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL BANDES DUSUN	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL BANDES DUSUN	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL BANDES DUSUN	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DSN BOTUHUWAYO	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DSN BOUHUWAYO	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN BOTOHUWAYO	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DUSUN BOTOHUWAYO	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN BOTOHUWAYO	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DUSUN KRAMAT	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN KRAMAT	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL PELABUHAN DUSUN	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	DUSUN BOTUHUWAYO	AL	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL DSN BOTUHUWAYO	AL	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL DUSUN BOTOHUWAYO	AL	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	TRANS SULAWESI	AL	092	1,400	s/d	2,000	1,700

KABAG HUKUM			SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 010-MANANGGU
KELURAHAN: 09- TABULO SELATAN

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN BATU MEREK	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL PELABUHAN	AB	085	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL PELABUHAN DUSUN BATU	AB	085	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL.DSN BATU MERAK	AB	085	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL.DSN BATU MEREK	AB	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL DUSUN BATU MEREK	AB	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL DUSUN BATU MEREK	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL PELABUHAN DSN BATU	AB	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL PELABUHAN DUSUN BATU	AB	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL PPK DSN BATU MEREK	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL PPK DUSUN BATU MEREK	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL.DSN BATU MEREK	AB	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL.DSN BATU MEREK	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL.PELABUHAN	AB	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DUSUN BULALO	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL PELABUHAN	AD	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL PELABUHAN DUSUN BULALO	AD	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL PELABUHAN DUSUN BULALO	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL.DSN BULALO	AD	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	PELABUHAN DSN BULALO	AD	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN BULALO	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN BULALO	AB	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN BULALO	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN BULALO	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL PELABUHAN DUSUN BULALO	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL PELABUHAN DUSUN BULALO	AB	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL PELABUHAN DUSUN BULALO	AD	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL PELABUHAN DUSUN BULALO	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.DSN BULALO	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL.DSN BULALO	AB	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	TRANS SULAWESI	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL BATU MEREK	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN BULALO	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN POHILIHE	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN POHILIHE	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	SEKRETARIS DAERAH	ASS 3	SEKDA	WABUP

005	JL PELABUHAN DUSUN	AF	087	8,400	s/d	2,000	10,000
005	JL.DSN BULALO	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL.DSN POHILIHE	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN POHILIHE	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL PEL.ETALASE PELABUHAN	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL PEL.ETALASE PERIKANAN	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL PELABUHAN	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL PELABUHAN DUSUN	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL.DSN POHILIHE	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL.DSN POHOLIHE	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL.PEL ETALASE PERIKANAN	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL.PEL.ETALASE PERIKANAN	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL.PELABUHAN	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	SEKRETARIS DAERAH UNTUK	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 020-TILAMUTA
KELURAHAN: 06- TENILO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN	AA	90	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JALAN PANTAI RATU	AB	90	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL DSN	AB	90	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL DSN I BINI	AC	89	4.100	s/d	5.900	5.000
002	JL DUSUN	AB	90	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL DUSUN	AC	89	4.100	s/d	5.900	5.000
002	JL DUSUN I	AB	90	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL DUSUN II	AB	90	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL. PANTAI RATU	AB	90	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL.DUSUN	AB	90	2.900	s/d	4.100	3.500

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 020-TILAMUTA
KELURAHAN: 07- LAMU

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DESA LAMU	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL KEBUN	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL KEBUN	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL KEBUN	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL KEBUN DUSUN III	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL TRANS SULAWESI	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL TRANS SULAWESI	AF	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL TRANS SULAWESI	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
001	JL. TRANS SULAWESI	AF	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
001	KEBUN	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
001	KEBUN	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	KEBUN DSN 3 TENILO	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	KEBUN DSN III TENILO	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	KEBUN DUSUN 3	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
001	KEBUN DUSUN 3	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	KEBUN DUSUN 3	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	KEBUN DUSUN II	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
001	KEBUN DUSUN III	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	TRANS SULAWESI	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
001	TRANS SULAWESI	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	TRANS SULAWESI	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DSN TUMBA	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DESA	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL GUNUNG LAMU	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL KEBUN	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL KEBUN	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL KEBUN / GUNUNG LAMU	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL KEBUN DUSUN III	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL KEBUN DUSUN III TENILO	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL TRANS SULAWESI	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL TRANS SULAWESI	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL TRANS SULAWESI	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JLKEBUN/GUNUNG LAMU	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	KEBUN DSN III	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	KEBUN DUSUN 3 TENILO	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150

		A.n	SEKDA	WABUP

002	KEBUN DUSUN III	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	KEBUN DUSUN III TENILO	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	TRANS SULAWESI	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	TRANS SULAWESI	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	TRANS SULAWESI	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DESA LAMU	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA LAMU	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL KEBUN	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL KEBUN	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TRANS SULAWESI	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TRANS SULAWESI	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
003	KEBUN	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	KEBUN DUSIN III	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	KEBUN DUSUN III	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	KEBUN DUSUN III TENILO	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	TRANS SULAWESI	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	TRANS SULAWESI	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	TRANS SULAWESI	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
004	GRAHA MAYA II DESA LAMU	AH	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL DESA	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DESA LAMU	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL KEBUN	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL TIMBUALE	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL TIMBUALE	AH	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL TRANS SULAWESI	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL TRANS SULAWESI	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL TRANS SULAWESI	AH	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL. TIMBUALE	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.KEBUN	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL.TIMBUALE	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.TIMBUALE	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL.TRANS	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
004	KEBUN	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	KEBUN DUSUN III	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
004	TIMBUWALE	AH	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL DESA	AI	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN	AI	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL KEBUN	AI	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL TRANS SULAWAESI	AH	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL TRANS SULAWESI	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

005	JL TRANS SULAWESI	AH	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL TRANS SULAWESI	AI	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL. TRANS SULAWESI	AH	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL.KEBUN	AI	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL.TRANS SULAWESI	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JLN KEBUN DESA LAMU	AI	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	KEBUN DUSUN I BUTOLO	AI	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	TRANS SULAWESI	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
005	*TRANS SULAWESI*	*AH*	*A33*	*31,000*	*s/d*	*41,000*	*36,000*
006	JL KEBUN	AI	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL KEBUN	AK	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL TRANS SULAWESI	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL TRANS SULAWESI	AI	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL TRANS SULAWESI	AK	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL.TRANS	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
006	KEBUN	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
006	KEBUN	AI	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
006	KEBUN	AK	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	TRANS SULAWESI	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
006	TRANS SULAWESI	AI	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL DESA	AJ	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN	AJ	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL KEBUN	AI	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL KEBUN	AJ	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL KEBUN	AK	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
007	JL TRANS SULAWESI	AI	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL TRANS SULAWESI	AJ	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
007	KEBUN	AJ	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL AHMAD YANI DSN II	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DUSUN	AL	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL KEBUN	AK	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
008	JL KEBUN	AL	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL KEBUN	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL TRANS SULAWESI	AF	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL TRANS SULAWESI	AG	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
008	JL TRANS SULAWESI	AK	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
008	JL TRANS SULAWESI	AL	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL TRANS SULAWESI	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
008	KEBUN	AK	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
008	KEBUN	AL	A39	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	ORGANISASI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

008	KEBUN	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
008	KEBUN DUSUN II TIALO	AL	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
008	TRANS SULAWESI	AL	A39	4,100	s/d	5,900	5,000

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 020-TILAMUTA
KELURAHAN: 08- BAJO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DSN II	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN II	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN II	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL LOBSTER	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL LOBSTER	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL LOBSTER	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL LOBSTER DUSUN 1	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL LOBSTER DUSUN II	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL.LOBSTER	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	LOBSTER	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	LOBSTER	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	LOBSTER.	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DSN I	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DSN II	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN I	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN I	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL LOBSTER	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL LOBSTER	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL LOBSTER DUSUN 1	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL LOBSTER DUSUN 1	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL LOBSTER DUSUN 2	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL.LOBSTER	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	LOBSTER	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 020-TILAMUTA
KELURAHAN: 09- PENTADU BARAT

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN	AA	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN I	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DSN I	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DUSUN	AA	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DUSUN I	AA	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN I	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL PELABUHAN	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	*JL.PELABUHAN*	*AC*	*A35*	*17,000*	*s/d*	*23,000*	*20,000*
002	JLN HUSIN TUMULO	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	DSN I	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DSN TUNAS MEKAR	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DUSUN I	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DUSUN I PENTADU BARAT	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DESA	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN I	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DUSUN	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN I	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN I	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL PELABUHAN	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL RAISI HUWOLO	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL SMP 04	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL. HUSIN TUMULO	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL.DSN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL.DSN I	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL.DUSUN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL.DUSUN	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL.KADIR BIN KARAMA	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JLN HUSIN TUMULO	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DESA	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150

KABAG HUKUM	DPIA/BADDA/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL DSN II	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN	AI	XXX	0	s/d	*********	0
004	JL DUSUN II	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN III	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL PELABUHAN	AH	A38	5.900	s/d	8.400	7.150
004	JL PELABUHAN	AI	XXX	0	s/d	*********	0
004	JL.DUSUN	AG	A36	12.000	s/d	17.000	14.000
004	JL.PELABUHAN	AI	XXX	0	s/d	*********	0
004	JLN DAFIT MAKAUSIH	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JLN NELAYAN	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DSN III JAYA BAKTI	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DUSUN III	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN IV	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL PELABUHAN	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL PELABUHAN	AI	XXX	0	s/d	*********	0
005	JL. IBRAHIM PAKAYA	AE	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JLN IBRAHIM PAKAYA	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL DUSUN	AF	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DUSUN	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL DUSUN	AI	XXX	0	s/d	*********	0
006	JL DUSUN III	AG	A36	12.000	s/d	17.000	14.000
006	JL LOBSTER	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL.PELABUHAN	AI	XXX	0	s/d	*********	0
006	JL.DAVID MAKAUSI	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL.DUSUN	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 020-TILAMUTA
KELURAHAN: 10- MODELOMO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN II	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	DSN II	AF	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	DSN PAPADE	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	DUSUN HUNTU	AI	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
001	JL AL KHAIRAT	AF	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL ALOEI SABOE	AF	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL APIPA AMINU	AF	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL BARU	AF	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL BARU	AI	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
001	JL DSN I HUNTU	AB	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
001	JL DSN II	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL DSN II	AF	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL DSN III	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL DUDUN PAPADE	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL DUSUN II	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL DUSUN II	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL DUSUN II	AF	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL RAJA HURUDJI	AB	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
001	JL RAJA HURUJI	AB	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
001	JL TRANS SULAWESI	AB	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
001	JL.APIPA AMINU	AF	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL.DSN I	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL.DSN II	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL.DSN II	AF	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL.DUSUN II	AI	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
001	SULTAN HURUDJI	AI	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
002	JL ANDI MAPPANYUKKI	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL BARUADI KAKU	AI	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
002	JL DSN I HUNTU	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL DUSUN I	AB	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
002	JL DUSUN I	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL DUSUN I HUNTU	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL DUSUN II	AB	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
002	JL KARTINI	AB	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
002	JL KARTINI	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

002	JL KARTINI	AI	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
002	JL RAJA HURUJI	AB	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
002	JL RAJA HURUJI	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL RAJA HURUJI	AI	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
002	JL TRANS SULAWESI	AB	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
002	JL.KARTINI	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL.RAJA HURDJI	AI	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
002	RAJA HURUDJI	AI	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
003	JL ANDI MAPPANYUKKI	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL BURU	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DESA	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DSN I	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DUSUN I	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DUSUN I	AL	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DUSUN I	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN I	AQ	XXX	0	s/d	******	0
003	JL DUSUN I HUNTU	AL	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL KARTINI	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL KARTINI	AL	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL KARTINI	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL KARTINI	AQ	XXX	0	s/d	******	0
003	JL RAJA HURUJI	AJ	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JL TRANS SULAWESI	AB	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
003	JL.AGROPOLITAN	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL.AGROPOLITAN	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL.BARU	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL.DSN HUNTU	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL.TRANS MOHUNGO	AC	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
004	DSN III BATU MERAH	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	ALOEI SABOE	AO	XXX	0	s/d	******	0
004	DSN II	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	DSN II	AN	XXX	0	s/d	******	0
004	DSN III	AO	XXX	0	s/d	******	0
004	JL AL KHAIRAT	AF	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL AL KHAIRAT	AJ	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL ALOEI SABOE	AF	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL ALOEI SABOE	AO	XXX	0	s/d	******	0
004	JL DSN I	AN	XXX	0	s/d	******	0
004	JL DUSUN	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL DUSUN	AJ	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL DUSUN I	AG	A37	8,400	s/d	12.000	10,000
004	JL DUSUN I	AN	XXX	0	s/d	******	0
004	JL DUSUN II	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN II	AF	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL DUSUN II	AN	XXX	0	s/d	******	0
004	JL DUSUN II	AO	XXX	0	s/d	******	0
004	JL KARIM MAHMUD	AN	XXX	0	s/d	******	0
004	JL KEMBANG RAYA	AG	A37	8,400	s/d	12.000	10,000
004	JL KEMBANG RAYA	AJ	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL RAJA HURUDJI	AJ	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL RAJA HURUJI	AJ	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL. ALOE SABOE	AO	XXX	0	s/d	******	0
004	JL. KADIR BIN KARAMA	AG	A37	8.400	s/d	12.000	10.000
004	JL.ALOE SABOE	AO	XXX	0	s/d	******	0
004	JL.DESA	AG	A37	8.400	s/d	12.000	10.000
004	JL.DSN II	AN	XXX	0	s/d	******	0
004	JL.KADIR BIN KARAMA	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.KARIM MACHMOED	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL.KARIM MACHMOED	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.MUSTAFA KARAMA	AA	A36	12.000	s/d	17.000	14.000
004	JL.MUSTAFA KARAMA	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.MUSTAPA KARAMA	AA	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL.MUSTAPA KARAMA	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.MUTAFA KARAMA	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.PELABUHAN	AJ	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL.RAJA HURUDJI	AJ	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL.SIS ALJUFRI	AF	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
005	AR ABDJUL	AP	XXX	0	s/d	******	0
005	AR ABDJUL DSN III IPILO	AP	XXX	0	s/d	******	0
005	BATU MERAH DSN III IPILO	AH	A38	5,900	s/d	8.400	7,150
005	DESA MODELOMO	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	DSN II	AP	XXX	0	s/d	******	0
005	DSN III	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	DSN III AR ABDJUL	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	DSN III AR ABDJUL	AP	XXX	0	s/d	******	0
005	DSN III IPILO	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	DSN III IPILO	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	DSN III IPILO	AP	XXX	0	s/d	******	0
005	DUSUN III IPILO	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150

KABAG HUKUM	DEPARTEMEN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

005	DUSUN III IPILO	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	DUSUN III MODELOMO	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL BATU MERAH	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DSN III	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DSN III	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DSN III	AP	XXX	0	s/d	******	0
005	JL DSN III IPILO	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DUSUN	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DUSUN 3	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN II	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN III	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DUSUN III	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DUSUN JII	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN III	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DUSUN III	AP	XXX	0	s/d	******	0
005	JL LRG PASAR	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL MELATI	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL. DUSUN III IPILO	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL.A R ABDJOEL	AP	XXX	0	s/d	******	0
005	JL.A R ABDJUL	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL.A R ABJUL	AP	XXX	0	s/d	******	0
005	JL.A.R ABDJUL	AP	XXX	0	s/d	******	0
005	JL.AR ABDJOEL	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL.AR ABDJOEL	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL.AR ABDJOEL	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL.AR ABDJUL	AP	XXX	0	s/d	******	0
005	JL.AR ABDJUL DUSUN 3 IPILO	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL.AR.ABDJUL	AP	XXX	0	s/d	******	0
005	JL.BATU MERAH	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL.BATU MERAH	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL.DSN III	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL.DSN III	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL.DSN III	AP	XXX	0	s/d	******	0
005	JL.DUSUN	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL.DUSUN III IPILO	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL.DUSUN III IPILO	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL.KARIM MACHMOED	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL.MELATI	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL.MELATI	AP	XXX	0	s/d	******	0

KABAG HUKUM	SINKRONISASI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

005	JL.PASAR MINGGU	AK	A37	8,400	s/d	12,000		10,000
005	SETAPAK	AK	A37	8,400	s/d	12,000		10,000

KABAG HUKUM	DIREKSI/KADIR KANTOR	ASS	SEKDA	WALIKOT

PROVINSI: 75-GORONTALO KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 020-TILAMUTA
KELURAHAN: 11- HUNGAYONAA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)	KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN V	AG	A38	5.900 s/d 8.400	7.150
001	JL DESA	AE	A34	23,000 s/d 31,000	27,000
001	JL DESA	AG	A38	5,900 s/d 8,400	7,150
001	JL DSN III	AG	A38	5,900 s/d 8,400	7,150
001	JL DSN V	AB	A37	8,400 s/d 12,000	10,000
001	JL DSN V	AE	A34	23,000 s/d 31,000	27,000
001	JL DSN V	AG	A38	5,900 s/d 8,400	7,150
001	JL DUSUN	AE	A34	23,000 s/d 31,000	27,000
001	JL DUSUN	AG	A38	5,900 s/d 8,400	7,150
001	JL KEBUN	AB	A37	8,400 s/d 12,000	10,000
001	JL KEBUN	AE	A34	23,000 s/d 31,000	27,000
001	JL KEBUN	AG	A38	5,900 s/d 8,400	7,150
001	JL KEBUN	AH	A37	8,400 s/d 12,000	10,000
001	JL KEBUN	AJ	A36	12,000 s/d 17,000	14,000
001	JL KEBUN DSN V	AG	A38	5,900 s/d 8,400	7,150
001	JL KEBUN DUSUN IV	AG	A38	5,900 s/d 8,400	7,150
001	JL KEBUN DUSUN V	AB	A37	8,400 s/d 12,000	10,000
001	JL KEBUN DUSUN V	AE	A34	23,000 s/d 31,000	27,000
001	JL KEBUN DUSUN V	AG	A38	5,900 s/d 8,400	7,150
001	JL RABAT BETON	AJ	A36	12,000 s/d 17,000	14,000
001	JL TRANS SULAWESI	AH	A37	8,400 s/d 12,000	10,000
001	JL TRANS SULAWESI	AJ	A36	12,000 s/d 17,000	14,000
001	JL TRANS SULAWESI DSN V	AJ	A36	12,000 s/d 17,000	14,000
001	JL TRANS SULAWESI DUSUN IV	AG	A38	5,900 s/d 8,400	7,150
001	JL TRANS SULAWESI DUSUN V	AH	A37	8,400 s/d 12,000	10,000
001	JL TRANS SULAWESI DUSUN V	AJ	A36	12,000 s/d 17,000	14,000
001	JL TSANAWIYAH	AE	A34	23,000 s/d 31,000	27,000
001	JL. DUSUN LIMA	AE	A34	23,000 s/d 31,000	27,000
001	JL. KEBUN	AG	A38	5,900 s/d 8,400	7,150
001	JL. PERUM	AE	A34	23,000 s/d 31,000	27,000
001	JL. PPK	AG	A38	5,900 s/d 8,400	7,150
001	JL. TIMBUWALE	AG	A38	5,900 s/d 8,400	7,150
001	JL. TRANS	AG	A38	5,900 s/d 8,400	7,150
001	JL. TRANS	AJ	A36	12,000 s/d 17,000	14,000
001	JL. TRANS SULAWESI	AJ	A36	12,000 s/d 17,000	14,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WAKIL

001	JL. TSANAWIYAH	AE	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
001	JL.DSN III	AG	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL.TRANS	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	TRANS SULAWESI	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL ALI AMILI	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL DSN III	AA	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL DSN III	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DSN IV	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL DUSUN	AA	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL DUSUN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL DUSUN	AE	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL DUSUN III	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL KEBUN	AA	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL KEBUN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL KEBUN	AG	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL KEBUN DSN III	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL KEBUN DUSUN III	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL KEBUN DUSUN IV	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL KEBUN PERUM	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL PERUM DUSUN III	AA	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL PERUM GRAHA	AA	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL PERUM GRAHA	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL PERUM GRAHA	AE	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL PERUM GRAHA D-6	AA	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL TAMAN BAHAGIA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL TAMAN BAHAGIA	AE	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL TSANAWIYAH	AE	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL. DUSUN III	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL. KEBUN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL. LORONG PERMATA COCO	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL. LORONG PERUM COCO	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL. PERMATA COCO	AE	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL. PERUM GRAHA	AA	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL. PERUM PERMATA COCO	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL. PNPM DUSUN III	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL. SETAPAK	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL.ALI AMILI	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL.KEBUN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL.KEBUN DSN IV	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

002	JL.TAMAN BAHAGIA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JLN. BAHAGIA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	PERUM PERMATA COCO	AE	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DSN IV	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DUSUN	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN IV	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL KEBUN	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL KEBUN DUSUN VI	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TAMAN BAHAGIA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL TRANS DSN IV	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TRANS SULAWESI	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL TRANS SULAWESI	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TRANS SULAWESI DUSUN IV	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL. SETAPAK	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL.ALI AMILI	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL.TAMAN BAHAGIA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL.TRANS	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	LORONG TEPI SUNGAI DSN IV	AD	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	DSN II	AK	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	DUSUN II	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	DUSUN III	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DSN II	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN	AK	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN II	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN III	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN III	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL KEBUN	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL KEBUN	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL MERDEKA	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL MESJID AGUNG DUSUN II	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL MESJID AGUNG DUSUN II	AK	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL TRANS DUSUN I	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL TRANS DUSUN I	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL TRANS SULAWESI	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL TRANS SULAWESI	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL TRANS SULAWESI DUSUN II	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL TRANS SULAWESI DUSUN II	AK	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL TRANS SULAWESI DUSUN III	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000

KABAG HUKUM	ORMAS&DAM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL TRANS SULAWESI DUSUN IV	AE	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL TSANAWIYAH	AE	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL. KEBUN	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL. SETAPAK	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL. TSANAWIYAH	AE	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL.LRG.KEBUN	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL.RASID P MUSA	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL.TRANS SULAWESI	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	DUSUN I	AN	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DSN I	AM	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
005	JL DUSUN	AL	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL DUSUN	AM	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
005	JL DUSUN	AO	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
005	JL DUSUN I	AN	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL KEBUN	AN	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL KEBUN	AO	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
005	JL KEBUN DSN I	AO	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
005	JL KEBUN DUSUN I	AO	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
005	JL LORONG	AM	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
005	JL LORONG DSN I	AN	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL LORONG DUSUN I	AM	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
005	JL MERDEKA	AM	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
005	JL SETAPAK DSN SATU	AM	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
005	JL SETAPAK DSN SATU	AN	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL SISWA	AM	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
005	JL TENGAH	AM	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
005	JL TENGAH	AN	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL TENGAH DSN I	AM	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
005	JL TENGAH DSN SATU	AM	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
005	JL TRANS	AO	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
005	JL TRANS SULAWESI	AN	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL TRANS SULAWESI	AO	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
005	JL TRANS SULAWESI	AP	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL TRANS SULAWESI DSN SATU	AN	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL TRANS SULAWESI DSN I	AN	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL TRANS SULAWESI DSN SATU	AN	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL. KEBUN	AO	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
005	JL. MERDEKA	AL	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL. TRANS SULAWESI	AP	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL.MERDEKA	AL	A33	31,000	s/d	41,000	36,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

005	JL.MERDEKA	AM	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
005	JL.TRANS SULAWESI	AM	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
005	JL.TRANS SULAWESI	AN	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JLN TRANS SULAWESI	AN	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	MERDEKA DUSUN I	AM	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
005	TRANS SULAWESI	AO	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
006	JL DESA	AI	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
006	JL DESA	AR	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL DSN II	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DSN JJJ	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DUSUN	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DUSUN II	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DUSUN III	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL DUSUN III	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL KEBUN	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL KEBUN	AR	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL KEBUN DUSUN JJ	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL KEBUN DUSUN III	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL PNPM DSN II	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL TERMINAL	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL TERMINAL	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL TERMINAL	AR	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL TERMINAL DSN II	AR	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL TERMINAL DUSUN JJ	AR	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL TERMINAL DUSUN III	AI	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
006	JL TRANS SULAWESI	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL TRANS SULAWESI DSN III	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL TRANS SULAWESI DUSUN II	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL TRERMINAL	AR	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL. LORONG PNPM	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL. LORONG PNPM	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL. PASAR	AR	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL. PNPM	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL. SETAPAK	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL. TERMINAL	AR	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL. TRANS	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL. TRANS SULAWESI	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL.LRG.PNPM	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL.TERMINAL	AQ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
007	DUSUN I	AT	A38	5,900	s/d	8,400	7,150

KA.BAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

007	JL DESA	AI	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
007	JL DESA	AR	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
007	JL DESA	AT	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL DESA DSN 2	AT	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL DESA DUSUN III	AR	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
007	JL DUSUN	AR	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
007	JL DUSUN	AS	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL DUSUN II	AR	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
007	JL KEBUN	AI	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
007	JL KEBUN	AR	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
007	JL KEBUN	AS	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL KEBUN	AT	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL KEBUN DSN V	AS	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL PERUM GRAHA	AI	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
007	JL PERUM GRAHA MAYA	AI	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
007	JL SLB DSN III	AS	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL.MTS DSN III	AS	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JLDSN V	AS	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
007	KAMPUNG CINA	AT	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL.KEBUN DS HUNGAYONAA	AS	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL DESA	AI	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
008	JL DESA DUSUN V	AI	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
008	JL DSN V	AS	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL DSN V	AU	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DUSUN	AI	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
008	JL DUSUN	AS	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL DUSUN	AU	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DUSUN V	AI	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
008	JL DUSUN V	AS	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL DUSUN V	AU	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL KEBUN	AI	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
008	JL KEBUN	AS	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL KEBUN	AU	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL KEBUN DSN V	AS	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL KEBUN DSN V	AU	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL KEBUN DUSUN V	AU	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL PERUM GRAHA MAYA	AI	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
008	JL TRANS	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
008	JL TRANS SULAWESI	AH	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL TRANS SULAWESI	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

008	JL TRANS SULAWESI	AS	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL TRANS SULAWESI DUSUN V	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
008	JL.TRANS	AJ	A36	12,000	s/d	17,000	14,000

KABAG HUKUM	DINASBADAK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 020-TILAMUTA
KELURAHAN: 12- AYUHULALO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	AYUHULALO	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	AYUHULALO	AG	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL KEBUN	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL KEBUN	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL KEBUN	AG	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL KEBUN PARIWISATA	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL PARIWISATA	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL PARIWISATA	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL PARIWISATA	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL.PARIWISATA	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JLN KEBUN	AG	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JLN PARIWISATA	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JLN PARIWISATA	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JLN PARIWISATA	AG	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	KEBUN	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
001	KEBUN	AG	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	PARIWISATA	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	PARIWISATA	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	AYUHULALO	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL PARIWISATA	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL PARIWISATA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL.PARIWISATA	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL.PARIWISATA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JLN PARIWISATA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL BAHAGIA	AF	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN	AF	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL KEBUN	AF	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL PARIWISATA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL PARIWISATA	AF	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TIMBUALE	AF	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN	AF	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL KEBUN	AF	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL PARIWISATA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000

KABAG HUKUM	ORNAMBAGAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL PARIWISATA	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL PARIWISATA	AF	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL.PARIWISATA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL DUSUN	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DUSUN	AF	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL KEBUN	AF	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL PARIWISATA	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL PARIWISATA	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL PARIWISATA	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL PARIWISATA	AF	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL PPK	AF	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL.DJARIAH B MANTO	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL.PARJWISATA	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL.PARIWISATA	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JLN PARIWISATA	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JLN PARIWISATA	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	PARIWISATA	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 020-TILAMUTA
KELURAHAN: 13- PILOLIYANGA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL KEBUN	AA	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL.TERATAI	AA	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JLN KEBUN	AA	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL KEBUN	AB	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL MODINI	AB	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JLN TERATAI	AB	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL KEBUN	AK	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JLN MODINI	AK	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DSN MODINI	AJ	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN I	AI	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL KEBUN	AJ	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL MODINI	AI	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL MODINI	AJ	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL PROF DR SAMIN RADJIK	AJ	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL UPOMELA	AL	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL.PROF.SAMIN RADJI	AL	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JLN MODINI	AJ	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	PROF DR SAMIN RADJIK	AI	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	PROF DR SAMIN RADJIK	AJ	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL BONTULA	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DESA	AO	XXX	0	s/d	********	0
005	JL DUSUN I	AO	XXX	0	s/d	********	0
005	JL DUSUN III	AO	XXX	0	s/d	********	0
005	JL GELORA	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL KEBUN	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL MODINI	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL MODINI	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL MODINI	AI	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL PAAL III	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL PAAL III	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL PAL III	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL PROF SAMIN R NUR	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL TERATAI	AO	XXX	0	s/d	********	0
005	JL. BONTULA	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL. DUSUN III	AO	XXX	0	s/d	********	0

KABAG	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

005	JL. MODINI	AI	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL. NANI WARTABONE	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL.BONTULA	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL.MODINI	AI	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL.NANI WARTABONE	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL.PAAL III	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL.TERATAI	AO	XXX	0	s/d	********	0
005	PROF DR SAMIN RADJIK NUR S.H	AI	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DESA PILOLIYANGA	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL KEBUN	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL KOL M.LIPUTO	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL NANI WARTABONE	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL NANI WARTABONE	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL PAAL III	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL PAAL III	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL PERUMNAS	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL PERUMNAS	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL PERUMNAS PILOLIYANGA	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL TERATAI	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL.DSN III	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL.MARTIN LIPUTO	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL.PERUMNAS	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL.PERUMNAS PILOLIYANGA	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JLN PAAL II	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JLN PAAL III	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JLN TERATAI	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
006	PERUM PILOLIYANAGA C.05	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	PERUM PILOLIYANGA	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	PERUMNAS PILOLIYANGA	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL KEBUN	AC	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL. BONTULA	AC	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DUSUN	AC	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DUSUN	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL GELORA	AC	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL JERUK	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL KEBUN	AC	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL. DSN IV	AC	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DSN IV	AC	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN	AC	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	KABAG UMUM & KEPEGAWAIAN	ASISTEN	SEKDA	WABUP

009	JL DUSUN IV	AC	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL KEBUN	AC	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL KEBUN	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
009	JL.DSN IV	AC	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JLN MARTEN LIPUTO	AC	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
010	*JL DUSUN*	*AD*	*A41*	*2,000*	*s/d*	*2,900*	*2,450*
010	JL JERUK	AD	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JL JERUK	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL KEBUN	AD	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JL KOLONEL M LIPUTO	AD	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JLN KEBUN	AD	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
011	*JL BALOMBO*	*AF*	*A37*	*8,400*	*s/d*	*12,000*	*10,000*
011	JL JERUK	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
011	JL KOL.M.LIPUTO	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
011	JL SETAPAK LORONG 2	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	JL KEBUN	AD	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
012	JLN KEBUN	AD	A41	2,000	s/d	2,900	2,450
013	*JL CEMPAKA*	*AE*	*A35*	*17,000*	*s/d*	*23,000*	*20,000*
013	JL CEMPAKA	AN	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
013	JL DESA	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
013	JL DSN III	AN	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
013	JL DUSUN I	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
013	JL DUSUN III	AN	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
013	*JL IMAM BONJOL*	*AN*	*A37*	*8,400*	*s/d*	*12,000*	*10,000*
013	JL KEBUN	AN	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
013	JL TERATAI	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
013	JL TERATAI	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
013	JLN CEMPAKA	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
013	JLN KEBUN	AN	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
014	*JL CEMPAKA*	*AE*	*A35*	*17,000*	*s/d*	*23,000*	*20,000*
014	JL KEBUN	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
014	JL KEBUN	AM	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
014	JL MELATI	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
014	JL MELATI	AP	XXX	0	s/d	********	0
014	JL TERATAI	AM	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
014	*JL TERATAI*	*AO*	*XXX*	*0*	*s/d*	********	*0*
014	JL UPOMELA	AL	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
014	JL.CEMPAKA	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
014	JL.IMAM BONJOL	AM	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
014	JLN KEBUN	AM	A37	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 020-TILAMUTA
KELURAHAN: 14- LIMBATO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	AHMAD YANI	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JALAN DUSUN	AB	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	*JL AHMAD YANI*	*AC*	*A33*	*31,000*	*s/d*	*41,000*	*36,000*
001	JL AHMAD YANI, JEND	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL AHMAD YANI, JEND	AB	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL AHMAD YANI, JEND	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL AHMAD YANI, JEND	AH	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
001	JL AHMAD YANI, JEND	AI	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL AHMAD YANI, JEND	AJ	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
001	JL DESA LIMBATO	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL JEND.AHMAD YANI	AH	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
001	JL LAPANGAN	AJ	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
001	JL LORONG	AB	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL LORONG	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL MELATI	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL SETAPAK	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL SETAPAK	AB	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL SETAPAK	AF	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL SITI RAWI	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL SITI RAWI	AH	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
001	JL TRANS SULAWESI	AJ	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
001	JL. SITI RAWI	AH	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
001	JL.AHMAD YANI	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	SITI RAWI	AB	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
001	SITI RAWI	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	SITI RAWI	AH	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
001	*SITIRAWI*	*AI*	*A35*	*17,000*	*s/d*	*23,000*	*20,000*
002	DSN III	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	DUSUN	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	DUSUN	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL AHMAD YANI	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL AHMAD YANI, JEND	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL AHMAD YANI, JEND	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL AHMAD YANI, JEND	AF	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

002	JL DUSUN	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL DUSUN II	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL DUSUN II	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL INPRES	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL JEND AHMAD YANI	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL LORONG DSN DILEHITO	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL SETAPAK	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL SETAPAK	AF	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL SITI RAWI	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL SITI RAWI	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL SITI RAWI	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL SITIRAWI	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL. SETAPAK	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL. SITI RAWI	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL.KIHAJAR DEWANTARA	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL.SITI RAWI	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	KIHAJAR DEWANTARA	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	SITI RAWI	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	TANI	AF	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	DUSUN	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL AHMAD YANI, JEND	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL AHMAD YANI, JEND	AH	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
003	JL AHMAD YANI, JEND	AJ	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
003	JL AHMAD YANI, JEND	AL	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JL INPRES	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL INPRES	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL JEND AHMAD YANI	AH	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
003	JL LORONG CERIA	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL MERDEKA	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL MERDEKA	AJ	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
003	JL MERDEKA	AL	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JL MERDEKA, DSN I	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL SITI RAWI	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL. RORONG CERIA	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL. SITI RAWI	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL.A.YANI	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL.A.YANI	AH	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
003	JL.MERDEKA	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	KIHAJAR DEWANTARA	AE	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	KIHAJAR DEWANTARA	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	MERDEKA	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	SITI RAWI	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	SITI RAWI	AH	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
004	JL LAPANGAN	AJ	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
004	JL LORONG SMU	AJ	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
004	JL LORONG SMU	AL	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL MERDEKA	AJ	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
004	JL MERDEKA	AL	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL SETAPAK	AK	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL SMU	AL	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL TRANS SULAWESI	AJ	A31	55,000	s/d	73,000	64,000
004	JL TRANS SULAWESI	AL	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL.MERDEKA	AL	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL.TRANS SULAWESI	AJ	A31	55,000	s/d	73,000	64,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 020-TILAMUTA
KELURAHAN: 15- MOHUNGO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL DUSUN II	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN KALIMAS	AA	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL KEBUN	AA	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL KEBUN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL KEBUN	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL.DSN II	AA	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN	AA	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL DUSUN II	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN II	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL DUSUN II TOHULITO	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL DUSUN KALIMAS	AA	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN KALIMAS	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN KALIMAS	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL KEBUN	AA	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL KEBUN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JLN KIHAJAR DEWANTARA	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JLN KIHARAJAR DEWANTARA	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JLN TANI	AA	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL BONTULA	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DESA MOHUNGO	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JL DUSUN	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JL DUSUN II	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JL DUSUN KALIMAS	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JL DUSUN KALIMAS	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL KEBUN	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JLN KIHAJAR DEWANTARA	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JLN KIHAJAR DEWANTARA	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	KIHAJAR DEWANTARA	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL DSN II	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL DUSUN	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL DUSUN	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN II	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000

KABAG HUKUM	ORNASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL DUSUN II	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN KALIMAS	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL KEBUN	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL KEBUN	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL LINGKUNGAN	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL SETAPAK	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL.DSN II	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.KIHAJARDEWANTARA	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN DESA DSN TOHULITO	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN KI HAJARA DEWANTARA	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JLN KIHAJAR DEWANTARA	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JLN KIHAJAR DEWANTARA	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN SETAPAK	AD	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DSN	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL DUSUN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DUSUN	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL DUSUN II	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL DUSUN KALIMAS	AA	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN KALIMAS	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DUSUN KALIMAS	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL KEBUN	AA	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL KEBUN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL LINGKUNGAN	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JLN KIHAJAR DEWANTARA	AC	A33	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JLN KIHAJAR DEWANTORO	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL KEBUN	AA	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL KEBUN	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
007	JL LINGKUNGAN	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
007	JL LINGKUNGAN	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
007	JL SETAPAK	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
007	JL SETAPAK	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
007	JL TRANS SULAWESI	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
007	JL TRANS SULAWESI	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
007	JL TRANS SULAWESI MOHUNGO	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
007	JLN TRANS SULAWESI	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
008	JL SETAPAK	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
008	JL TRANS SULAWESI	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
008	JL TRANS SULAWESI	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
009	JL KEBUN	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
009	JL KEBUN DUSUN I	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

009	JL SETAPAK	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
009	JL TRANS SULAWESI	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
009	JL TRANS SULAWESI	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
009	JL.KIHAJAR DEWANTARA	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
010	DUSUN BOTUDUDULAA	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL BARU	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL BARU DS MOHUNGO	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL BARU DUSUN I	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL DUSUN	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL DUSUN I	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL KEBUN	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL SETAPAK	AH	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
010	JL SETAPAK DUSUN I	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL TRANS SULAWESI	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
010	JL TRANS SULAWESI	AH	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
010	JL TRANS SULAWESI	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL. BOTUDUDULAA	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL.BARU	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL.BARU MOHUNGO	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL.DESA	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL.TRANS SULAWESI	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
010	JLN KEBUN DUSUN 1	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JLN TRANS SULAWESI	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
011	DSN I	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
011	JL BONTULA	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
011	JL BONTULA	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
011	JL BONTULA	AH	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
011	JL BONTULA	AI	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
011	JL BONTULA	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
011	JL DUSUN	AH	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
011	JL DUSUN I	AI	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
011	JL KEBUN	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
011	JL KEBUN	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
011	JL LINGKUNGAN	AH	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
011	JL LINGKUNGAN	AI	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
011	JL SETAPAK	AH	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
011	JL TRANS SULAWESI	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
011	JL TRANS SULAWESI	AH	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
011	JL TRANS SULAWESI	AI	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
011	JL TRANS SULAWESI	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

011	JL.AGROPOLITAN	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
011	JL.TRANS	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
011	JLN BONTULA	AI	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
011	JLN HULUDU LIMU	AI	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
012	DSN III	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	JL BONTULA	AI	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
012	JL BONTULA	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	JL KEBUN	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
012	JL KEBUN	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	JL LINGKUNGAN	AE	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
012	JL LINGKUNGAN	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
012	JL LINGKUNGAN	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	JL SETAPAK	AJ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
012	JL SETAPAK	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	JL TRANS SULAWESI	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
012	JL TRANS SULAWESI	AJ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
012	JL TRANS SULAWESI	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	JL.TRANS SULAWESI	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	JLN HULUDU LIMU	AI	A34	23,000	s/d	31,000	27,000
012	JLN LINGKUNGAN	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
012	JLN TRANS SULAWESI	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
012	TRANS SULAWESI	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
013	JL KEBUN	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
013	JL KEBUN	AJ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
013	JL KEBUN	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
013	JL KEBUN	AL	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
013	JL LINGKUNGAN	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
013	JL LINGKUNGAN	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
013	JL SETAPAK	AJ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
013	JL SETAPAK	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
013	JL TRANS SULAWESI	AG	A32	41,000	s/d	55,000	48,000
013	JL TRANS SULAWESI	AJ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
013	JL TRANS SULAWESI	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
013	JLN KEBUN	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
013	JLN LINGKUNGAN	AJ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
013	JLN SETAPAK	AJ	A35	17,000	s/d	23,000	20,000

KABAG HUKUM	DINSOS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 020-TILAMUTA
KELURAHAN: 16- PENTADU TIMUR

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	'JLN CAKALANG	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	CAKALANG	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL CAKALANG	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL CAKALANG DSN I	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL CUT NYAK DIEN	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DESA	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL DESA PENTADU TIMUR	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL DSN 1	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DSN I LIPA	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN I	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL SIS AL JUFRI	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL. NIPAH	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL.NIPAH	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL.NIPAH	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL.TUNA	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN CAKALANG	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN CAKALANG	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JLN NIPA	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN NIPAH	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN NIPAH	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JLN PELABUHAN	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
001	NIPAH	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	NIPPAH DUSUN 1 LIPA	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL CUT NYAK DIEN	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DESA	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL DSN LIPA	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN	AI	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL HUSIN TUMULO	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL NIPAH	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL PELABUHAN	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL SIS AL JUFRI	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL. PELABUHAN	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL.DUSUN	AI	A37	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

002	JL.NIPAH	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL.NIPAH	AI	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL.YOS SUDARSO	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JLN NIPAH	AC	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JLN NIPAH	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JLN NIPAH	AI	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JLN PELABUHAN	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JLN TUNA	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JLN TUNA	AI	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JLN YOS SUDARSO	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
002	NIPAH	AI	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	PELABUHAN	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	PELABUHAN DUSUN I LIPA	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
002	TUNA DUSUN I LIPA	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	DSN II LABUHAN	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DESA	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DESA	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DESA PENTADU TIMUR	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN I	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN II LABUHAN	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN I	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN II	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL HUSIN TUMULO	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL SIS AL JUFRI	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL SIS AL JUFRI	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL SIS AL JUFRI	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL SIS AL-JUFRI	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TUNA	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL YOS SUDARSO	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL YOSSUDARSO DSN II	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL YOSSUDARSO DSN II	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL. DSN II	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL.TUNA	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL.TUNA	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL.YOS SUDARSO	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL.YOS SUDARSO	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JLN PELABUHAN	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JLN PELABUHAN	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000

KA BAG HUKUM	DPKA/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	JLN TUNA	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JLN TUNA	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JLN TUNA	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JLN YOS SUDARSO	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JLN YOS SUDARSO	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JLN YOS SUDARSO	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	SIS AL JUFRI	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
003	YOSSUDARSO	AG	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	YOSSUDARSO	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	BUBARA	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	CAKALANG	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	DSN II LABUHAN	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL BUBARA DSN III TAMBE	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL CAKALANG	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL CAKALANG	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL CAKALANG	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DSN I	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DSN II LABUHAN	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN	AA	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN I	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN I	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN II	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN II	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN III	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL SIS AL ALFRI	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL SIS AL JUFRI	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL SIS AL JUFRI	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL SIS AL JUFRI	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL SIS AL-JUFRI	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL SIS ALJUFRI	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL YOS SUDARSO	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL YOS SUDARSO	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL YOS SUDARSO DSN II	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL YOS SUDARSO DSN II	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL YOSSUDARSO	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL YOSSUDARSO	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL YOSSUDARSO	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000

KABAG HUKUM	DINASDADM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL.BUBARA	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL.CAKALANG	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.CAKALANG	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL.CAKALANG	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL.DUSUN	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL.YOS SUDARSO	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL.YOS SUDARSO	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL.YOS SUDARSO	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JLN BUBARA	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN BUBARA	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JLN CAKALANG	AB	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN CAKALANG	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN CAKALANG	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JLN YOS SUDARSO	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN YOS SUDARSO	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JLN YOS SUDARSO	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JLN YOSSUDARSO	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	YOS SUDARSO	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	YOS SUDARSO DSN II	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
004	YOS SUDARSO DUSUN II LABUHAN	AH	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
004	YOSSUDARSO	AF	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL BUBARA	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL BUBARA DSN III TAMBE	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DSN II	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DSN III BUBARA	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DSN III TAMBE	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN II	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JLN BUBARA	AD	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
006	BUBARA	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	BUBARA DSN III	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	BUBARA DSN IV POHEITADAA	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	BUBARA DUSUN IV POHEITADAA	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	DSN IV	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL BUBARA	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL BUBARA DSN III	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL BUBARA DSN IV	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL BUBARA DUSUN EMPAT POHEITA	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DSN III BUBARA	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DUSUN	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	DINASBADMK KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

006	JL DUSUN III	AE	A40	2,900	s/d	4,100		3,500
006	JL DUSUN IV	AE	A40	2,900	s/d	4,100		3,500
006	JL POHEITA	AE	A40	2,900	s/d	4,100		3,500
006	JL YOS SUDARSO	AE	A40	2,900	s/d	4,100		3,500
006	JL.DUSUN	AE	A40	2,900	s/d	4,100		3,500
006	JLN BUBARA	AA	A35	17,000	s/d	23,000		20,000
006	JLN BUBARA	AE	A40	2,900	s/d	4,100		3,500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROPINSI: 75-GORONTALO **KECAMATAN: 020-TILAMUTA**

KAB/KOTA: 01-BOALEMO **KELURAHAN: 17- LAHUMBO**

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL BARU	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DANTA	AK	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DESA	AK	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DSN II BOTUTOMIE	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DSN IV BUALO	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN IV BUALO	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL SETAPAK	AK	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL TRANS SULAESI	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TRANS SULAWESI	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL TRANS SULAWESI	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN DANTA	AK	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
002	BUALO	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	DSN IV	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	DSN IV BUALO	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DANTA	AH	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DSN BUALO	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DSN IV BUALO	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL SETAPAK	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL TRANS	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS SULAWESI	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL TRANS SULAWESI	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS SULAWESI	AH	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TRANS SULAWSI	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL.TRANS	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL SETAPAK	AH	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL SETAPAK	AI	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL TRANS	AH	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL TRANS SULAWESI	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TRANS SULAWESI	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL TRANS SULAWESI	AH	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL TRANS SULAWESI	AI	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL.SETAPAK	AI	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL.TRANS	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL BARU	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL BARU	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL BARU	AD	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA	AD	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DSN IV BUALO	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL SETAPAK	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL SETAPAK	AD	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL TRANS SULAWESI	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL TRANS SULAWESI	AD	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL.BARU	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL.BARU	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.BY PASS	AD	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL.BYPASS	AD	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL.TRANS	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
005	DSN IV	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL BARU	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL BARU	AK	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
005	JL BY PASS	AK	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
005	JL DESA	AK	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
005	JL SETAPAK	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL SETAPAK	AK	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
005	JL TRANS	AK	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
005	JL TRANS SULAWESI	AK	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
006	DESA LAHUMBO	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL BARU	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL BY PASS	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL BY PASS	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DESA	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DESA	AD	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DESA	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DSN III MANGGULIPA	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL LANGSAT	AD	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL LANGSAT	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL SETAPAK	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL TRANS SULAWESI	AD	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL.LANGSAT	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
006	TRANS	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DSN IV BUALO	AN	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL SETAPAK	AI	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL SETAPAK	AN	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL TRANS SULAWESI	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL TRANS SULAWESI	AI	A42	1,400	s/d	2,000	1,700

KABAG HUKUM	KABAG/KASUBAG TU KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

007	JL TRANS SULAWESI	AN	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL. TRANS	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL.DESA	AN	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL.SETAPAK	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
008	DSN IV BUTIO	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
008	JL DESA LAHUMBO	AI	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
008	JL SETAPAK	AI	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
008	JL SETAPAK	AN	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL TRANS	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
008	JL TRANS SULAWESI	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
009	JL DESA	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
009	JL DSN BUTIO	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
009	JL TRANS SULAWESI	AF	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
009	JL TRANS SULAWESI	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
010	JL DSN IV TILEMBA	AE	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
010	JL SETAPAK	AE	A42	1,400	s/d	2,000	1,700
010	JL SETAPAK	AJ	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
011	JL BARU	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
011	JL BARU	AL	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
011	JL BARU	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
011	JL BY PASS	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
011	JL DESA	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JL DESA	AL	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
011	JL DESA	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
011	JL DSN III	AL	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
011	JL DUSUN III MANGULIPA	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
011	JL LANGSAT	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JL LANGSAT	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
011	JL SETAPAK	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JL SETAPAK	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
011	JL TRANS SULAWESI	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JL TRANS SULAWESI	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
011	JL TRANS SULAWESI	AL	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
011	JL TRANS SULAWESI	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
011	JL. BY PASS	AM	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
011	JL.DESA	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JL.DESA	AL	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
011	JL.LANGSAT	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JL.LANGSAT	AL	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
011	TRANS	AA	A39	4,100	s/d	5,900	5,000

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	

012	JL BY PASS	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	JL LANGSAT	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	JL TRANS SULAWESI	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	JL TRANS SULAWESI	AD	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
012	JL TRANS SULAWESI	AN	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
012	JL.DESA	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	JL.TRANS	AN	A39	4,100	s/d	5,900	5,000
012	JLN LANGSAT	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	LANGSAT	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
012	TRANS	AC	A37	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DINASBADAM KANTOR	ASS	SEKDA	WADUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 030-DULUPI
KELURAHAN: 01- DULUPI

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DSN III SAMBATI	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DSN III SAMBATI	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN SAMBATI	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN SAMBATI	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL.DSN TIGA SAMBATI	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
002	DUSUN	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL BARITO	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DSN III SAMBATI	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DSN III SAMBATI	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DSN SAMBATI	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN SAMBATI	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN SAMBATI	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL.DSN SAMBATI	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	DSN LANGGE	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	DSN LANGGE	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DESA	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DESA DUSUN LANGE	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA DUSUN LANGE	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DSN LANGGE	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DSN LANGGE	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN LANGGE	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN LANGGE	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JLN DSN LANGGE	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JLN DSN LANGGE	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	DSN LANGGE	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
004	DSN LANGGE	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DESA DSN LANGE	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DESA DUSUN LANGE	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA DUSUN LANGE	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN LANGGE	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JLN DSN LANGGE	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DESA DUSUN JAMBURA	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DESA DUSUN JAMBURA	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DSN JAMBURA	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

005	JL DUSUN JAMBURA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL DUSUN JAMBURA	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN JAMBURA	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL TRANS SULAWESI	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	DSN JAMBURA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DSN I JAMBURA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DSN JAMBURA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DUSUN JAMBURA	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DUSUN JAMBURA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL KEBUN	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL SISWA DUSUN JAMBURA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL SISWA DUSUN JAMBURA	AD	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL TRANS DUSUN JAMBURA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL DUSUN TERATAI	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL DUSUN TERATAI	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL SISWA DUSUN JAMBURA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL SISWA DUSUN TERATAI	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL SISWA DUSUN TERATAI	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
007	TERATAI	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL DESA DUSUN HUATA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL DUSUN HUATA	AA	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL DUSUN HUATA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
009	JL DESA DUSUN HUATA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
009	JL DESA DUSUN HUATA	AJ	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL DESA DUSUN HUATA	AL	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL DUSUN HUATA	AB	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
009	JL DUSUN HUATA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
009	JL DUSUN HUATA	AL	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL DUSUN TERATAI	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
010	JL DUSUN TERATAI	AI	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
010	JL DUSUN TERATAI	AJ	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL PANTAI	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
010	JL PANTAI DUSUN TERATAI	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
010	JL PANTAI DUSUN TERATAI	AH	A38	5,900	s/d	8,400	7,150
010	JL PANTAI DUSUN TERATAI	AI	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
010	JL PANTAI DUSUN TERATAI	AJ	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL SISWA DSN TERATAI	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
010	JL SISWA DUSUN TERATAI	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
010	JL SISWA DUSUN TERATAI	AJ	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL TRANS DUSUN TENGAH	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

010	JL TRANS DUSUN TERATAI	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
011	JL DSN I JUMBARA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
011	JL DUSUN JAMBURA	AF	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
011	JL DUSUN RAMBUTAN	AF	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
011	JL PANTAI	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
011	JL PANTAI DUSUN JAMBURA	AF	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
011	*JL PANTAI DUSUN JAMBURA*	*AG*	*A36*	*12,000*	*s/d*	*17,000*	*14,000*
011	JL TRANS DUSUN JAMBURA	AC	A35	17,000	s/d	23,000	20,000
011	JL TRANS DUSUN JAMBURA	AE	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
012	DSN BATU POTONG	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
012	JL DUSUN BATU POTONG	AF	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
012	JL DUSUN BATU POTONG	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
012	JL PANTAI	AF	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
012	JL PANTAI	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
012	*JL PANTAI DUSUN BATU POTONG*	*AF*	*A40*	*2,900*	*s/d*	*4,100*	*3,500*
012	JL PANTAI DUSUN BATU POTONG	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
013	DSN BATU POTONG	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
013	JL DUSUN BATU POTONG	AG	A36	12,000	s/d	17,000	14,000
013	JL DUSUN BATU POTONG	AJ	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
013	JL DUSUN BATU POTONG	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
013	JL DUSUN BATU POTONG	AL	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
013	JL HUWATA	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
013	*JL PANTAI*	*AG*	*A36*	*12,000*	*s/d*	*17,000*	*14,000*
013	JL PANTAI	AJ	A40	2,900	s/d	4,100	3,500
013	JL PANTAI	AK	A37	8,400	s/d	12,000	10,000
013	JL PANTAI DUSUN BATU POTONG	AJ	A40	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 030-DULUPI
KELURAHAN: 02- PANGI

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DUSUN III	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN III	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN III	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN III	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL.DSN III	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	DSN MOOTILANGO	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL DUSUN I	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN I	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN I	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DUSUN II	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DUSUN II	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN II	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN II	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN I	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN I	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN I	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN I	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DSN III	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DSN III	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN I	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN I	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DUSUN III	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN III	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DUSUN III	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL TRANS SULAWESI	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL. TRANS SULAWESI	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL.TRANS	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 030-DULUPI
KELURAHAN: 03- TANGGA JAYA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DESA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN II	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN IV	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL KEBUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL KEBUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL KEBUN	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	DSN II TOHUPO	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	HIYALIYO DAA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN I	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN II	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN II	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL KEBUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL KEBUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL.DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JLN KEBUN DULU UNTI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	BOTULAYAHU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DSN III BOTU LAYAHU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DESA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DESA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DSN III BOTULAYAHU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL KEBUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL KEBUN	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL.KEBUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JLN PERTANIAN	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JLN TAANI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JLN TANI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DSN III BOTU LAYAHU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DUSUN III	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DESA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450

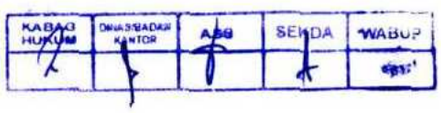

004	JL DESA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL KEBUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JLN TANI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	KEBUN BOTULAYAHU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	PEM.TRANSMIGRASI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	TANI BOTULAYAHU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	BOTU BULAWAHU	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	BOTUBULAWAHU	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	*BOTUHULA*	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	BOTULAYAHU	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	DSN BOTULAYAHU	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	DSN III BOTU LAYAHU	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DESA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DESA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DSN BOTUBULAWAHU	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DSN III BOTULAYAHU	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN III	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL KEBUN	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	*JL.DSN III*	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JLN TANI	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	DSN III BOTU LAYAHU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL DESA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DUSUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL KEBUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL DESA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DSN I HULAO	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL DUSUN	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	*JL KEBUN*	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL KEBUN	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL.DESA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL.DUSUN	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL.TOHUPO	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JLN TANI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DUSUN	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DUSUN IV	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

008	JL DUSUN IV	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DUSUN V	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL KEBUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL KEBUN	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL KEBUN UPO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL UPO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DESA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
009	JL DESA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL KEBUN	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 030-DULUPI
KELURAHAN: 04- POLOHUNGO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN I POTIYA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DUSN I	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DUSUN I	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN POTIYA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN I	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN I	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN I	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN I	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL.TRANS	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	DSN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	DSN II	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	DSN II PULUBAALE	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN II	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN II	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN II	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL TANI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL TANI DSN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JLN DUSUN II PULUBAALE	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JLN DUSUN II PULUBAALE	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JLN TANI DUSUN II PULUBAALE	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JLN TRANS SULAWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	DSN III PANCURAN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DUSUN III	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN III	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN III	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL TRANS SULAWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL. DUSUN III	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL.TANI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DSN IV	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DSN IV	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	DSN VI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000

KABAG HUKUM	KABAN/BADAN KANTOR	KA	SEKDA	WABUP

004	JL DSN IV BOTUBULAWAHU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DSN IV BOTUBULAWAHU	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DSN IV BOTUBULAWAHU	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DSN IVBOTUBULAWAHU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DSN POTIYA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DSN VI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN VI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN VI	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN VI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN VI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL TRANS SULAWESI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL.DSN IV	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL.DSN IV	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	DUSUN IV	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	DUSUN IV	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL BIAHI DUSUN IV	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DSN IV	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DSN IV BIAHI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DSN IV DINGGOTA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DUSUN IV	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN IV	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DUSUN V	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN V	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN V	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DUSUN VI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL TANI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL TANI BIAHI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL TRANS	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL TRANS DSN IV DINGGOTA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL TRANS SULAWESI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL TRANS SULAWESI DSN IV	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL.TANI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL.TRANS	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL.TRANS	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JLN TARNS	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JLN TRANS	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	TRANS SULAWESI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	TRANS SULAWESI DSN IV	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	DUSUN V	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

006	DUSUN V	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL ASKES	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DSN PONGAWAA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DSN V	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DUSUN IV	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN IV	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DUSUN V	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DUSUN V PONGAWAA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL PONGAWAA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL. DUSUN V	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JLN DUSUN V	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	DUSUN IV	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DUSUN IV	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DUSUN IV	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL DUSUN V	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN V	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DUSUN V	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL POLOHUNGO	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL TANI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL TRANS	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL TRANS SULAWESI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL TRANS SULAWESI	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL.TRANS	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL.TRANS	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DSN IV BOTUBULAWAHU	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL DSN VI	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL DUSUN III	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL DUSUN IV	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL DUSUN VI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL DUSUN VI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL DUSUN VI	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL TRANS SULAWESI	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL.DSN V	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL DSN III PANCURAN	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL DUSUN III	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
009	JL DUSUN III	AI	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JL DUSUN III	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL DUSUN VI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
009	JL.TANI	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL.TANI DSN III	AI	089	4,100	s/d	5,900	5,000

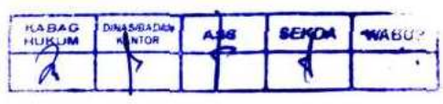

010	DSN II PULUBAALE	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	DUSUN II	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL ALIH TRANS	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL DSN II	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL DUSUN II	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
010	JL DUSUN II	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
010	JL DUSUN II	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL TANI	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL TANI DSN II	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL.DSN II	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL.TRANS	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JLN TANI DUSUN II PULUBAALE	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
010	JLN TANI DUSUN II PULUBAALE	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JLN TRANS SULAWESI	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
011	DSN I POTIYA	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
011	DUSN I	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
011	DUSUN I	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JL DSN I	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JL DUSUN I	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JL DUSUN I	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
011	JL DUSUN I	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
011	JL DUSUN II	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
011	JL.DSN I	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
011	JL.DSN I	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	UNASRIADI, SH. KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 030-DULUPI
KELURAHAN: 05- KOTA RAJA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DESA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DESA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DESA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DESA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL RAJA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DESA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DSN IV	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DESA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DESA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL. DESA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DESA	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DESA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DESA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL DESA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL DESA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DESA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL DESA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DESA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DESA	AH	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DESA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
009	JL DESA	AH	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	DSN IV	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL DESA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL DESA	AH	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JL DESA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JL.DESA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
010	JL.DESA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KA.BAG. HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 030-DULUPI
KELURAHAN: 06- TABONGO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DUSUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN V	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN III	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN III	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN III	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL RAYA DULUPI	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DSN VI PARIA	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN II	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL.DSN VI	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DUSUN	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DSN II WAGA	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN II	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN II WAGA	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DSN II	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DSN II WAGA	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DUSUN II	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DUSUN II	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL DSN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL DSN PONGAWAA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL DSN VI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL DUSUN II	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DUSUN II WAGA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DSN II WAGA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL DSN II WAGA	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL DUSUN II	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN II	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DUSUN II WAGA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN II WAGA	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DUSUN WAGA	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450

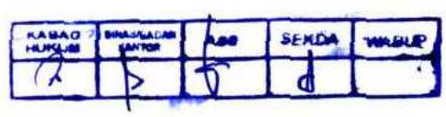

008	DUSUN	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DSN II	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DSN II WAGA	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DUSUN	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DUSUN II	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DUSUN II	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DUSUN II WAGA	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DUSUN II WAGA	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DSN LABUHAN TIMUR	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL DSN LABUHAN TIMUR	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JL DUSUN	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN II	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN IV	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN IV	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL DUSUN IV	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JL LABUHAN TIMUR	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL LABUHAN TIMUR	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
010	JL DSN I	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL DSN II	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
010	JL DSN KEMIRI	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
010	JL DSN KEMIRI	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
010	JL DUSUN	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
010	JL DUSUN I	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
010	JL DUSUN I	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
010	JL DUSUN I	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 030-DULUPI
KELURAHAN: 07- TANAH PUTIH

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN II POHEITA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN II POHEITA	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN II POHEITA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL TANI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL TANI DUSUN II POHEITA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN DSN 2 POHEITA	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DSN I PALOPO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN II POHEITA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL TANI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL TANI DSN II POHEITA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL TANI DUSUN II	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL TANI DUSUN II POHEITA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN III	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN III POTIA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL TANI DSN II POHEITA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL TANI DUSUN JJJ	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL TANI DUSUN III	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TANI DUSUN III POTIYA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL TRANS DUSUN III	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL TRANS DUSUN III	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TRANS SULAWESI	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JLN DSN 3 POTIYA	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DESA	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DSN II POHEITA	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN II POHEITA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN II POHEITA	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DINASBADA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL DUSUN II POHEITA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN II POHEITA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN II POHEITA	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN II POHEITA	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL TRANS DUSUN II POHEITA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL TRANS DUSUN II POHEITA	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL TRANS SULAWESI	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL.TRANS SULAWESI	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JLN DSN 2 POHEITA	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	DSN 1 PALOPO	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	DSN I PALOPO	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DESA	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL DSN I PALOPO	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL DUSUN I PALOPO	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN I PALOPO	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN I PALOPO	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL DUSUN I PALOPO	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN LASINAU	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN PALOPO	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL TRANS DUSUN I PALOPO	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL TRANS SULAWESI	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL TRANS SULAWESI DUSUN	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL TRANS SULAWESI DUSUN	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL.DSN I PALOPO	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JLN DSN 1 PALOPO	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JLN DSN 1 PALOPO	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JLN TRANS SULAWESI	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JLN TRANS SULAWESI	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JLN TRANS SULAWESI	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL DUSUN	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DUSUN II POHEITA	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL TRANS DSN POHEITA	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL TRANS DUSUN II POHEITA	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL TRANS DUSUN II POHEITA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL TRANS SULAWESI	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL. TRANS SULAWESI	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JLN DSN 2 POHEITA	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JLN DSN 3 POTIYA	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JLN TRANS SULAWESI	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000

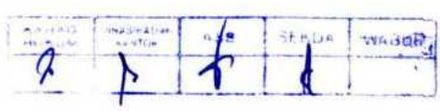

006	JLTRANS SULAWESI	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL DUSUN	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL DUSUN I	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL DUSUN I PALOPO	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL DUSUN I PALOPO	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL.DSN I PALOPO	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL.DUSUN I PALOPO	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JLN DESA	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JLN DSN 1 PALOPO	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JLN DSN 1 PALOPO	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JLN DUSUN 1 PALOPO	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DSN III POTIYA	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL DUSUN III	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DUSUN III POTIA	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
008	JL DUSUN III POTIA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DUSUN LIHAWA	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
008	JL TANI	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL TANI DSN III POTIA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL TANI DUSUN III POTIA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL TRANS SULAWESI	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
008	JL TRANS SULAWESI	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
008	JL TRANS SULAWESI	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL. TANI	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JLN DSN 3 POTIYA	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
008	JLN DSN 3 POTIYA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	TANI DSN 3 POTIA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	TANI DUSUN 3 POTIA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN III POTIA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL TANI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL TANI	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL TANI DSN III POTIYA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL TANI DU SUN III	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL TANI DU SUN III	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
009	JL TANI DU SUN III	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL TANI DU SUN III POTIA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL TANI DU SUN III P OTIA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL TRANS DUSUN III	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
009	JL TRANS DUSUN III	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL TRANS DUSUN III POTIA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	UMUM & RT DAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

009	JL TRANS SULAWESI	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL.DSN III POTIYA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL.DUSUN III POTIYA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 030-DULUPI
KELURAHAN: 08- TANGGA BARITO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DSN X IITO	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN DULALOWO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN V	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN V	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN X IITO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN X IITO	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	DSN XI HUTADELITA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	DSN XI HUTADELITA	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL BARITO DSN X	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DESN XI HUTADELITA	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DSN HUTADELITA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DSN HUTADELITA	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DSN X IITO	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DSN XI	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DSN XI HUTADELITA	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN V	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN V	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN X IITO	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN XI	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	DSN IX LIMBATO	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DSN LIMBATO	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DUSUN V	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN V	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DUSUN VII	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN VII	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL BARITO DSN X	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DSN LIMBATO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DSN VIII BONGODATA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DUSUN VII	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DUSUN VII	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	TANGGA BARITO DSN VIII	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DSN X IITO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
005	JL DUSUN V	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
005	JL DUSUN VI	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
005	JL DUSUN VI	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

006	JL BARITO DSN VII	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
006	JL DSN VII DAMAHU	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
006	JL DUSUN VI	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DUSUN VI	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL BARITO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL BARITO	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL BARITO DSN V	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL DSN V LASONGGE	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL DSN V LASONGGE	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL DSN V LASONGGE	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL DUSUN IV	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL DUSUN IV	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL DUSUN IV	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL DUSUN IV	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN VI	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
008	JL BARITO	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
008	JL DSN V LASONGGE	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
008	JL DSN V LASONGGE	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL DUSUN IV	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DUSUN IV	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
008	JL DUSUN IV	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	DSN IV HULAPADUDULAA	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	DUSUN IV KM24	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	JL DSN HULAPA	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	JL DSN IV HULAPADUDULAA	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	JL DUSUN II	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JL DUSUN III	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	JL DUSUN III	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JL.DSN III	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	TANGGA BARITO DSN IV	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
010	JL DSN IV	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
010	JL DUSUN III	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
010	JL DUSUN III	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JL BARITO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
011	JL BARITO DSN I	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
011	JL BARITO DSN III	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
011	JL BARITO KM 23	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
011	JL DSN III HUTAMELA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
011	JL DUSUN II	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
011	JL DUSUN II	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

011	JL. BARITO KM 23	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
011	JL. TANGGA BARITO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
012	JL BARITO	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
012	JL BARITO DSN III	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
012	JL DSN III HUTAMELA	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
012	JL DUSUN II	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
012	JL DUSUN II	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
012	JL DUSUN III	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
012	JL. BARITO	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
013	JL DSN I BUBOTULO	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
013	JL DSN I BUBOTULO	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
013	JL DUSUN I	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
013	JL DUSUN I	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
014	JL BARITO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
014	JL DSN I BUBOTULO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
014	JL DSN I BUBOTULO	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
014	JL DUSUN I	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
014	JL DUSUN I	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
014	JL. DUSUN I	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
014	JL. DUSUN I	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 01- REJONEGORO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)	KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN ILOHELUMA	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
001	JL DESA	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
001	JL DESA	AB	089	4,100 s/d 5,900	5,000
001	JL DSN ILOHELUMA	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
001	JL DSN ILOHELUMA	AB	089	4,100 s/d 5,900	5,000
001	JL DSN ILOHELUMA	AC	087	8,400 s/d 12,000	10,000
001	JL DUSUN	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
001	JL DUSUN	AB	089	4,100 s/d 5,900	5,000
001	JL DUSUN	AC	087	8,400 s/d 12,000	10,000
001	JL DUSUN ILOHELUMA	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
001	JL KEBUN	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
001	JL SEMANGKA	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
001	JL SEMANGKA	AB	089	4,100 s/d 5,900	5,000
001	JL TRANS SULAWESI	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
001	JL.DSN ILOHELUMA	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
001	JL.DUSUN	AB	089	4,100 s/d 5,900	5,000
001	JLN DSN ILOHELULA	AC	087	8,400 s/d 12,000	10,000
001	JLN DSN ILOHELUMA	AB	089	4,100 s/d 5,900	5,000
001	JLN DSN ILOHELUMA	AC	087	8,400 s/d 12,000	10,000
002	JL DESA	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
002	JL DESA	AB	089	4,100 s/d 5,900	5,000
002	JL DSN ILOHELUMA	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
002	JL DSN ILOHELUMA	AB	089	4,100 s/d 5,900	5,000
002	JL DSN ILOHELUMA	AD	086	12,000 s/d 17,000	14,000
002	JL DUSUN	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
002	JL DUSUN	AB	089	4,100 s/d 5,900	5,000
002	JL DUSUN	AC	087	8,400 s/d 12,000	10,000
002	JL DUSUN	AD	086	12,000 s/d 17,000	14,000
002	JL DUSUN ILOHELUMA	AB	089	4,100 s/d 5,900	5,000
002	JL KEBUN	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
002	JL KEBUN	AB	089	4,100 s/d 5,900	5,000
002	JL SIDOMULYO SELATAN	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
002	JL.DUSUN	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500
002	JL.DUSUN	AB	089	4,100 s/d 5,900	5,000
002	JL.KEBUN	AA	090	2,900 s/d 4,100	3,500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	DSN ILOHELUMA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DESA REJONEGORO	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DSN BULONGGALA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DSN ILOHELUMA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DSN ILOHELUMA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DSN IOLHELUMA	AD	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN	AD	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN ILOHELUMA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL KEBUN	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL KEBUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL KEBUN	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL LORONG	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL SEMANGKA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL. TRANS SULAWESI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JLN DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JLN DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	DESA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	DSN OLIDAY	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	DUSUN	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DESA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DESA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DSN BULONGGALO	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DSN OLIDAY	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DSN OLIDAY	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL DSN OLIDEI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL DUSUN OLIDAY	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN OLIDAY	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL DUSUN OLIDEI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN OLIDEI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN OLIDEI	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL KEBUN	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL TRANS	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL TRANS SULAWESI	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000

KABAG HUMAS	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL.DESA	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	JLN DESA	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
004	JLN TRANS	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	JLN TRANS SULAWESIH	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	REJONEGORO	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	TRANS SULAWESIH	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	DSN BULANGGALA	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	DSN BULONGGALA	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	DSN BULONGGALA	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	DSN. BULONGGALA	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	DUSUN	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	JL DESA	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	JL DESA	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL DSN BULONGGALA	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	JL DSN BULONGGALA	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL DSN BULONGGALA	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
005	JL DUSUN	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	JL DUSUN	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL DUSUN BULONGGALA	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	JL DUSUN BULONGGALA	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL KEBUN	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	JL KEBUN	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL LORONG	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL LORONG SEMANGKA	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL SEMANGKA	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL TRANS	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL TRANS	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
005	JL TRANS SULAWESI	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
005	JL. LORONG 8	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL. LORONG SEMANGKA	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	JL. TRANS SULAWESI	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
005	JL.DESA	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL.DUSUN	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	JL.KEBUN	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
005	JL.TRANS SULAWESI	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
005	JLN DESA	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JLN DSN BULONGGALA	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	JLN KEBUN	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	KEBUN	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

005	TRAN SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	TRANS SULAWESIII	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	DSN BULONGGALA	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	DUSUN MUSYAWARAH	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL LORONG 8	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DSN BATU MERAH	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DSN BULONGGALA	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL DSN BULONGGALA	AI	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DSN BULONGGALA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN BULONGGALA	AI	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DUSUN BULONGGALA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN BULONGGALA	AK	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL KEBUN	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL KEBUN	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL KH ADAM ZAKARIA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL LORONG	AI	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL LORONG	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL LORONG 8	AI	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL LORONG ISABELA	AI	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL LORONG ISABELA	AK	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL TRANS	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL TRANS	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL TRANS SULAWESI	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL TRANS SULAWESI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL. BUBAA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL. LORONG 9	AK	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL. LORONG ISABELA	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL. LORONG ISABELA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL. LORONG ISABELA	AK	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL. TRANS SULAWESI	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL.BUBAA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL.LORONG	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL.LRG RAJAWALI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL.TRANS	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JLN DUSUN	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	LORONG	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	DUSUN OLIDAY	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL DESA	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL DSN OLIDAY	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

007	JL DSN OLIDAY	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DSN OLIDAY	AK	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL DSN OLIDAY	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL DSN OLIDEY	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL DUSUN	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL DUSUN	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN	AK	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL DUSUN	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL DUSUN OLIDAY	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL DUSUN OLIDAY	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN OLIDAY	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL DUSUN OLIDEI	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL DUSUN OLIDEI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN OLIDEI	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL DUSUN OLIDEY	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL KEBUN	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL KEBUN	AK	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL TRANS	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL TRANS	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL TRANS SULAWESI	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL TRANS SULAWESI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL TRANS SULAWESI	AK	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL TRANS SULAWESI	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL. LORONG 9	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL.DUSUN OLIDAY	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL.LORONG	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL.TRANS SULAWESI	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JLN DUSUN	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JLN LORONG 9	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JLN LORONG 9	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JLN TRAN SULAWESIH	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	LORONG	AL	085	17,000	s/d	23,000	20,000

KABAG HUKUM	DWP SEKJEN/DIRJEN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 02- SOSIAL

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	BATAS DESA	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	DSN OLOA	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	DSN OLOA	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
001	IRIGASI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL LORONG	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL LORONG	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
001	JL LORONG IV	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL LORONG VI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL LORONG VI	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
001	JL LORONG VII	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL LRG VII	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL SAWAH	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TRANS	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TRANS SULAWESI	AD	083	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL.LRG VI	AD	083	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JLN LORONG VI	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
001	LORNG VII	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	LORON VII	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	LORONG VII	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	LORONG VI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	LORONG VI	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
001	LORONG VI JLN SAWAH	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	LORONG VII	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	LORONGVI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	SALURAN IRIGASI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	TRANS	AD	083	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL DSN	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DSN BULONGGALA	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL LORONG	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL LORONG	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL LORONG	AD	083	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL LRG VIII	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL LRG VIII DUSUN ULANGO	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

002	JL SAWAH	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS SULAWESI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS SULAWESI	AD	083	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL. BUBAA	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL.DUSUN	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JLN LRG VIII	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	TRANS SULAWESI	AD	083	31,000	s/d	41,000	36,000
003	BUBAA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DESA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DSN LINGGOBOTO	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL BUBAA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DESA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DSN LINGGOBOTO	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN	AD	083	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JL KEBUN	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL KEBUN	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL LORONG	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL LORONG	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL LORONG LINGGOBOTO	AD	083	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JL LORONG LINGGOBOTO	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL LORONG LINGGOBOTO	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL LORONG LINGGOBOTO	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL LORONG LINGGOBOTO	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL LORONG LINGOBOTO	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL LORONG VIII	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL PAGUYAMAN PANTAI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL PRM WYN GRYA LESTARI	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TRANS SULAWESI	AD	083	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JL TRANS SULAWESI	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL. BUBAA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL.LRG.LINGGOBOTO	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JLN	AD	083	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JLN DESA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	KEBUN	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	LORONG LINGGOBOTO	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	LORONG LINGGOBOTO	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	LORONG LINGGOBOTO	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	LORONG VII	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	LORONG VIII	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000

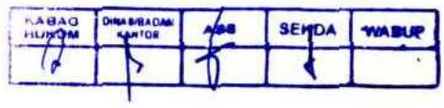

003	LORONG VIII	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	LORONG VIII	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	TRANS SULAWESIH	AD	083	31,000	s/d	41,000	36,000
003	VII	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	LORONG VI	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	DESA SOSIAL	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DSN LINGGOBOTO	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DSN MOTU	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN MOTU	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL KEBUN	AD	083	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL KEBUN	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL LORONG	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL LORONG	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL LORONG	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL LORONG	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL LORONG SOSIAL	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL LORONG VI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL LORONG VI	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL LORONG VI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL LORONG VII	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL MOTU	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL MOTU	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL MOTU	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL MOTU	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL SAWAH	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL TANI DSN MOTU	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL TRANS SULAWESI	AD	083	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL TRANS SULAWESI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL TRANS SULAWESI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL.LORONG	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL.LORONG VI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.PAG.PANTAI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN LORONG VI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN MOTU	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	LORONG 6	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	LORONG 6	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	LORONG 6	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	LORONG VI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	LORONG VI	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000

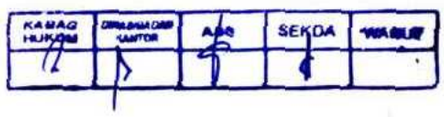

004	LORONG VI	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	LORONG6	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	PAG.PANTA	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	PAG.PANTAI	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	PAG.PANTAI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	PAG.PANTAI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	PAGPANTAI	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	PENGAIRAN DSN MOTU	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 003-BATU KRAMAT

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN RUMBIA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DIYAMBU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN DIAMBU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN RUMBIA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN RUMBIA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL PT PG	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL RAJAWALI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL TRANS SULAWESI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL TRANS WONOSARI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL.DIYAMBU	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL.TRANS WONOSARI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	TRANS WONOSARI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	TRANS WONOSARI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DSN RUMBIA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DIYAMBU	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN RUMBIA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN RUMBIA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN RUMBIA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	TRANS WONOSARI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DSN BINTALAHE	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DSN RUMBIA	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN BINTALAHE	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN BINTALAHE	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN BINTALAHE	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN CENDRAWASIH	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN CENDRAWASIH	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL RAJAWALI	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TRANS SULAWESI	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TRANS WONOSARI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS WONOSARI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL TRANS WONOSARI	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL TRANS WONOSARI	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL.TANI	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	JL.TRANS WONOSARI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JLN DUDUN BINTALAHE	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JLN DUSUN BILNTALAHE	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JLN DUSUN BINTALAHE	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	PT PG GORONTALO	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	TRANS WONOSARI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	TRANS WONOSARI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	TRANS WONOSARI	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	TRANS WONOSARI	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	DSN BINTALAHE	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN BINTALAHE	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN BINTALAHE	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN CENDERAWASIH	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN CENDRAWASIH	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN CENDRAWASIH	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL TAPILA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL TRANS WONOSARI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL. TANI TAPILA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL. TAPILA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL.DUSUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	TRANS WONOSARI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	TRANS WONOSARI	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	TRANS WONOSARI	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 004-TANGKOBU

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN TAIPANGI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	DSN TAIPANGI	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	DSN TAIPNGI	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL DSN	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DSN TAIPANGI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DSN TAIPANGI	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL DUSUN	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL DUSUN TAIPANGI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN TAIPANGI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN TAIPANGI	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL KEBUN	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL KEBUN	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL KEBUN	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
001	JL KEBUN DSN MOOTINELO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL TRANS	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
001	JL TRANS SULAWESI	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL TRANS SULAWESI	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL TRANS SULAWESI	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
001	JL.TRANS SULAWESI	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JLN DUSUN	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	DSN TAIPANGI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DESA TANGKOBU	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DSN	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DSN TAIPANGI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DSN TAIPNGI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DUSUN TAIPANGI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN TAIPANGI	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DUSUN TAIPANGI	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN TARUNA	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL KEBUN	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL KEBUN	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

002	JL KEBUN DUSUN TAIPANGI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL RABAT BETON	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL RABAT BETON	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL TRANS SULAWESI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TRANS SULAWESI	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL TRANS SULAWESI	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	RABAT BETON DSN TARUNA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	TRANS SULAWESI	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	DSN KEMIRI	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	DUSUN REMAJA	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	DUSUN TARUNA	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DSN KEMIRI	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DSN REMAJA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DSN REMAJA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DSN REMAJA	AL	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DUSUN	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN REMAJA	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN REMAJA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN REMAJA	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DUSUN REMAJA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN REMAJA	AL	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL KEBUN	AL	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL KEBUN DUSUN REMAJA	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL LORONG	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL LORONG DUSUN REMAJA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS DUSUN REMAJA	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TRANS DUSUN REMAJA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TRANS SULAWESI	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TRANS SULAWESI	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TRANS SULAWESI	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS SULAWESI	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL TRANS SULAWESI	AL	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL.TRANS SULAWESI	AL	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	TRANS SULAWESI	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	TRANS SULAWESI	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	TRANS SULAWESI	AF	084	23,000	s/d	31,000	27,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	DSN KEMIRI	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	DUSUN KAMIRI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	DUSUN KEMIRI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DSN KAMIRI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN	AI	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN KAMIRI	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN KEMIRI	AI	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN KEMIRI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN KEMIRI	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN REMAJA	AI	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL KEBUN	AI	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL KEBUN DUSUN KEMIRI	AI	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL KEBUN DUSUN KEMIRI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL KEBUN DUSUN KEMIRI	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL TRANS SULAWESI	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL TRANS SULAWESI	AI	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL TRANS SULAWESI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL TRANS SULAWESI	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL. DUSUN KEMIRI	AI	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL.DSN KEMIRI	AI	086	12,000	s/d	17,000	14,000

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 005-MOLOMBULAHE

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN GOMPASE	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	DSN GOMPASE	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
001	GOMPASE INDUK	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DSN GOMPASE	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL DUSUN	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN GOMPASE	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN GOMPASE	AD	084	23,000	s/d	31,000	27,000
001	JL DUSUN GOMPASE BARAT	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN GOMPASE INDUK	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL LORONG IV	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL LORONG MOITO	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL MOITO	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL SAWAH	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL SAWAH DSN GOMPASE	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TRANS SULAWESI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
001	JL.MOITO	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN DSN GOMPASE	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN GOMPASE	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN LORONG IV	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN MOITO DUSUN GOMPASE	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN TRANS	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
001	TRANS	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
002	DSN GOMPASE	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	DSN GOMPASE TIMUR	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	DUSUN DUHI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	DUSUN DUHI	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL DSN GOMPASE	AD	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL DSN GOMPASE	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL DUSUN	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN GOMPASE	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN GOMPASE	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL DUSUN GOMPASE	AD	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL DUSUN GOMPASE	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL DUSUN GOMPASE TIMUR	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000

BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

002	JL DUSUN GOMPASE TIMUR	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL DUSUN SOMPASE	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL GOMPASE TIMUR	AD	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL LORONG V	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL SAWAH	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS SULAWESI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS SULAWESI	AD	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL. DUSUN DUHI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL. GOMPASE DSN DUHI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL. SETAPAK	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL. SETAPAK	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL. TRANS SULAWESI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL. TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
002	JL.LRG IV	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JLN DUSUN DUHI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JLN GOMPASE	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JLN GOMPASE DUSUN DUHI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JLN GOMPASE LORONG V	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JLN LORONG V	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JLN LORONG V DUSUN DUHI	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	LR IV DSN DUHI	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	TRANS	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DSN GOMPASE	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DSN MONAWA	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DUSUN MENAWAR	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN HUWALA	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN HUWALA	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DSN MANAWAR	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN HULAWA	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DUSUN MANAWA	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN MANAWA	AB	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DUSUN MANAWA	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DUSUN MANAWA	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JL DUSUN MANAWAR	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN MENAWAR	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN MERPATI	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DUSUN MONAWA	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL LINGKUNGAN V	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL LORONG	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000

KA.BAG HUKUM	DRA.WADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	JL LORONG IV	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL LORONG V	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL LORONG V	AC	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL LORONG VI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL TRANS SULAWESI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL TRANS SULAWESI	AB	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JL. LORONG VI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL. TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JL.DSN MENAWAR	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL.DUSUN MANAWA	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL.LRG IV	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JLN DUSUN MENAWAR	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JLN GOMPASE	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JLN LORONG VI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JLN TRANS	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JLN TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
003	JLN.TRANS	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
003	LRG.DUSUN	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JALAN LORONG VI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DESA MOLOMBULAHE	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL DSN GOMPASE TENGAH	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DSN GOPASE TENGAH	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DSN MELATI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DSN MELATI	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN GOMPASE	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN HULAWA	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN HULAWA	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN HULAWA	AJ	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN MANAWA	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN MANAWA	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN MANAWA	AJ	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN MANAWA	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN MANAWA	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN MANAWAR	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN MELATI	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN MENAWAR	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL DUSUN MENAWAR	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN MENAWAR	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN MONAWA	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL DUSUN MONAWA	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL LORONG V	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL LORONG V	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL LORONG V	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL LORONG VI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL LORONG VI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL LORONG VI	AJ	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL LORONG VI DSN MELATI	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL LORONG VI DSN MELATI	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL LORONG VI DSN MELATI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL LORONG X	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL SETAPAK	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL SETAPAK GOMPASE	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL. LORONG VI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL. LORONG VI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.DSN MANAWA	AJ	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL.DSN MUSYAWARAH	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL.LORONG VI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JL.LRG VI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.TRANS SULAWESI	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLLORONG VI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
004	JLN DUSUN MENAWAR	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN DUSUN MENAWAR	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN LORONG	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JLN LORONG V	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JLN LORONG V	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JLN LORONG V	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN LORONG V DUSUN HUWALA	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JLN LORONG V DUSUN HUWALA	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN LORONG V DUSUN	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JLN LORONG VI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN LORONG VI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN LORONG VI	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JLN.LRG V	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	LG.VI DSN MELATI	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	LORONG V DSN HUWALA	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	LORONG VI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
		AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DIKSARGAN KANTOR	ASS	SEKDA	WA

004	LORONG VI	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	LR VI DSN MELATI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	LR.VI DSN MELATI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	LRG VI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	LRG VI DSN MELATI	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	DSN GOMPASE	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
005	DSN GOMPASE	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	DSN GOMPASE TIMUR	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
005	DUSUN GOMPASE TIMUR	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL DSN GOMPASE	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DSN GOMPASE	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DSN GOMPASE TENGAH	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DSN GOPASE TENGAH	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN GOMPASE	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DUSUN GOMPASE	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DUSUN GOMPASE	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DUSUN GOMPASE	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN GOMPASE TENGAH	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DUSUN GOMPASE TIMUR	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL DUSUN GOMPASE TIMUR	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL LORONG IV	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL LORONG IV	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL LORONG V	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL LORONG V	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL TRANS	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL TRANS SULAWESI	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL TRANS SULAWESI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL TRANS SULAWESI	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL.	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL. DUSUN DUHI	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL. DUSUN GOMPASE	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL. LORONG V	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL. LORONG VI	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL. TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JL.TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JLN DSN DUHI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JLN DUSUN GOMPASE	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JLN GOMPASE	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JLN LORONG IV	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

005	JLN LORONG V	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
005	JLN LORONG V	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JLN LORONG V	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JLN LORONG V	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JLN TRANS	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
005	MOLOMBULAHE	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
006	DSN GOMPASE	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	DSN GOMPASE	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	DSN GOMPASE INDUK	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DUSUN GOMPASE	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DSN GOMPASE	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DSN GOMPASE BARAT	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DSN GOMPASE INDUK	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
006	JL DSN GOMPASE INDUK	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DUSUN GOMPASE	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL DUSUN GOMPASE	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DUSUN GOMPASE BARAT	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
006	JL DUSUN GOMPASE BARAT	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL DUSUN GOMPASE BARAT	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DUSUN GOMPASE INDUK	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
006	JL GOMPASE	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
006	JL GOMPASE	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL LORONG	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
006	JL LORONG BOUNGO	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL LORONG GOMPASE	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JL LORONG IV	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL LORONG IV	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
006	JL TRANS SULAWESI	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL. TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
006	JL.DSN GOMPASE	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL.TRANS SULAWESI	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
006	JLN DSN GOMPASE	AE	083	31,000	s/d	41,000	36,000
006	JLN DSN GOMPASE	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
006	JLN DSN GOMPASE	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JLN DUSUN	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JLN DUSUN GOMPASE BARAT	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JLN.DUSUN	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150

KABAG HUKUM	DIVISI/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROPINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 06- WONGGAHU

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN DATAHU	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JALAN DUSUN DATAHU	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN DATAHU	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN DATAHU	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN DATAHU	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL TRANS SULAWESI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL. TRANS SULAWESI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	DSN DATAHU	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	DSN DATAHU	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DSN SOMBARI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DSN.SOMBARI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	DUSUN DATAHU	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JALAN LORONG 3	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JALAN LORONG 3	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DSN DATAHU	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DSN DATAHU	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN DATAHU	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN DATAHU	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN SOMBARI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN SOMBARI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN TOHUPO	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL. SOMBARI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL.DSN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL.DUSUN DATAHU	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JLN DUSUN DATAHU	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JLN DUSUN DATAHU	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JLN DUSUN SOMBARI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JLN DUSUN SOMBARI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JLN LORONG 3	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JLN LORONG 3	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JLN SOMBARI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	LORONG 3	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	LORONG 3	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	DSN DATAHU	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DSN DATAHU	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DSN TOHUPO	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DSN TOHUPO	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DSN TOHUPO	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	DUSUN TOHUPA	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DUSUN TOHUPO	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JALAN KUALA LUMPUR	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DESA WONGGAHU	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DSN DATAHU	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN SOMBARI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN TOHUPO	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN TOHUPO	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN SOMBARI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN SOMBARI	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN TOHUPO	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN TOHUPO	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN TOHUPO	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL KUALA LUMPUR	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL RABAT	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TOHUPO	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL. DUSUN TOHUPO	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JLDSN TOHUPO	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JLN BONGO TUA	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JLN DESA DUSUN TOHUPO	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JLN DUSUN SOMBARI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JLN DUSUN SOMBARI	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JLN DUSUN TOHUPA	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JLN DUSUN TOHUPO	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JLN RABAT	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	LRG III	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	DSN TOHUPO	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	DUDUN TOHUPO	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	DUSUN TOHUPO	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	DUSUN TOHUPO	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	J. DS TOHUPO	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DSN TOHUPO	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DSN TOHUPO	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DSN TOHUPO	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DSN TOHUTO	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL DUSUN TOHUPO	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN TOHUPO	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN TOHUPO	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN DUSUN SOMBARI	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JLN DUSUN SOMBARI	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN DUSUN TOHUPO	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	LRG II	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	DSN SOMBARI	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DESA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN BONTULADIDI	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN BONTULADIDI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL DUSUN SOMBARI	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL DUSUN SOMBARI	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN SOMBARI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL TRANS SULAWESI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL. TRANS SULAWESI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL. TRANS SULWESI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL. TYRANS SULAWESI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL.TRANS SULAWESI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JLN DESA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JLN DESA	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JLN TRANS SULAWESI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	LRG.BONTULADIDI B	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	DSN SOMBARI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JALAN SOMBARI	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL BONTULADIDI TIMUR	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL BONTULADIPI TIMUR	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DESA	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL DESA WONGGAHU	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DSN BONTULADIDI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DSN BONTULADIDI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL DSN SOMBARI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DUSUN	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DUSUN BONTULADIDI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL DUSUN BONTULADIDI BARAT	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DUSUN BONTULADIDI BARAT	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DUSUN BONTULADIDI BARAT	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL DUSUN BONTULADIDI TIMUR	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DUSUN BONTULADIDI TIMUR	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DUSUN BONTULADIDI TIMUR	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

006	JL DUSUN SOMBARI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DUSUN SOMBARI	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DUSUN SOMBARI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DUSUN SOMBARI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL LORONG III DSN SOMBARI	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL LORONG TIGA DSN SOMBARI	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL MUTIARA	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL TRANS SULAWESI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL. DUSUN SOMBARI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL.DSN SOMBARI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL.TRANS	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JLN BONTULADIDI TIMUR	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JLN DUSUN BONTULADIDI TIMUR	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JLN DUSUN SOMBARI	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	LORONG III DSN SOMBARI	AE	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	LRG II DSN SOMBARI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	LRG.II DSN SOMBARI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	DSN BONTULADIDI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	DSN SOMBARI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DUSUN BONTULADIDI BARAT	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL DUSUN BONTULADIDI TIMUR	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DUSUN BONTULADIDI TIMUR	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN BONTULADIDI TIMUR	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL DUSUN SOMBARI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DUSUN SOMBARI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL. SOMBARI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL DUSUN BONTULADIDI BARAT	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
008	JL DUSUN BONTULADIDI BARAT	AJ	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DUSUN BONTULADIDI TIMUR	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
008	JL DUSUN BONTULADIDI TIMUR	AJ	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DUSUN SERPITE	AJ	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DUSUN SERPITE	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL DUSUN SORPITE	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL. SORPITE	AJ	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JLN DUSUN SORPITE	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
008	JLN DUSUN SORPITE	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JL DESA	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DESA WONGGAHU	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DSN	AJ	087	8,400	s/d	12,000	10,000
009	JL DUSUN	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

009	JL DUSUN	AJ	087	8,400	s/d	12,000	10,000
009	JL DUSUN	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN BONTULADIDI BARAT	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
009	JL DUSUN BONTULADIDI TIMUR	AJ	087	8,400	s/d	12,000	10,000
009	JL DUSUN BONTULADIDI TIMUR	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN SERPITE	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL LORONG BUGIS	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
009	JL TRANS SULAWESI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
009	JL TRANS SULAWESI	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JLDUSUN SORPITE	AJ	087	8,400	s/d	12,000	10,000
009	JLN LORONG BUGIS	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
009	JLN TRANS SULAWESI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
009	TRANS SULAWESI	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	TRNS SULAWESI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
010	JALAN DESA	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JL DUSUN	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JL DUSUN BONTULADIDI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
010	JL DUSUN BONTULADIDI	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JL TRANS SULAWESI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
010	JL TRANS SULAWESI	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JL. LORONG WOMBANGE	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JL. LORONG WOMBONGE	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JL. TRANS SULAWESI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
010	JLN DESA	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
010	JLN DESA	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JLN TRANS	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
010	JLN TRANS	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JLN TRANS SULAWESI	AI	084	23,000	s/d	31,000	27,000
010	JLN TRANS SULAWESI	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
011	JL DESA	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JL DESA WONGGAHU	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
011	JL DSN SORPITE	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JL DUSUN SERPITE	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
011	JL DUSUN SERPITE	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JL. TRANS SULAWESI	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
011	JL. TRANS SULAWESI	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000
011	JLN DUSUN SORPITE	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
011	JLN DUSUN SORPITE	AL	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	ORG SKADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 07- SARIPI

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL BLOK GUNUNG	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL BLOK KEBUN	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DESA	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL TRANS SULAWESI	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL. BLOK KEBUN	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL.TRANS SULAWESI	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN BLOK KEBUN	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	TRANS SULAWESI	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL BLOK KEBUN	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN MOOTILANGO	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TRANS SULAWESI	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	TRANS SULAWESI	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL BLOCK GUNUNG	AI	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL BLOK GUNUNG	AI	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DESA	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA	AI	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DESA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DSN PADINGGI	AI	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DUSUN PADINGGI	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN PADINGGI	AI	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL RAJAWALI	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS SULAWESI	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL BLOCK KEBUN	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL BLOK KEBUN	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DESA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DESA SARIPI	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN DULONTUNGE BARAT	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN MOOTINELO	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL LORONG	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL RAJAWALI	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL TANI	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL TANI PT PG	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL TRANS SULAWESI	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000

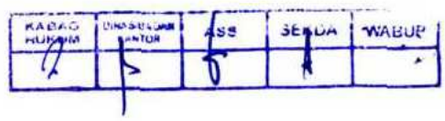

004	JL TRANS SULAWESI	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL. RAJAWALI	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL.RAJAWALI	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL.TRANS SULAWESI	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL.TRANS SULAWESI	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN BLOK KEBUN	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JLN BLOK KEBUN	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN DESA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JLN LORONG	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN LORONG	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JLN RAJAWALI	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JLN RAJAWALI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN SETAPAK	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JLN SETAPAK	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN TRANS SULAWESI	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN TRANS SULAWESI	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	TRANS SULAWESI	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	DSN MORPOGA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	DSN MORPOGA	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	DSN MORPOGA'	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	DUSUN MORPOGA	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL BLOK KEBUN	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DESA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DSN MORPOGA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DSN MORPOGA	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN MOROPOGA	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN MORPOGA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL RAJAWALI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL RAJAWALI	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL.RAJAWALI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL.RAJAWALI	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	KEBUN	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	TANI	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO

KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN

KELURAHAN: 08- BONGO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL BONGO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DSN SILIWANGI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN I	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN PULUBALA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN PULUBALA	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN PULUBALA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN SILIWANGI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN SILIWANGI BARAT	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN SILIWANGI BARAT	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN SILIWANGI BARAT	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN SILIWANGI BARAT	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN SILIWANGI BARAT	AI	085	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL PG RAJAWALI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL PG RAJAWALI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL PG RAJAWALI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL TANI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL TRANS SULAWESI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	SILIWANGI TIMUR	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	TRANS SULAWESI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	TRANS SULAWESI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	TRANS SULAWESI	AI	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	DUSUN SILIWANGI TIMUR	AD	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DSN SILIWANGI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN MELITO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN MELITO	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN MELITO	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN PULUBALA	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN PULUBALA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN SILIWANGI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN SILIWANGI	AD	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DUSUN SILIWANGI BARAT	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN SILIWANGI BARAT	AD	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DUSUN SILIWANGI BARAT	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN SILIWANGI BARAT	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000

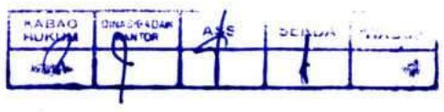

002	JL DUSUN SILIWANGI TIMUR	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN SOMBARI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL PG RAJAWALI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS SULAWESI	AD	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JLN DSN SILIWANGI TIMUR	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JLN TRANS WONOSARI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	SILIWANGI TIMUR	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	TRANS WONOSARI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DSN SIPATANA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN SIPATANA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN SIPATANA	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL KEBUN GUNUNG SIPATANA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS SULAWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL TRANS SULAWESII	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS SULWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JLN DSN SILIWANGI TIMUR	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	TRANS SULAWESI	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	TRANS SULAWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	TRANS SULAWEWSI	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL DUSUN SIPATANA	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN SIPATANA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN SIPATANA	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	DSN MELITO	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DSN SIPATANA	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL DUSUN	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL DUSUN MELITO	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL DUSUN MELITO	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN MELITO	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL DUSUN SILIWANGI TIMUR	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN SIPATANA	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL DUSUN SIPATANA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN SIPATANA	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL KEBUN	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL PASAR BONGO NOL	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL PASAR BONGO NOL	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL SILIWANGI TIMUR	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

005	JL SIPATANA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL TANI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL TANI	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL TANI / JL TELKOM	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL TANI DUSUN MELITO	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL TELKOM	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL TELKOM / JL TANI	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL TRANS SULAWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL.DESA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL.DUSUN SIPATANA	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JLN DSN SILIWANGI TIMUR	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	TRANS SULAWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	TRANS SULAWESI	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	TRNS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	DSN MELITO	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL DUSUN MELITO	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN SILIWANGI BARAT	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN SILIWANGI BARAT	AI	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL DUSUN SILIWANGI BARAT	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL DUSUN SILIWANGI TIMUR	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN SILIWANGI TIMUR/BARAT	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL TANI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL TRANS	AJ	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL.DESA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JLN DSN SILIWANGI TIMUR	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	PG.RAJAWALI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	RAJAWALI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	SILIWANGI TIMUR	AI	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	TRANS SULAWESI	AI	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	TRANS WONOSARI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 09- SUMBER JAYA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN DARMA SANTI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN DARMA SANTI	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DSN DARMA SANTI	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DSN DARMA SANTI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN DARMA SANTI	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN DARMA SANTY	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DSN ILOHELUMA	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN DARMA SANTI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	DSN MOOTILANG	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	DSN MOOTILANGO	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	DSN MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	DSN MOOTILANGO	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DSN. MOOTILANGO	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	DUSUN MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN MOOTILANGO	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DSN MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN MOOTILANGO	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN DARMAYASA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN MOOTILANGO	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN MOOTILANGO	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN MOOTILANGO	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN MOOTINELO	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DSN MOOTILANGO	AA	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	DUSUN ILOHELUMA	AA	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	JL DSN MOOTILANGO	AA	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	JL DUSUN MOOTILANGO	AA	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	JL DUSUN MOOTINELO	AA	093	1,050	s/d	1,400	1,200
004	DARMA SANTI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	DESA BONGO IV	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DS MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DSN MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DUSUN MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DESA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DSN ILOHELUMA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DSN MOOTILANGO	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN MOOTILANGO	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN MOOTILANGO	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN MOOTINELO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL LAHAN I DUSUN MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL MOOTILANGO	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL MOOTILANGO.	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL MOOTILANGO.	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL TRANS SULAWESI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	LAHAN I DSN MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	MOOTILANGO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	DSN ILOHELUMA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	DSN DARMAKERTI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	DSN ILOHELUMA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	DSN ILOHELUMA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	DSN ILOHELUMA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	DSN ILOHELUMA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	DSN PUNCAKSARI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	DSN PUNCAKSARI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	DUSUN ILOHELUMA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	DUSUN ILOHELUMA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	DUSUN ILOHELUMA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	ILOHELUMA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DSN ILOHELUMA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DSN ILOHELUMA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DSN ILOHELUMA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DSN ILOHELUMAN	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN ILOHELUMA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN ILOHELUMA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN ILOHELUMA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN ILOHELUMA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN ILOHELUMA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

006	DSN MUSYAWARAH	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	DUSUN DARMA YASA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DARMA YASA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DARMAYASA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DSN DARMA YASA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DSN DARMA YASA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DUSUN DARMA YASA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DUSUN DARMA YASA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	DSN PUNCAK SARI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	DSN PUNCAK SARI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	DSN PUNCAK SARI	AI	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	DSN PUNCAK SARI	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	DSN PUNCAKSARI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	DSN PUNCAKSARI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	DSN PUNCAKSARI	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	DUSUN PUNCAK SARI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	DUSUN PUNCAK SARI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	DUSUN PUNCAK SARI	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	ILOHELUMA	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL DSN ILOMATA	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL DSN ILOMATA	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL DSN PUN CAKSARI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DSN PUNCAK SARI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DSN PUNCAK SARI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL DSN PUNCAKSARI	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL DUSUN PUNCAK SARI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DUSUN PUNCAK SARI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL DUSUN PUNCAK SARI	AI	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL DUSUN PUNCAK SARI	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	PUNCAK SARI	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	PUNCAKSARI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	DSN DARMA KERTI	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DARMAKERTI	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DESA SUMBER JAYA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL DESA SUMBER JAYA	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
008	JL DSN DARMA KERTI	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DUSUN DARMA KERTI	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL DUSUN DARMA KERTI	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DUSUN DARMA KERTI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DUSUN DARMA KERTI	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	KEPALA DINAS/KEPALA BADAN/KEPALA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

008	JL DUSUN DARMA KERTI	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	DSN DARMAKERTI	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	DSN ILOHELUMA	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	DUSUN DARMA KERTI	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	ILOHELUMA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL DSN DARMA KERTI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DSN DARMA KERTI	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL DSN DARMA KERTI	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	JL DSN DARMAKERTI	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	JL DUSUN DARMA KERTI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN DARMA KERTI	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL DUSUN DARMA KERTI	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
010	DSN DARMAKERTI	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	DSN PUNCAK SARI	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	DUSUN DARMA KERTI	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
010	ILOHELUMA	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JL DSN DARMA KERTI	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JL DSN DARMA KERTI	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
010	JL DUSUN DARMA KERTI	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JL DUSUN DARMA KERTI	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
010	JL DUSUN PUNCAK SARI	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
011	DSN ILOMATA	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
011	DSN ILOMATA	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
011	DUSUN ILOMATA	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
011	JL DSN ILOMATA	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
011	JL DUSUN ILOMATA	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
011	JL DUSUN ILOMATA	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
012	DSN ILOHELUMA	AI	092	1,400	s/d	2,000	1,700
012	DSN ILOMATA	AI	092	1,400	s/d	2,000	1,700
012	DSN ILOMATA	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
012	DSN PUNCAK SARI	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
012	DUSUN ILOMATA	AI	092	1,400	s/d	2,000	1,700
012	DUSUN ILOMATA	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
012	JL DSN ILOMATA	AI	092	1,400	s/d	2,000	1,700
012	JL DSN ILOMATA	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
012	JL DSN ILOMATA.	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
012	JL DSN ILOMATO	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450
012	JL DUSUN ILOMATA	AI	092	1,400	s/d	2,000	1,700
012	JL DUSUN ILOMATA	AJ	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 10- MUTIARA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	BONGO TUA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL AYUMOITO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN LINGGITO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN LINGGITO	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN LINGGITO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL KEBUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL KEBUN	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL KEBUN	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL LINGGITO	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL. LINGGITO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL.LINGGITO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN LINGGITO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	KEMUNING	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	LINGGITO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	TAPALU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN LINGGITO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN LINGGITO	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL KEBUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL KEBUN	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL SAWAH	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL.LINGGITO	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JLN LIMU	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JLN LINGGITO	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	LINGGITO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	BONGO TUA	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	BULUMBU BARAT	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	DSN LINGGITO	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	DSN LINGGITO	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JALAN LINGGITO	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JALAN LINGGITO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN LINGGITO	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN LINGGITO	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DUSUN LINGGITO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL KEBUN	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL KEBUN	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	JL KEBUN	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL LINGGITO	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL LINGGITO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL SAWAH	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL TANI	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL.LINGGITO	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JLN DSN LINGGITO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JLN LINGGITO	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JLN LINGITO	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	LINGGITO	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	LINGGITO	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	LINGGITO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	LINGGITO-MUTIARA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	MUTIARA	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	TANI	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL BONGO TUA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN KETAPANG	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN KETAPANG	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN KETAPANG	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL KEBUN	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL KEMUNING	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL.BONGO TUA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL.KEMUNING	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL.LINGGITO	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN KEMUINING	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN KEMUNING	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN LINGGITO	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN MUSTIKA	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	LORONG C	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	TK KEMUNING	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	BONGO TUA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	BONGO TUA	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	BONGO TUA	AT	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	DSN KETAPANG	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	DSN KETAPANG	AT	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	DSN LINGGITO	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL BONGO	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL BONGO	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL BONGO TUA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

005	JL BONGO TUA	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL BONGO TUA	AT	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DESA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DSN KETAPANG	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DSN KETAPANG	AT	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DSN LINGGITO	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN KETAPANG	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN KETAPANG	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN KETAPANG	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN KETAPANG	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN KETAPANG	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN KETAPANG	AT	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL KETAPANG	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL KETAPANG	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL. DUSUN KETAPANG	AT	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL.BONGO TUA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL.BONGO TUA	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL.BONGO TUA	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JLN BONGO TUA	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JLN BONGO TUA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JLN BONGO TUA	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JLN DSN LINGGITO	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JLN LINGGITO	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JLN LINGGITO	AT	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	KETAPANG	AT	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	ADATAHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	DSN BULUMBU	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL BULUMBU	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DSN BULUMBU	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
006	JL DSN BULUMBU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DSN BULUMBU	AO	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL DSN BULUMBU	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DUSUN	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN BULUMBU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DUSUN BULUMBU	AO	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL DUSUN BULUMBU	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN BULUMBU I	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN KETAPANG	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DUSUN TAPALU	AO	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

006	JL. LIMIKU	AO	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL MUTIARA, LAKEYA	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL. OLIBOHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL. OLIBOHU	AO	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL. OLIBOHU	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL. SISWA	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL.SISWA	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL.TANI	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JLN OLIBOHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JLN SISWA	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JLN SISWA	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	OLIBUHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	OLIBUHU	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	DSN BULUMBU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL DSN BULUMBU	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL. DSN BULUMBU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL. DSN OLIBOHU	AQ	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL. DUSUN	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL. DUSUN	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL. DUSUN BULUMBU	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL. DUSUN BULUMBU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL. DUSUN BULUMBU	AO	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL. DUSUN BULUMBU	AQ	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL. DUSUN TAPALU	AO	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL. LINGGITO	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL. OLIBOHU	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL. OLIBOHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL. OLIBOHU	AQ	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL. OLIBUHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JLN DSN BULUMBU	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JLN DSN BULUMBU	AO	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JLN OLIBOHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JLN OLIBUHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JLOLIBOHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	OLIBUHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	PERUSAHAAN	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	BULUMBU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	DSN BULUMB U	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	DSN BULUMBU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JALAN PEMBENGO	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

008	JL BONGO	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL BULUMBU	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL DSN BULUMBU	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL DUSUN	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL DUSUN	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL DUSUN BULUMBU	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DUSUN BULUMBU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL DUSUN BULUMBU	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL SISWA	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL SISWA	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL SISWA	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JLN BULUMBU	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JLN BULUMBU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JLN DSN BULUMBU	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JLN SISWA	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JLN SISWA	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	OLIBOHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	OLIBUHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	SISWA	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	DSN OLIBUHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	DSN TAPALU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL BONGO TUA	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
009	JL BONGO TUA	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DSN TAPALU	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN BULUMBU	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN BULUMBU	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JL DUSUN BULUMBU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL DUSUN TAPALU	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
009	JL DUSUN TAPALU	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL DUSUN TAPALU	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JL DUSUN TAPALU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL DUSUN TAPALU	AR	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JL KEBUN DUSUN TAPALU	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JL OLIBOHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL OLIBOHU	AR	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JL OLINOHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL.OLIBOHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JLN BONGO TUA	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
009	JLN BONGO TUA	AR	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JLN OLIBOHU	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

009	JLN OLIBOHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JLN OLIBOHU	AR	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JLN OLIBUHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	LJN OLIBOHU	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	OLIBUHU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	OLIBUHU	AR	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	TAPALU	AL	091	2,000	s/d	2,900	2,450
010	JALAN BONGO TUA	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
010	JL BONGO	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
010	JL BONGO TUA	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL BONGO TUA	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
010	JL BONGO TUA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
010	JL BONGO TUA	AR	089	4,100	s/d	5,900	5,000
010	JL DUSUN TAPALU	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL DUSUN TAPALU	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
010	JL DUSUN TAPALU	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
010	JL DUSUN TAPALU	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
010	JL DUSUN TAPALU	AN	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL DUSUN TAPALU	AR	089	4,100	s/d	5,900	5,000
010	JL DUSUN TAPALU	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
010	JL HAMSAH PEMBENGO	AS	089	4,100	s/d	5,900	5,000
010	JL MUSTIKA	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JL TK KEMUNING	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JLN BONGO TUA	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
010	JLN BONGO TUA	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
010	JLN KEMUNIMG	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
010	JLN KEMUNING	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
010	JLN MUSTIKA	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
010	JLN PEMENGO	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 11- PERMATA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	BONGO TUA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL BONGO TUA	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN HARAPAN	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN HARAPAN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN HARAPAN	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL HARAPAN	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL KEBUN DUSUN HARAPAN	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL KEBUN DUSUN HARAPAN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL TANI	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL.DSN HARAPAN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL.TANI	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	BONGO TUA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	DSN MATA PUTIH	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DSN MATAPUTI	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	DSN MATAPUTI	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DSN MATAPAPUTI	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DSN MATAPUTI	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DSN MATAPUTI	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN MATAPUTI	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN MATAPUTI	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN MATAPUTI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN TANJUNG	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN TANJUNG	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN TANJUNG	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN TANJUNG	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL SAWAH DSN TANJUNG	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL SAWAH DSN TANJUNG	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL SAWAH DSN TANJUNG	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL SAWAH DUSUN TANJUNG	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL SAWAH DUSUN TANJUNG	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL SAWAH DUSUN TANJUNG	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL SAWAH DUSUN TANJUNG	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

002	JL TANI DSN MATAPUTI	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL TANI DSN MATAPUTI	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TANI DSN TANJUNG	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL TANI DSN TANJUNG	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TANI DSN TANJUNG	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL.BONGO TUA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	MATAPUTI	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	SAWAH DSN TANJUNG	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	AYUMOITO	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	BONGO TUA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DSN MATAPUTI	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	DSN MATAPUTI	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL BONGO TUA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DUSUN MATAPUTI	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DUSUN MATAPUTI	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN MATAPUTI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TANI DSN MATAPUTI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL.TANI	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	DSN MATAPUTI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL BONGO TUA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN MATAPUTI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN MATAPUTI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN MATAPUTI	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL TANI DSN MATAPUTI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	BONGO TUA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL BONGO TUA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DSN MATAPUTI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DSN TANJUNG	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN TANJUNG	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN TANJUNG	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL SAWAH	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL SAWAH	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL SAWAH DSN TANJUNG	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL SAWAH DUSUN TANJUNG	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL SAWAH DUSUN TANJUNG	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL SAWAH DUSUN TANJUNG	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL.BONGO TUA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	SAWAH DSN TANJUNG	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	SAWAH DSN TANJUNG	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 12- BUALO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	BERINGIN JAYA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	DSN BERINGIN JAYA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	DSN BERINGIN JAYA SAKTI	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	DSN MUSYAWARAH	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN BERINGIN JAYA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	DSN BERINGIN JAYA SAKTI	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
002	DSN LATULA	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
002	DSN LATULA	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DS LATULA	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DSN LATULA	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
002	JL DUSUN BERINGIN JAYA	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN LATULA	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
002	JL DUSUN LATULA	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JLN DSN LATULA	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
002	JLN DSN LATULA	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	BUALO	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	DS ILOMONU	AA	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	DSN ILOMONU	AA	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	DSN ILOMONU	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	DSN LATULA	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	DSN MUSYAWARAH	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	DUSUN ILOMONU	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	JL DSN ILOMONU	AA	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	JL DSN ILOMONU	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	JL DUSUN ILOMONU	AA	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	JL DUSUN ILOMONU	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	JL ILOMONU	AA	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	JL ILOMONU	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
003	JLN DSN ILOMONU	AB	093	1,050	s/d	1,400	1,200
004	DSN MUSYAWARA	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DSN MUSYAWARAH	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DSN MUSYAWARAH	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN MUSYAWARAH	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	BERINGIN JAYA SAKTI	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
005	DSN BERINGIN JAYA SAKTI	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700

KABAG HUKUM	DINASISADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

006	AYUMOITO	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	AYUMOITO	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	BONGO TUA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	DSN AYUMOITO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	DSN HARAPAN	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL BONGO TUA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DSN HARAPAN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DSN HARAPAN	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DUSUN AYUMOITO	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN AYUMOITO	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DUSUN HARAPAN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN HARAPAN	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL DUSUN HARAPAN	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL KEBUN	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL SAWAH DSN TANJUNG	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL SAWAH DUSUN HARAPAN	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL SAWAH DUSUN TANJUNG	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500

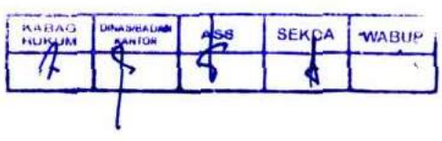

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 13- KUALA LUMPUR

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN AYUHULAWA	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	DSN AYUHUHULAWA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	DSN AYUHULAWA	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	DSN AYUHULAWA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	DSN AYUHULAWA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	DSN AYUHULAWA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	DSN HELUMO	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	DSN ILOHELUMA	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	DSN PALAWIJA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DSN AYUHULAWA	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN AYUHULAWA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DSN AYUHULAWA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DSN AYUHULAWA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN AYUUHULAWA	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN PALAWIJA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN AYUHULAWA	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN AYUHULAWA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN AYUHULAWA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN AYUHULAWA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN PALAWIJA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JLDSN AYUHULAWA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	BUALO	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	DSN PALAJIWA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	DSN PALAWIJA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	DSN PALAWIJA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	DSN PALAWIJA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DESA KUALA LUMPUR	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DSN PALAWIJA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN PALAWIJA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN PALAWIJA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN PALAWIJA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN PALAWIJA	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	DSN AYUHULAWA	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DSN ELING	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	DSN ELING	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	DSN HELIMO	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DSN HELUMO	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	DSN HELUMO	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	DSN HELUMO	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	DSN MUSYAWARAH	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	DUSUN HELUMO	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	DUSUN HELUMO	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN AYUHULAWA	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN ELING	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DSN ELING	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN ELING	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DSN ELING	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DSN HELUMO	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DSN HELUMO	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN HELUMO	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DSN MUSYAWARAH	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN MUSYAWARAH	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DSN PALAWIJA	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN PALAWIJAYA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN ELING	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN ELING	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN ELING	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN ELING	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN HELUMO	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN HELUMO	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN HELUMO	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL LORONG 5	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL LORONG V DUSUN HELUMO	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL LORONG V DUSUN HELUMO	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL LORONG V DUSUN HELUMO	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JLN DSN ELING	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JLN DSN ELING	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JLN DSN HELUMO	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	KL DSN HELUMO	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	LORONG V DSN HELUMO	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	DSN MUSYAWARAH	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	DSN TUMBA	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DESA	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL DSN MUSYAWARAH	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DSN MUSYAWARAH.	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN MUSYAWARAH	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL RAMBUTAN	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	DSN MUSYAWARAH	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	DUSUN OLOA	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DSN MUSYAWARAH	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN MUSYAWARAH	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL.DSN MUSYAWARAH	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	DSN HELUMO	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	DSN MUSYAWARAH	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DSN GOMPASE INDUK	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DSN HELUMO	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DSN MUSYAWARAH	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DSN POLUMULA	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DUSUN	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL DUSUN MUSYAWARAH	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JLN.DSN MUSYAWARAH	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	LORONG VII	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	DSN MUSYAWARAH	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DSN MENAWAR	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DSN MUSYAWARAH	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DSN OLOA	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL DUSUN MUSYAWARAH	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
007	JL.DSN MUSYAWARAH	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	DSN ELING	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	DUSUN ELING	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DSN ELING	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DSN KAYU MERAH	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DUSUN	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
008	JL DUSUN ELING	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
009	DSN ELING	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
009	DSN PALAWIJA	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
009	DSN PALAWIJA	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
009	DUSUN PALAWIJA	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
009	JL DSN PALAWIJA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JL DSN PALAWIJA	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
009	JL DUSUN ELING	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
009	JL DUSUN ELING	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
009	JL DUSUN PALAWIJA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

								14,000
009	JL DUSUN PALAWIJA	AH	086	12,000	s/d	17,000		10,000
009	JL DUSUN PALAWIJA	AI	087	8,400	s/d	12,000		

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO

KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN

KELURAHAN: 14- TENILO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	TRANS DSN MOLOWAHU BARAT	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	DSN BULUMBU BARAT	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	DSN MOLOWAHU BARAT	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DSN AYULIBO	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN AYULIBO	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN MOLOWAHU BARAT	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL KEBUN	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TRANS MOLOWAHU BARAT	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL TRANS SULAWESI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL TRANS SULAWESI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL.TRANS SULAWESI	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN TRANS	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	MOLOWAHU TIMUR	AB	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DESA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DESA / KEBUN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN MOLOWAHU TIMUR	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL KEBUN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL KEBUN	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL KEBUN	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS SULAWESI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL TRANS SULAWESI	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL.KEBUN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	LORONG	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	LRONG/JL DESA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	TRANS	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN MORONJOE	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN MORONJOE	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN MORONJOE	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN MORONJOE BARAT	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN MORONJOE BARAT	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL KEBUN	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL KEBUN	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150

KA BAG HUKUM	KA URAGAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	JL KEBUN DUSUN MORONJOE BARAT	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TRANS DUSUN MORONJOE	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TRANS SULAWESI	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL. TRANS SULAWESI	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	DSN MORONJOE TIMUR	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN MORONJOE TIMUR	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL KEBUN	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL TRANS	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL TRANS SULAWESI	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JLN TRANS	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	DSN AYULIBO	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	DSN AYULIBU	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	DSN MOLOWAHU TIMUR	AL	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL AYULIBO	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DESA	AL	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DESA	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DSN AYULIBO	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN AYULIBO	AL	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DUSUN AYULIBO	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL KEBUN	AL	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL KEBUN	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL KEBUN AYULIBO	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL LORONG SATU	AL	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL LORONG SATU	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL. AYULIBO	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL. DESA	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL. DESA DSN AYULIBO	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL. KEBUN	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL. KEBUN DUSUN AYULIBO	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL.DESA	AL	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL.KEBUN	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JLN TRANS	AL	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JLN TRANS	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 15- MUSTIKA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	BULUMBU TENGAH	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	BULUMBU TIMUR	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JALAN TANI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL POROS MUSTIKA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DESA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN BULUMBU BARAT	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL POROS	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL POROS MUSTIKA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL POROS MUSTIKA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL SISWA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL TANI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL.BULUMBU TENGAH	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL.DESA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL.DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL.DSN BULUMBU TIMUR	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL.DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL.POROS DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	LORONG I	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	MUSTIKA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	POROS MUSTIKA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	POROS MUSTIKA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	BULUMBU TENGAH	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	BULUMBU TIMUR	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	BULUMBU TIMUR	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	BULUMBU TIMUR	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	BULUMBU TIMUR	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	DESA	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	DSN BULUMBU BARAT	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DSN BULUMBU TENGAH	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DSN BULUMBU TIMUR	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DSN BULUMBU TIMUR	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	DSN BULUMBU TIMUR	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	DSN BULUMBU TIMUR	AF	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	DSN BULUMBU TIMUR	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

002	DSN.BULUMBU TIMUR	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DSN.BULUMBU TIMUR	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	DUSUN BULUMBU TIMUR	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DUSUN BULUMBU TIMUR6	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL BULUMBU TIMUR	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DESA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA	AF	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DESA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DESA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DSN BULUMBU TIMUR	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL LORONG PESANTREN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL POROS MUSTIKA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL POROS MUSTIKA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TANI DSN TENGAH	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL TANI DSN TENGAH	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL.DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL.DSN.BULUMBU	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL.POROS DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JLN DSN BALUMBU TIMUR	AF	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JLN DSN BULUMBU TIMUR	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JLN POROS MUSTIKA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	LORONG KAMPUS	AF	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	LORONG KAMPUS	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	LORONG SATU	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	MUSTIKA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	POROS MUSTIKA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	POROS MUSTIKA	AF	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	BULUMBU BARAT	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	BULUMBU TENGAH	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	BULUMBU TENGAH	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DS MUSTIKA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DS.BULUMBU TENGAH	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DS.MUSTIKA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DSN BULUMBU BARAT	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DSN BULUMBU BARAT	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DSN BULUMBU BARAT .	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	DSN BULUMBU TIMUR	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DSN BULUMBU TIMUR	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	DSN.BULUMBU TENGAH	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL BERSAUDARA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DESA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DESA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA	AJ	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL LORONG B	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL LORONG BASUDARA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL MUSTIKA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL POROS	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL POROS MUSTIKA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL POROS MUSTIKA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL POROS MUSTIKA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL.BULUMBU TENGAH	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL.DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL.DESA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL.DESA.	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL.LRG BASUDARA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JLDESA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	LORONG BASUDARA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	LORONG BASUDARA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	LORONG D BASUDARA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	LORONG D BASUDARA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	LORONG D BASUDARA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	LORONG D BASUDARA	AJ	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	LRG BASUDARA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	MUSTIKA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	MUSTIKA	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	POROS DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	POROS MUSTIKA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	BULUMBU BARAT	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	DS.MUSTIKA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL BERSAUDARA	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DESA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450

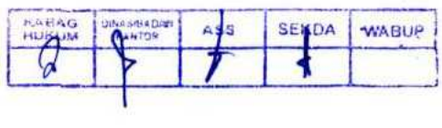

004	JL. DESA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL. DESA	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DSN BULUMBU BARAT	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DSN BULUMBU BARAT	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN BULUMBU BARAT	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL POROS MUSTIKA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL.DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL.DESA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	LORONG BASUDARA	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	LORONG D BASUDARA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	LORONG D BASUDARA	AK	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	LR.BASUDARA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	POROS MUSTIKA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 16- HUWONGO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN BILUNGALA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN DULAMAYO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN DULAMAYO	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	DSN DULAMAYO SP6	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN HUWONGO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN I PANI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	DSN III	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN IV	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN IV DULAMAYO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN MOOTILANGO	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	DSN PAGATA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN PAGATA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	DSN PANI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN SP6	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DUSUN BILUNGALA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DUSUN PAGATA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	HUWONGO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DESA HUWONGO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN BILUNGALA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN DARMA KERTI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN DULAMAYO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN DULAMAYO	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN EMPAT	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN EMPAT DULAMAYO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN EMPAT DULAMAYO	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN HUWONGO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN IV	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN PANI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN SP6	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN BILUNGALA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN DULAMAYO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN DULAMAYO	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL UPT HUWONGO SP6	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL UPT HUWONGO SPB	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	SEKRETARIS/KEPALA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

001	JL. DSN DULAMAYO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL.KEBUN TEBU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN DSN BILUNGALA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JLN DSN DULAMAYO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN DSN DULAMAYO	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JLN DSN IV	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN DSN PAGATA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JLN DSN SATU PANI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JLN DSN SP6	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN DSN USAHA TANI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JLN DUSUN BILUNGALA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	UPT SP6	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	DSN BILUNGALA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	DSN DULAMAYO	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	DSN PAGATA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DSN PAGATA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DUSUN	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN BILUNGALA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN BILUNGALA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN BILUNGALA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN DULAMAYO	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN PAGATA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN PAGATA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN PAGATA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL TRANS SULAWESI	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JLN DSN PAGATA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	TRANS SULAWESI	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	DSN PAGATA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN NEGARA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN PAGATA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL.DSN PAGATA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	DESA HUWONGO	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	DSN BILUNGALA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	DSN PAGATA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	DSN PAGATA	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DSN -PAGATA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DSN BILUNGALA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DSN BILUNGALA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DSN BILUNGALA.	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL DSN DULAMAYO	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN BILUNGALA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN BILUNGALA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN PAGATA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN PAGATA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN PAGATA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN PAGATA	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN PAGATA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN PANI	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN PANI	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL TRANS	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL.DSN BILUNGALA	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL.DSN DULAMAYO	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL.DSN IV	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL.DSN PAGATA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DSN SPB	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN PAGATA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN PANI	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL. DSN PANI	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL.DSN DULAMAYO	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	DINAS/BAGIAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO

KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN

KELURAHAN: 17- KARYA MURNI

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN LALEO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN LALEO	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN LALEO	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN LALEO	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL KARYA MURNI GIRISA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN TUOYI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN TUOYI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL KARYA MURNI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL KARYA MURNI GIRISA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	DSN PANGIMBA UTARA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DSN PANGIMBA UTARA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN PANGIMBA UTARA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN PANGIMBA UTARA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN PANGIMBA UTARA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL KARYA MURNI GIRISA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TANGKOBU KARYA MURNI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL.DESA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	TANGKOBU GIRISA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	TANGKOBU KARYA MURNI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN PANGIMBA SELATAN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN PANGIMBA SELATAN	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN PANGIMBA SELATAN	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL TANGKOBU KARYA MURNI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL TANGKOBU KARYA MURNI	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	KARYA MURNI GIRISA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KA DIAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 018-BALATE

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DESA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	DUSUN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	DUSUN	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL BLOK GUNUNG	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL BRIGJEN PIOLA ISA	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DESA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DESA BALATE	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN BUKIT HARAPAN	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL KEBUN	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL KEBUN	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL KEBUN	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL LIBATIHU	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL LIMBA TIHU	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL LIMBATIHU	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL LIMBATIHU	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL LIMBATIHU	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL LIMBATIHU	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL LIMBATIHU	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL TANI	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL. KEBUN	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL.LIMBATIHU	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JOL LIMBATIHU	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	LIMBA TIHU	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	LIMBATIHU	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	LIMBATIHU	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	DUSUN	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL BALATE JAYA	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL BLOK GUNUNG	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL BLOK GUNUNG	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DESA	AA	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DESA	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DESA	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA BALATE	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DSN LIMBATIHU	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

002	JL DUSUN	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL KEBUN	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL KEBUN	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL KEBUN	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL LIMBATIHU	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL LIMBATIHU	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL LIMBATIHU	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL TANI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL TANI	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	LIMBATIHU	AB	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	LIMBATIHU	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 019-GIRISA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN TENILO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DESA GIRISA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA GIRISA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DESA GIRISA TENILO	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DSN TENILO	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN GIRISA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN GIRISA	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN GIRISA.	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN TENILO	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN TENILO.	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL KEBUN	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL KEBUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL.DUSUN TENILO	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DSN DUTULA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	DUSUN DUTULA	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DESA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DESA GIRISA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DSN DUTULA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DSN DUTULA	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN DUTULA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN DUTULA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN DUTULA	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL KEBUN	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL. DUSUN DUTULA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL.DUSUN DUTULA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL.DUSUN TENILO	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	DUSUN KRAMAT JAYA	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DESA	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DESA GIRISA	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL.DESA GIRISA	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL.DUSUN KRAMAT INDAH	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL.DUSUN KRAMAT JAYA	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	PENGAWASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 020-HULAWA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DSN LABIYA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN PERMATA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL KEBUN DUSUN PERMATA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL SMP 5 PAGUYAMAN	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL TRANS	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TRANS DUSUN PERMATA	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TRANS SULAWESI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TRANS SULAWESI	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL. TRANS SULAWESI	AA	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL. TRANS SULAWESI	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN TENGAH	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN TENGAH	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL KEBUN	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TRANS	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS DUSUN TENGAH	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS SULAWESI	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS SULAWESI	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL. LINGUNGAN II	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL. TRANS SULAWESI	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL. TRANS SULAWESI	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL.TRANS	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JLN DSN TENGAH	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN DURIAN	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL KEBUN	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL KEBUN DUSUN DURIAN	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL TRAN SULAWESI	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL TRANS DUSUN DURIAN	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL TRANS DUSUN DURIAN	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL TRANS SULAWESI	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL TRANS SULAWESI	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL. TRANS SULAWESI	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL. TRANS SULAWESI	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL BALATE JAYA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL BALATE JAYA	AH	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DESA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000

BAGIAN HUKUM	DINAS PADA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL KEBUN DUSUN WANTAGILI	AH	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL TANI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL TRANS SULAWESI	AH	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL. BALATE JAYA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL. BALATE JAYA	AH	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL. DESA BALATE JAYA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL. TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN BALATE JAYA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 021-BONGO TUA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN OHULINGO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	DSN OHULINGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DESA BONGO TUA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN HULAWA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DSN OHULINGO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN OHULINGO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN OHULINGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN PIKOLO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN SARI BARU	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL MANGGA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL PABRIK GULA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL PAWONOSARI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL PAWONSARI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL PAWONSARI DSN DHULINGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL PAWONSARI DSN OHULINGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL PAWONSARI DSN UHULINGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN DESA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN DSN OHULINGO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JLN DUSUN OHULINGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN PABRIK GULA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN PABRIK GULA DUSUN OHULING	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN PAWONSARI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JLN PAWONSARI	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN PAWONSARI DSN OHULINGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN PAWONSARI DUSUN OHULINGO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JLN PAWONSARI DUSUN OHULINGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL. RAJAWALI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	DSN OHULINGO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	DSN PIKOLO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL BONGO TUA	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DSN HULAWA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN OHULINGO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DSN PIKOLO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN OHULINGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN OHULINGO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

002	JL DUSUN PIKOLO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN PIKOLO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL PAWONSARI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL PIKOLO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL RAJAWALI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TANI DUSUN PIKOLI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL. DESA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL. DESA	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL. PAWONSARI	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL. PAWONSARI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL. PIKOLI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL. PIKOLO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL. PIKOLO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL. RAJAWALI	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL. RAJAWALI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL. TANI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL. TANI PIKOLO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL.PIKOLO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL.TOMULA	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JLN DSN OHULINGO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JLN PAONSARI	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	PIKOLI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	PIKOLO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	TOMULA	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	BONGO TUA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	BONGO TUA	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	BONGOTUA	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DSN OHULINGO	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DSN TOMULA	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DUSUN PIKOLO	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DUSUN TOMULA	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DESA	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DSN OHULINGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN OHULINGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN OHULINGO	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN OHULINGO	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN TOMULA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN TOMULA	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN TOMULA	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL KEBUN	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	JL KEBUN	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL KEBUN	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL PAWON SARI	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL PAWON SARI	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL PAWONSARI	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL SAWAH	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL SAWAH	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL SAWAH	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL SAWAH DUSUN TOMULA	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL TOMULA	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL. DESA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL. PAWON SARI	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL.PAWONSARI	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL.PIKOLO	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL.SAWAH	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL.TOMULA	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL.TOMULA	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JLN DESA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JLN DSN OHULINGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JLN DUSUN OHULINGO	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JLN LORONG	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JLN LORONG SETAPAK	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JLN PAWONSARI	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	LORONG SETAPAK	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	LORONG SETAPAK	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	TOMULA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	TOMULA	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	BONGO TUA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	DSN HELUMO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL LORONG KARATE	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL BENDUNGAN TELAGA	AH	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DESA BONGO TUA	AG	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DESA BONGO TUA	AH	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DESA BONGO TUA	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN OHULINGO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN OHULINGO	AG	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DUSUN OHULINGO	AH	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN OHULINGO	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL KEBUN	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL KEBUN	AG	092	1,400	s/d	2,000	1,700

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL PAWONSARI	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL PAWONSARI	AG	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL PAWONSARI DUSUN OHULINGO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL PAWONSARI DUSUN OHULINGO	AG	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL PAWONSARI DUSUN OHULINGO	AH	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL PG GORONTALO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL PG TOLANGOHULA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL SAWAH	AG	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL SAWAH DUSUN TOMULA	AG	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL.PAWONSARI	AG	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JLN PAWONSARI	AG	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JLN PAWONSARI DSN OHULINGO	AG	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JLN PAWONSARI DSN OHULINGO	AH	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JLN PAWONSARI DSN OHULINGO	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JLN PAWONSARI DUSUN OHULINGO	AG	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JLN PAWONSARI OHULINGO	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	PAWONSARI	AG	092	1,400	s/d	2,000	1,700
005	DUSUN LIMU	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DSN LIMU	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN LIMU	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN LIMU	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL PAWONSARI DUSUN OHULINGO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL PT PG GORONTALO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL.DSN LIMU	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JLN DESA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JLN PT PG GORONTALO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JLN PT PG GORONTALO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	LIMU	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	LIMU	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	PT PG GORONTALO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 040-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 022-DILOATA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DELITA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN DELITA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	DSN DELITA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN DELITA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN HELUMO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DSN MOOTILANGO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DUSUN DELITA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	DUSUN DELITA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	DUSUN DELITA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DELITA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN DELITA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DSN DELITA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN DELITA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN DELITA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN DELITA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN DELITA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN HELUMO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN HELUMO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN MOTILANGO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN MOTINELO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL.DSN DELITA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	DSN MOOTILANGO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	DSN MOOTILANGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	DSN MOOTILANGO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	DSN MOOTINELO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	DSN MOOTINELO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	DSN MOTINELO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DSN HELUMO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN MOOTILANGO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DSN MOOTILANGO	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN MOOTINELO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DSN MOOTINELO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN HELUMO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN HELUMO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN MOTILANGO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

002	JL DUSUN MOTILANGO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN MOTILANGO	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN MOTINELO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN MOTINELO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN MOTINELO	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL KOMPLEKS JEMBATAN PG	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL RABAT MOOTINELO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL.MOOTINELO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	DSN MOOTILANGO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DSN MOOTILANGO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	DSN MOOTILANGO	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DSN MOOTILANGO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DSN MOOTINELO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DSN MOTILANGO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	DSN MOTILANGO	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DSN MOTILANGO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DUSUN MOOTILANGO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	DUSUN MOOTILANGO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DUSUN MOOTINELO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA DILOATO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DSN HELUMO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DSN MOOTILANGO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DSN MOOTILANGO	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DSN MOOTILANGO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DSN MOOTINELO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN HELUMO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN MOTILANGO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN MOTILANGO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN MOTINELO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN MOTINELO	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN MOTINELO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL HELUMO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL KEBUN	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL KEBUN	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL LORONG ASWAN	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL MOOTILANGI	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL MOOTILANGO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL RAJAWALI	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL.DSN MOOTILANGO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JLN DSN MOOTILANGO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450

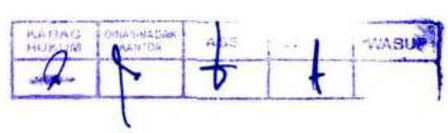

003	LORONG ASWAN	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DSN DELITA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DSN HELUMO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DSN MOOTINELO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	DUSUN HELUMO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DSN HELUMO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN HELUMO	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL.DUSUN	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-PAGUYAMAN
KELURAHAN: 001-MEKAR JAYA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL TRANS BONGO NOL	AA	089	4.100	s/d	5.900	5.000
001	DSN DULANGO	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	DSN DULANGO	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	DSN POHILAYU	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DESA	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DSN DULANGO	AA	089	4.100	s/d	5.900	5.000
001	JL DSN DULANGO	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DSN DULANGO	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN	AA	089	4.100	s/d	5.900	5.000
001	JL DUSUN DULANGO	AA	089	4.100	s/d	5.900	5.000
001	JL DUSUN DULANGO	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DUSUN DULANGO	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN POHILAYU	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN POHILAYU	AI	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL TRANS BONGO NOL	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL. DSN DULANGO	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL.TRANS BONGO 0	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL DSN OLUNGA	AE	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN OLUHUNGA	AD	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN OLUHUNGA	AE	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN OLUHUNGA	AF	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN OLUHUNGA	AG	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL.DSN OLUHUNGA	AD	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	DSN POHILAYU	AH	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	DSN POHILAYU	AJ	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DSN POHILAYU	AH	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DSN POHILAYU	AI	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DSN POHILAYU	AJ	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN POHILAYU	AH	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN POHILAYU	AI	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN POHILAYU	AJ	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL TRANS BONGO	AH	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN	AK	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN NANTU	AK	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL PERUSAHAAN	AK	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL TRANS BONGO I	AK	091	2.000	s/d	2.900	2.450

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-WONOSARI
KELURAHAN: 02- HARAPAN

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	.	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	ABADI II	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	DSN KARANGLOR	AB	088	5.900	s/d	8.400	7.150
001	DSN KARANGLOR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	DSN KRG LOR	AB	088	5.900	s/d	8.400	7.150
001	DUSUN KARANGLOR	AA	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL ABADI I	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL BLOK SAWAH	AA	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL BLOK SAWAH	AB	088	5.900	s/d	8.400	7.150
001	JL BLOK SAWAH	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL BLOK SAWAH	AM	087	8.400	s/d	12.000	10.000
001	JL DESA HARAPAN	AB	088	5.900	s/d	8.400	7.150
001	JL DESA HARAPAN	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DESA HARAPAN	AG	087	8.400	s/d	12.000	10.000
001	JL DUSUN TENGAH	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL KARANG ANYAR	AA	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL KARANG ANYAR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL KARANG ANYAR	AM	087	8.400	s/d	12.000	10.000
001	JL KARANG LOR	AA	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL KARANG LOR	AB	088	5.900	s/d	8.400	7.150
001	JL KARANG LOR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL KARANG TENGAH	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL KARANGANYAR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL RESDUK	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL RESET LEMEN	AB	088	5.900	s/d	8.400	7.150
001	JL. KARANG TENGAH	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

001	KARANG ANYAR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	KARANG LOR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	KARANG TENGAH	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	KARANG WETAN	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	DSN K WETAN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	DUSUN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL ABADI I	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL BLOK SAWAH	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL DESA HARAPAN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL DUSUN ABADI I	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL KARANG ANYAR	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL KARANG WETAN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL. KARANG WETAN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL.KARANG WETAN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	KARANG WETAN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	ABADI I	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	ABADI II	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	DSN K WETAN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL ABADI I	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL BLOK SAWAH	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DESA HARAPAN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DSN KARANG ANYAR	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DUSUN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DUSUN ABADI I	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL KARANG ANYAR	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL KARANG WETAN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL KARANGWETAN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL. KARANG WETAN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	KARANG ANYAR	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	KARANG WETAN	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	DSN ABADI I	AE	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL BLOK SAWAH	AE	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL BLOK SAWAH	AH	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL BLOK SAWAH	AN	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DESA HARAPAN	AE	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL DESA HARAPAN	AG	087	8.400	s/d	12.000	10.000
004	JL DUSUN ABADI I	AE	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL DUSUN KARANG TENGAH	AF	086	12.000	s/d	17.000	14.000
004	JL DUSUN TENGAH	AF	086	12.000	s/d	17.000	14.000
004	JL KARANG TENGAH	AE	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL MERDEKA	AF	086	12.000	s/d	17.000	14.000
004	JL PERSAWAHAN	AE	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL PERSAWAHAN	AN	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL.MERDEKA	AF	086	12.000	s/d	17.000	14.000
004	KARANG ANYAR	AE	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	KARANG ANYAR	AG	087	8.400	s/d	12.000	10.000
004	KARANG TENGAH	AF	086	12.000	s/d	17.000	14.000
005	ABADI I	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	ABADI I	AM	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	ABADI II	AL	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DSN ABADI I	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	DSN ABADI I	AM	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	DSN K WETAN	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL ABADI II	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL BAYANGKARA	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL BAYANGKARA	AM	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	JL BLOK KEBUN	AL	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL BLOK SAWAH	AL	091	2.000	s/d	2.900	2.450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

005	JL DESA	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DESA HARAPAN	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DESA HARAPAN	AL	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DSN ABADI I	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DSN ABADI I	AM	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	JL DSN KARANG WETAN	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DUSUN ABADI I	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DUSUN TENGAH	AL	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL KARANG WETAN	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL KARANG WETAN	AL	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL KARANG WETAN	AM	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	JL KARANG WETAN\	AL	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL KEBUN	AL	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL. BHAYANGKARA	AM	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	JL. KARANG WETAN	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL. KARANG WETAN	AL	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	KARANG ANYAR	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	KARANG WETAN	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	KARANG WETAN	AL	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	KARANG WETAN	AM	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	KARNG WETAN	AM	087	8.400	s/d	12.000	10.000
006	JL ABADI II	AF	086	12.000	s/d	17.000	14.000
006	JL BLOK KEBUN	AL	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL BLOK SAWAH	AI	090	2.900	s/d	4.100	3.500
006	JL BRAWIJAYA	AK	087	8.400	s/d	12.000	10.000
006	JL DESA	AI	090	2.900	s/d	4.100	3.500
006	JL DESA	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
006	JL DESA HARAPAN	AI	090	2.900	s/d	4.100	3.500
006	JL DESA HARAPAN	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000

KABAG HUKUM	BINA SBAGUM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

006	JL DUSUN ABADI II	AF	086	12.000	s/d	17.000	14.000
006	JL DUSUN ABADI II	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000
006	JL MERDEKA	AF	086	12.000	s/d	17.000	14.000
006	JL.BLOK KEBUN	AL	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL.DESA	AJ	089	4.100	s/d	5.900	5.000

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-WONOSARI
KELURAHAN: 03- SUKA MAJU

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN SETIA	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL DUSUN SETIA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN SETIA	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN SETIA	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	DUSUN SETIA	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	DUSUN SETIA	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
002	DUSUN SETIA	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL DUSUN SETIA	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL DUSUN SETIA	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
002	JL DUSUN SETIA	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	DSN PERINTIS	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	DUSUN MAKMUR	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	DUSUN MAKMUR	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	DUSUN PERINTIS	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DSN MAKMUR	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN MAKMUR	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN MAKMUR	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	DUSUN MEKAR	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN MEKAR	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN MEKAR	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL DUSUN MEKAR	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	DUSUN MINANG	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
005	DUSUN MINANG	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DSN MINANG	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
005	JL DSN MINANG	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DSN MINANG	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DUSUN MINANG	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
005	JL DUSUN MINANG	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DUSUN MINANG	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DUSUN PERINTIS	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DSN PERINTIS	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DSN PERINTIS	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN MAKMUR	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DSN PERINTIS	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700

KABAG HUKUM	DISAMBADAS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

006	JL DSN PERINTIS	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DSN PERINTIS	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DSN PERINTIS	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
006	JL DSN SETIA	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DSN PERINTIS	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
007	JL DSN PERINTIS	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	JL DSN PERINTIS	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
007	JL DSN PERINTIS	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	JL DSN PERINTIS	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
007	JL DSN PERINTIS	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
008	DUSUN MAKMUR	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
008	DUSUN MAKMUR	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
008	JL DSN MAKMUR	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
008	JL DSN MAKMUR	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
008	JL DUSUN MAKMUR	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
008	JL DUSUN MAKMUR	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	DAB	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-WONOSARI
KELURAHAN: 04- MAKMUR

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL BLOK KEBUN	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL BONGO II	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN KARYA BARU	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN PURWOJATI	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN PURWOJATI IV	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL BLOK KEBUN	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL BLOK KEBUN	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL BLOK SAWAH	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL BONGO	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL BONGO	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DESA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DESA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN II	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN PURWOJATI	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN PURWOJATI I	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DUSUN PURWOJATI II	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN PURWOJATI IV	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL TRI RUKUN	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL. DUSUN II	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL. MOTILANGO	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	DSN PURWOJATI I	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL BLOK SAWAH	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL BONGO	AI	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL BONGO	AK	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DESA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DESA	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DS I	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DSN I	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DSN PURWOJATI I	AK	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DSN PURWOJATI II	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN PURWOJATI I	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN PURWOJATI I	AH	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	JL PURWOJATI I	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL TRI RUKUN	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	*JL TRI RUKUN*	*AJ*	*088*	*5,900*	*s/d*	*8,400*	*7,150*
004	JL BLOK SAWAH	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DESA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN PURWOJATI	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN PURWOJATI I	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN PURWOJATI I	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN PURWOJATI I	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN PURWOJATI II	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN PURWOJATI II	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN PURWOJATI III	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN PURWOJATI IV	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL MAKMUR	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	*JL TRI RUKUN*	*AE*	*086*	*12,000*	*s/d*	*17,000*	*14,000*
005	BLOK SAWAH	AM	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	DSN PURWOJATI I	AM	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	ILOPONU	AM	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL BLOK KEBUN	AM	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL BLOK SAWAH	AM	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DSN PURWOJATI	AM	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DSN PURWOJATI I	AM	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN	AN	093	1,050	s/d	1,400	1,200
005	JL DUSUN PURWOJATI	AM	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN PURWOJATI I	AM	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN PURWOJATI II	AM	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN PURWOJATI IV	AM	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	*JL PURWOJATI I*	*AM*	*090*	*2,900*	*s/d*	*4,100*	*3,500*
005	JL SAWAH	AM	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	DUSUN	AR	092	1,400	s/d	2,000	1,700
006	ILOPONU	AO	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	ILOPONU	AP	093	1,050	s/d	1,400	1,200
006	JL DUSUN DAMAI	AR	092	1,400	s/d	2,000	1,700
006	JL DUSUN ILOPONU	AP	093	1,050	s/d	1,400	1,200
006	JL DUSUN ILOPONU	AR	092	1,400	s/d	2,000	1,700
006	JL DUSUN KARYA BARU	AR	092	1,400	s/d	2,000	1,700
006	JL MOTILANGO	AP	093	1,050	s/d	1,400	1,200
006	JL MOTILANGO	AR	092	1,400	s/d	2,000	1,700
006	JL MOTILANGO DUSUN ILOPONU	AO	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

006	JL MOTILANGO DUSUN ILOPONU	AP	093	1,050	s/d	1,400	1,200
006	JL MOTILANGO DUSUN KARYA	AR	092	1,400	s/d	2,000	1,700
006	JL PETANI DUSUN ILOPONU	AP	093	1,050	s/d	1,400	1,200
006	JL. PERTANIAN	AP	093	1,050	s/d	1,400	1,200
006	JL.PERTANIAN	AP	093	1,050	s/d	1,400	1,200
006	MOOTILANGO	AR	092	1,400	s/d	2,000	1,700

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-WONOSARI
KELURAHAN: 05- SEJAHTERA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)		KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DSN KARYA AGUNG I	AA	093	1,050 s/d	1,400	1,200
001	JL DSN MULYA III	AA	093	1,050 s/d	1,400	1,200
001	JL DUSUN	AA	093	1,050 s/d	1,400	1,200
001	JL DUSUN II	AA	093	1,050 s/d	1,400	1,200
001	JL DUSUN KARYA AGUNG	AA	093	1,050 s/d	1,400	1,200
001	JL DUSUN KARYA AGUNG I	AA	093	1,050 s/d	1,400	1,200
001	JL KARYA AGUNG I	AA	093	1,050 s/d	1,400	1,200
002	JL DSN	AC	089	4,100 s/d	5,900	5,000
002	JL DSN KARYA AGUNG I	AC	089	4,100 s/d	5,900	5,000
002	JL DSN KARYA AGUNG I	AD	088	5,900 s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN	AB	092	1,400 s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN	AC	089	4,100 s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN	AD	088	5,900 s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN	AE	090	2,900 s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN KARYA AGUNG	AB	092	1,400 s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN KARYA AGUNG I	AB	092	1,400 s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN KARYA AGUNG II	AB	092	1,400 s/d	2,000	1,700
002	JL KARYA AGUNG I	AC	089	4,100 s/d	5,900	5,000
002	JL SUDIRMAN, JEND	AD	088	5,900 s/d	8,400	7,150
003	DUSUN KARYA AGUNG IV	AD	088	5,900 s/d	8,400	7,150
003	JL BARU	AD	088	5,900 s/d	8,400	7,150
003	JL BARU	AH	090	2,900 s/d	4,100	3,500
003	JL BARU KARYA AGUNG IV	AD	088	5,900 s/d	8,400	7,150
003	JL DSN IV	AD	088	5,900 s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN	AC	089	4,100 s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN	AF	091	2,000 s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN	AG	089	4,100 s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN	AL	092	1,400 s/d	2,000	1,700
003	JL DUSUN KARYA AGUNG	AG	089	4,100 s/d	5,900	5,000
003	JL SUDIRMAN, JEND	AC	089	4,100 s/d	5,900	5,000
003	JL SUDIRMAN, JEND	AD	088	5,900 s/d	8,400	7,150
003	JL SUDIRMAN, JEND	AE	090	2,900 s/d	4,100	3,500
003	JL SUDIRMAN, JEND.	AD	088	5,900 s/d	8,400	7,150
003	JL.DESA	AD	088	5,900 s/d	8,400	7,150
003	JL.DESA	AL	092	1,400 s/d	2,000	1,700

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	JL.DUSUN	AD	088	5,900 s/d	8,400	7,150
004	DSN KARYA AGUNG II	AI	089	4,100 s/d	5,900	5,000
004	JL BARU	AD	088	5,900 s/d	8,400	7,150
004	JL DSN II	AI	089	4,100 s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN	AC	089	4,100 s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN	AI	089	4,100 s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN	AL	092	1,400 s/d	2,000	1,700
004	JL SUDIRMAN, JEND	AD	088	5,900 s/d	8,400	7,150
005	JL DSN II	AL	092	1,400 s/d	2,000	1,700
005	JL DUSUN	AL	092	1,400 s/d	2,000	1,700
006	JL D SN II	AL	092	1,400 s/d	2,000	1,700
006	JL DUSUN	AL	092	1,400 s/d	2,000	1,700
007	DSN KARYA AGUNG III	AI	089	4,100 s/d	5,900	5,000
007	DSN KARYA AGUNG V	AI	089	4,100 s/d	5,900	5,000
007	DSN KARYA AGUNG V	AK	091	2,000 s/d	2,900	2,450
007	JL D SN KARYA AGUNG IV	AI	089	4,100 s/d	5,900	5,000
007	JL D SN KARYA AGUNG V	AI	089	4,100 s/d	5,900	5,000
007	JL D USUN	AI	089	4,100 s/d	5,900	5,000
007	JL D USUN	AK	091	2,000 s/d	2,900	2,450
007	JL D USUN	AL	092	1,400 s/d	2,000	1,700
007	JL DUSUN	AI	089	4,100 s/d	5,900	5,000
008	DSN KARYA AGUNG	AJ	092	1,400 s/d	2,000	1,700
008	DSN KARYA AGUNG	AK	091	2,000 s/d	2,900	2,450
008	DSN KARYA AGUNG IV	AK	091	2,000 s/d	2,900	2,450
008	DSN KARYA AGUNG V	AK	091	2,000 s/d	2,900	2,450
008	DSN KARYA BAKTI 1	AK	091	2,000 s/d	2,900	2,450
008	DSN KARYA BAKTI 2	AK	091	2,000 s/d	2,900	2,450
008	DSN KARYA AGUNG 3	AK	091	2,000 s/d	2,900	2,450
008	JL DSN KARYA AGUNG V	AJ	092	1,400 s/d	2,000	1,700
008	JL DSN KARYA AGUNG V	AK	091	2,000 s/d	2,900	2,450
008	JL DUSUN	AJ	092	1,400 s/d	2,000	1,700
008	JL DUSUN	AK	091	2,000 s/d	2,900	2,450
008	JL.DUSUN	AJ	092	1,400 s/d	2,000	1,700
008	JLN TANI	AJ	092	1,400 s/d	2,000	1,700
008	JLN TANI DSN KARYA AGUNG V	AK	091	2,000 s/d	2,900	2,450
008	KARYA AGUNG	AK	091	2,000 s/d	2,900	2,450
008	KARYA AGUNG V	AJ	092	1,400 s/d	2,000	1,700

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/INSTITUSI	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-WONOSARI
KELURAHAN: 06- PANGEYA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN OLIYANUHE	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	DUSUN BATUAPI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	DUSUN OLIYANUHE	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	DUSUN OLIYONUHE	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN AMPERA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN APITALAWAO	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN APITALAWU	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN BATUWAPI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN OLIYANUHE	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL. DSN APITALAWU	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	DSN OLIBUHU	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	DSN SUKATANI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	ILOPONU BARAT	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN APITALAWAO	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN APITALAWU	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN BAHAGIA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN OLIBUHU	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN OLIBUHU	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	DSN ILOPONU TIMUR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	DUSUN ILOPONU TIMUR	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	ILOPONU TIMUR	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DSN ILOPONU TIMUR	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DSN OLIBUHU	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DUSUN BAHAGIA	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN BAHAGIA	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DUSUN ILOPONU TIMUR	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN ILOPONU TIMUR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DUSUN OLIBUHU	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN OLIBUHU	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL ILOPONU TIMUR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL. DSN ILOPONU TIMUR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL. DUSUN ILOPONU	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	DSN I ILOPONU	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	DSN ILOPONU BARAT	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	DSN ILOPONU BARAT	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	DUSUN BINA KARYA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	ILOPONU BARAT	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	ILOPONU BARAT	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DUSUN BATUWAPI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN BINA KARYA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN ILOPONU	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DUSUN ILOPONU BARAT	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN ILOPONU BARAT	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DUSUN ILOPONU TIMUR	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL ILOPONU BARAT	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL. DESA PANGEYA	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	DUSUN SUKATANI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DSN BATUWAPI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DSN BINA KARYA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DUSUN APITALAWAO	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DUSUN APITALAWU	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DUSUN BATUWAPI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DUSUN OLIBUHU	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	SUKATANI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	TRANSMIGRASI SP2	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DSN BINA KARYA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DSN BINA KARYA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN BINA KARYA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN SARIKAT TANI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DSN SARIKAT TANI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DUSUN BINA KARYA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DUSUN BINA KARYA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DUSUN SARIKAT TANI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DSN DULAMAYO	AD	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DSN ILOPONU	AD	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	ILOPONU BARAT	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
008	ILOPONU BARAT	AD	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	ILOPONU TIMUR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
008	JL DSN DULAMAYO	AD	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DSN ILOPONU BARAT	AD	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DSN OLIBUHU	AD	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DUSUN DULAMAYO	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500

KA BAG HUKOM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

008	JL DUSUN DULAMAYO	AD	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DUSUN ILOPONU BARAT	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
008	JL DUSUN ILOPONU BARAT	AD	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DUSUN ILOPONU TIMUR	AB	089	4.100	s/d	5.900	5.000
008	JL DUSUN ILOPONU TIMUR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
008	JL. DUSUN ILOPONU	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
008	JL. DUSUN ILOPONU TIMUR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-WONOSARI
KELURAHAN: 07- JATI MULYA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN MULYA III	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	DSN MULYA III	AD	087	8.400	s/d	12.000	10.000
001	DSN MULYA III	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000
001	DSN MULYA IV	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
001	DUSUN MULYA II	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
001	DUSUN MULYA III	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
001	JL DSN MULYA III	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DSN MULYA III	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DSN MULYA III	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
001	JL DUSUN	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN MULYA III	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN MULYA III	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DUSUN MULYA III	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
001	JL DUSUN MULYA III	AD	087	8.400	s/d	12.000	10.000
001	JL DUSUN MULYA III	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000
001	JL DUSUN MULYA IV	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DUSUN MULYA IV	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000
003	JL DUSUN MULYA III	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
002	JL DUSUN MULYA II	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN MULYA II	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL DUSUN MULYA II	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
002	JL DUSUN MULYA II	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000
002	JL DUSUN MULYA III	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000
003	JL DSN MULYA I	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DSN MULYA I	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000

KA BAG HUKUM		ASS	SEKDA	WABUP

003	JL DUSUN MULYA I	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN MULYA I	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN MULYA I	AE	087	8.400	s/d	12.000	10.000
003	JL DUSUN MULYA I	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000
003	JL DUSUN MULYA III	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL MERDEKA	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000
003	JL MERDEKA TRANS	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000
004	JL DSN MULYA I	AG	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DUSUN	AG	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DUSUN MUL YA I	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000
004	JL DUSUN MUL YA I	AG	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DUSUN MUL YA I	AH	087	8.400	s/d	12.000	10.000
004	JL DUSUN MUL YA II	AG	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	DSN MULYA II	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	DUSUN MULYA II	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	DUSUN MULYA II	AJ	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	DUSUN MULYA IV	AH	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	JL DSN MULYA II	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	JL DSN MULYA II	AN	090	2.900	s/d	4.100	3.500
005	JL DUSUN	AI	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DUSUN MULYA II	AD	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	JL DUSUN MULYA II	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	JL DUSUN MULYA II	AH	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	JL DUSUN MULYA II	AI	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DUSUN MULYA II	AJ	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	JL DUSUN MULYA II	AN	090	2.900	s/d	4.100	3.500
005	JL DUSUN MULYA II	AO	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN MULYA II	AK	087	8.400	s/d	12.000	10.000
006	JL DUSUN MULYA II	AL	089	4.100	s/d	5.900	5.000
006	JL DUSUN MULYA III	AF	087	8.400	s/d	12.000	10.000

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

006	JL DUSUN MULYA III	AI	089	4.100	s/d	5.900	5.000
006	JL DUSUN MULYA III	AK	087	8.400	s/d	12.000	10.000
006	JL DUSUN MULYA III	AL	089	4.100	s/d	5.900	5.000
006	JL DUSUN MULYA III	AN	090	2.900	s/d	4.100	3.500
006	JL DUSUN MULYA IV	AL	089	4.100	s/d	5.900	5.000
007	JL DUSUN MULYA IV	AO	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DSN MULYA III	AK	087	8.400	s/d	12.000	10.000
007	JL DSN MULYA III	AM	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	JL DSN MULYA IV	AL	089	4.100	s/d	5.900	5.000
007	JL DSN MULYA IV	AM	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	JL DUSUN	AN	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	JL DUSUN MULYA III	AO	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DUSUN MULYA IV	AK	087	8.400	s/d	12.000	10.000
007	JL DUSUN MULYA IV	AL	089	4.100	s/d	5.900	5.000
007	JL DUSUN MULYA IV	AM	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	JL DUSUN MULYA IV	AN	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	JL DUSUN MULYA IV	AO	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL. DUSUN MULYA IV	AK	087	8.400	s/d	12.000	10.000
007	USUN MULYA IV	AK	087	8.400	s/d	12.000	10.000
008	DSN MULYA IV	AO	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DUSUN MULYA II	AP	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	DUSUN MULYA IV	AO	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DUSUN MULYA IV	AO	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DUSUN MULYA IV	AP	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	JL. DUSUN MULYA EMPAT	AP	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	JL. DUSUN MULYA IV	AO	091	2.000	s/d	2.900	2.450

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-WONOSARI
KELURAHAN: 08- TRI RUKUN

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL BLOK GUNUNG	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL BLOK KEBUN	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL BLOK KEBUN	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL BLOK SAWAH	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL BLOK SAWAH	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DESA	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
001	JL DESA	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
001	JL DESA	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL POROS	AC	087	8.400	s/d	12.000	10.000
002	DSN DAMAI	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	DSN MEKAR JAYA	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
002	DSN MEKAR JAYA	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL BLOK GUNUNG	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL BLOK KEBUN	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL BLOK SAWAH	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL BLOK SAWAH	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
002	JL BLOK SAWAH	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL DESA	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
002	JL DESA	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
002	JL DUSUN	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL POROS	AC	087	8.400	s/d	12.000	10.000
002	JL POROS	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
002	JL.DSN MERTA JAYA	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
003	DSN	AH	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	DSN DAMAI	AH	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	DSN DAMAI	AI	092	1.400	s/d	2.000	1.700
003	DSN MEKAR SARI	AH	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	DSN MEKAR WANGI	AC	087	8.400	s/d	12.000	10.000
003	DSN MERTA JAYA	AH	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL BLOK DESA	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
003	JL BLOK KEBUN	AC	087	8.400	s/d	12.000	10.000
003	JL BLOK KEBUN	AH	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL BLOK KEBUN	AI	092	1.400	s/d	2.000	1.700
003	JL BLOK KEBUN	AJ	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL BLOK SAWAH	AH	090	2.900	s/d	4.100	3.500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	JL BLOK SAWAH	AI	092	1.400	s/d	2.000	1.700
003	JL BLOK SAWAH	AJ	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DESA	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
003	JL DSN DAMAI	AC	087	8.400	s/d	12.000	10.000
003	JL DUSUN	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
003	JL POROS	AC	087	8.400	s/d	12.000	10.000
004	DSN GUNUNG SARI	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
004	DSN MEKAR SARI	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	DSN MEKAR SARI	AG	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	DSN MEKAR SARI	AH	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL BLOK GUNUNG	AG	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL BLOK KEBUN	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL BLOK KEBUN	AG	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL BLOK KEBUN	AH	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL BLOK SAWAH	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL BLOK SAWAH	AG	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL BLOK SAWAH	AH	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL DESA	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
004	JL DESA	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL POROS	AC	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	DSN MEKAR SARI	AJ	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DSN DAMAI	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	DSN GUNUNG SARI	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
005	DSN GUNUNG SARI	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	DSN GUNUNG SARI	AJ	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DSN MEKAR SARI	AJ	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL BLOK KEBUN	AJ	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DESA	AC	087	8.400	s/d	12.000	10.000
005	JL DESA	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
005	JL DESA	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DUSUN	AJ	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL POROS	AC	087	8.400	s/d	12.000	10.000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-WONOSARI
KELURAHAN: 09- RAHARJA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN MOOTILANGO	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	DSN MOOTILANGO	AG	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL BLOK GUNUNG BLOK	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL BLOK KEBUN BLOK KEBUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL BLOK KEBUN BLOK KEBUN	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL BLOK KEBUN BLOK KEBUN	AG	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL BLOK SAWAH BLOK SAWAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL BLOK SAWAH BLOK SAWAH	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL BLOK SAWAH BLOK SAWAH	AD	087	8.400	s/d	12.000	10.000
001	JL BLOK SAWAH BLOK SAWAH	AG	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DESA DESA	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL DESA DESA	AE	088	5.900	s/d	8.400	7.150
001	JL DESA DESA	AF	089	4.100	s/d	5.900	5.000
001	JL DESA RAHARJA DESA	AD	087	8.400	s/d	12.000	10.000
001	DSN MOOTILANGO	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DSN WAYANG ANYAR	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DUSUN I DUSUN I	AG	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DUSUN II DUSUN II	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DUSUN III DUSUN III	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL DUSUN III DUSUN III	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN III DUSUN III	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DUSUN III DUSUN III	AE	088	5.900	s/d	8.400	7.150
001	JL DUSUN III DUSUN III	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JLN DSN MOOTILANGO DSN	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JLN DSN MOOTILANGO DSN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JLN DSN MOOTILANGO DSN	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JLN DSN MOOTILANGO DSN	AD	087	8.400	s/d	12.000	10.000
001	JLN DSN MOOTILANGO DSN	AE	088	5.900	s/d	8.400	7.150
001	JLN DSN MOOTILANGO DSN	AF	089	4.100	s/d	5.900	5.000
001	JLN DSN MOOTILANGO DSN	AG	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL BLOK GUNUNG BLOK	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL BLOK KEBUN BLOK KEBUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL BLOK SAWAH BLOK SAWAH	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL BLOK SAWAH BLOK SAWAH	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL BLOK SAWAH BLOK SAWAH	AF	089	4.100	s/d	5.900	5.000

KABAG HUKUM	ORGANISASI & KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

002	JL BLOK SAWAH BLOK SAWAH	AG	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL DESA DESA	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL DESA DESA	AE	088	5.900	s/d	8.400	7.150
002	JL DESA DESA	AF	089	4.100	s/d	5.900	5.000
002	JL DESA RAHARJA DESA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DESA RAHARJA DESA	AD	087	8.400	s/d	12.000	10.000
002	JL DSN KARANGANYER	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN I DUSUN I	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL DUSUN I DUSUN I	AD	087	8.400	s/d	12.000	10.000
002	JL DUSUN I DUSUN I	AE	088	5.900	s/d	8.400	7.150
002	JL DUSUN II DUSUN II	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL DUSUN II DUSUN II	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN II DUSUN II	AE	088	5.900	s/d	8.400	7.150
002	JL DUSUN III DUSUN III	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL KEBUN KEBUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL KEBUN KEBUN	AF	089	4.100	s/d	5.900	5.000
002	JL.DESA	AE	088	5.900	s/d	8.400	7.150
002	JLN DSN KARANG ANYAR DSN	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JLN DSN KARANG ANYAR DSN	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JLN DSN KARANG ANYAR DSN	AD	087	8.400	s/d	12.000	10.000
002	JLN DSN KARANG ANYAR DSN	AF	089	4.100	s/d	5.900	5.000
002	JLN DSN KARANG ANYER DSN	AD	087	8.400	s/d	12.000	10.000
002	JLN DSN KARANG ANYER DSN	AE	088	5.900	s/d	8.400	7.150
002	JLN DSN KARANG ANYER DSN	AF	089	4.100	s/d	5.900	5.000
002	JLN DSN MOOTILANGO	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
003	BLOK SAWAH	AG	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	DSN MEKARSARI	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JALAN DESA	AE	088	5.900	s/d	8.400	7.150
003	JL BLOK SAWAH BLOK SAWAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL BLOK SAWAH BLOK SAWAH	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL BLOK SAWAH BLOK SAWAH	AG	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DESA DESA	AE	088	5.900	s/d	8.400	7.150
003	JL DESA DESA	AF	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DESA DESA	AG	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DESA RAHARJA DESA	AD	087	8.400	s/d	12.000	10.000
003	JL DESA RAHARJA DESA	AF	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JLN DSN MEKARSARI DSN	AF	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN I DUSUN I	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DUSUN I DUSUN I	AE	088	5.900	s/d	8.400	7.150
003	JL DUSUN I DUSUN I	AF	089	4.100	s/d	5.900	5.000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	JL DUSUN I DUSUN I	AG	090	2.900	s/d	4.100		3.500
003	JLN BLOK SAWAH BLOK SAWAH	AG	090	2.900	s/d	4.100		3.500
003	JLN DSN MEKAR SARI DSN	AE	088	5.900	s/d	8.400		7.150
003	JLN DSN MEKARSARI DSN	AD	087	8.400	s/d	12.000		10.000
003	JLN DSN MEKARSARI DSN	AE	088	5.900	s/d	8.400		7.150
003	JLN DSN MEKARSARI DSN	AF	089	4.100	s/d	5.900		5.000

KABAG HUKUM	ORMAWA/UKM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-WONOSARI
KELURAHAN: 10- DIMITO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DUSUN POS PASAR	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DIMITO	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DSN POSPASAR	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL POS PASAR	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL POSPASAR	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL.POS PASAR	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	DSN MUTIARA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DSN MUTIARA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN MUTIARA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN DIMITO	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN KARYA GALUH	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN KARYA GALUH I	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DUSUN KARYA GALUH I	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL DUSUN KARYA GALUH I	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL. DUSUN KARYA GALUH	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	DSN KARYA GALU	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	DSN KARYA GALUH	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	DSN KARYA GALUH	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DSN BATU KERUJUK	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL DSN KARYA GALUH	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL DUSUN KALIDINGIN	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN KARYA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN KARYA GALUH	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN KARYA GALUH II	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN KARYA GALUH II	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL DUSUN KARYA GALUH II	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DUSUN KARYA GALUH II	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL DUSUN KARYA GALUH II	AE	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN KARYA II	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	KARYA GALUH 2	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DUSUN BLORA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	TANI BLORA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DSN BATU KERUJ	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DSN BATU KERUJUK	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

006	DSN BATU KERUNJUK	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DSN BATU KERUJUK	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN BATU KERUJUK	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DSN KALIDINGIN	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DUSUN KALIDINGIN	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-WONOSARI
KELURAHAN: 11- SUKA MULYA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN SAKA DAMAI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	DSN SUKA DAMAI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL DESA	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL DSN SUKA DAMAI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL DUSUN	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL DUSUN KARYA BAKTI II	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL DUSUN KARYA INDAH	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL DUSUN SUKA DAMAI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL.DUSUN	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN KARYA BAKTI II	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	DSN KARYA INDAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	DUSUN BINA KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DESA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DS SUKA MULYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DSN KARYA INDAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN KARYA BAKTI II	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN KARYA INDAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN SUKA DAMAI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL.DUSUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	DSN KARYA BAKTI	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	DSN KARYA BAKTI I	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	DUSUN KARYA BAKTI 3	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	DUSUN KARYA BAKTI I	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DSN KARYA BAKTI I	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN KARYA BAKTI	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN KARYA BAKTI I	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN KARYA BAKTI II	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	KARYA BAKTI I	AC	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	DSN II	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	DSN KARYA BAKTI I	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	DSN KARYA BAKTI1	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	DSN KRYA BAKTI II	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	DSN KARYA BAKTI I	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL DESA	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL DESA	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DESA	AF	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL DUSUN KARYA BAKTI I	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DUSUN KARYA BAKTI II	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	KARYA BAKTI I	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	DSN KARYA BAKTI 2	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	DSN KARYA BAKTI II	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	DUSUN KARYA BAKTI 2	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DESA	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DSN KARYA BAKTI II	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DUSUN KARYA BAKTI I	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DUSUN KARYA BAKTI II	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL KARYA BAKTI II	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
006	DSN KARYA BAKTI II	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DSN SUKA DAMAI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DUSUN KARYA BAKTI 2	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DUSUN KARYA INDAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN KARYA BAKTI II	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN KARYA INDAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL.DESA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL.DUSUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	KARYA BAKTI 2	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	KARYA INDAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-WONOSARI
KELURAHAN: 12- SARITANI

BLK	NAMA JALAN	KODE	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN INTISARI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	DSN SARI BARU	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	DSN SARIBARU	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	DSN TANGGA II	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	DSN TANGGA II	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	DSN TANGGA II	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL D SN SARI BARU	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL D USUN NOOTI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL D USUN SARI BARU	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL D USUN TAMBOO	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL D USUN TANGGA	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL D USUN TANGGA II	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL. DUSUN SARI BARU	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL. DUSUN TANGGA II	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL. SARI BARU	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN 3 SP 1	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN 3 SP 4 LONGGI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN 3 SP1	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN 3 SP4 LONGGI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN 3SP4 LONGGI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN II SP1	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN II SP4 LONGGI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN II SPI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN III SP1	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN III SP1 PANGEYA	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN KARANG SARI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN M UARA KOPI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN MUARA KOPI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN SP1 PANGEYA	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN SPI PANGEYA	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DSN 3 SPI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUDUN I SP I	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSIN 1 SP.1	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSUN 1 SP.1	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSUN 1 SP.1	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700

KA BAG HUKUM	DINAS PENDIDIKAN	ASS	SEKDA	WABUP

002	DUSUN I	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSUN I SP 4	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSUN I SP I	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSUN II	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSUN III SP1	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSUN LONGGI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSUN LONGGI SP4	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSUN MAKMUR	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSUN MUARA KOPI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSUN MULYA II	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSUN OMBULO	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	DUSUN1 SP.1	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL DSN II SP1	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL DSN II SP4 LONGGI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL DSN III SP1	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL DSN III SP4 LONGGI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL DSN MUARA KOPI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL DUSUN TANGGA	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL DUSUN TANGGA I	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL MUARA KOPI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL. PPK MUARA KOPI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JLPPK MUARA KOPI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	MUARA KOPI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	TRANS SPI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
003	JL DSN INTISARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	DSN KAYU MERAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	DUSUN KAYU MERAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN INTI SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN KAYU MERAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN NOOTI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL.DUSUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	DSN HUTO	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	DSN INTISARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	DSN INTISARI	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	DSN KAYU MERAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	DSN KAYU MERAH	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	DSN RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	DUSUN HUTO	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	DUSUN INTISARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	DUSUN KAYU MERAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450

KABAG HUKUM	DINAS/BUDAN	ASS	SEKDA	WABUP

004	HUTO	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DSN. RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN HUTO	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN INTI SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN INTI SARI	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL DUSUN INTISARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL HUTO	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL. DSN RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL. DSN. RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL.DSN. RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	KAYU MERAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DSN IV SP4	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DSN RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DSN V SP 1	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DSN V SP 4	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DUDUN V SP 1	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DUSUN BANJARSARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DUSUN IV SP 4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DUSUN IV SP1	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DUSUN IV SP4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DUSUN RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DUSUN SP V	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DUSUN V SP 1	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DUSUN V SP 4	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DUSUN V SP 4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DUSUN V SP I	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DUSUN V SP1	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	DUSUNV SP 4	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DSN RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DSN. RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DUSUN BANJAR SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DUSUN HUTO	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DUSUN LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL DUSUN RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL. DSN RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL. DSN. RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL. RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
005	JL.DSN. RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DSN III SP 4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450

KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

006	DUSUN 3 SP 4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DUSUN 3 SP4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DUSUN BANJARSARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DUSUN GUNUNG SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DUSUN III SP4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DUSUN IV SP4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	DUSUNLONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DSN III SP4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DSN V SP4	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN GUNUNG SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN BANJAR SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN GUNUNG SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN GUNUNG SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DUSUN LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DSN I SP4	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	DSN II SP 4	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DSN II SP 4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DSN II SP 4 LONGGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DSN II SP 4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DSN II SP4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DSN INTISARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DSN LONGGI	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	DSN LONGGI SP4	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	DSN RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DSN SP4 LONGGI	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	DSN RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DUSUN 1 SP.4	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	DUSUN 1 SP4	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DUSUN 1 SP4	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	DUSUN BANJAR SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DUSUN BANJARSARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DUSUN GUNUNG SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DUSUN INTISARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DUSUN IV SP4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DUSUN KARYA TANI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	DUSUN LONGGI	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	DUSUN LONGGI SP4	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	DUSUN RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DESA SARI TANI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

007	JL DSN III SP4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DSN KARYA TANI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DSN RUKUN KARYA	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	JL DSN. RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DUSUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DUSUN BANJAR SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DUSUN GUNUG SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DUSUN GUNUNG SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DUSUN GUNUNG SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DUSUN HUTO	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DUSUN INTI SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DUSUN INTI SARI	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
007	JL DUSUN KARYA TANI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL DUSUN SARI WANGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL. DSN RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL. DSN. RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL.DSN. RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JL.DUSUN INTISARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	JLN. DSN RUKUN KARYA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
007	KARYATANI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DSN 4 SP 1	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DSN GUNUNG SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DSN INTI SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DSN INTISARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DSN KAYU MERAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DSN NOOTI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DSN SARI WANGI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	DSN SARIWANGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DUSUN BANJARSARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DUSUN GUNUNG SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DUSUN III	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DUSUN INTISARI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	DUSUN INTISARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DUSUN IV SP 1	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DUSUN IV SP1	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DUSUN IV SP4	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DUSUN IV SP4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DUSUN IV SP4 TOLINGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DUSUN KAYUMERAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	DUSUN NOOTI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450

KA.BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

008	DUSUN SARI WANGI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	DUSUN IV SP4 LONGGI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DSN IV SP1	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DSN NOOTI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DUSUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DUSUN BANJAR BARU	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	JL DUSUN BANJAR SARI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	JL DUSUN GUNUNG SARI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	JL DUSUN INTI SARI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	JL DUSUN INTI SARI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DUSUN KAYU MERAH	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	JL DUSUN KAYU MERAH	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DUSUN KAYU MERAH	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
008	JL DUSUN MUARA KOPI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DUSUN NOOTI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DUSUN SARI BARU	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	JL DUSUN SARI WANGI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	JL DUSUN TAMBOO	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	JL DUSUN TAMBOO	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
008	JL DUSUN INTI SARI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
008	JL DUSUN INTI SARI	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-WONOSARI
KELURAHAN: 013-TANJUNG HARAPAN

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN BOTULANTIO	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN DUDEPO	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL PUTKATI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DESA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN BOTULANTIO	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	DSN ULINTAPO	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DESA	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DSN ULINTAPO	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL PENGHUBUNG DESA	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL PUTKATI	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DESA	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DESA	AD	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DSN	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DUSUN	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DUSUN	AD	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN I	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DUSUN I	AD	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	JL DUSUN I	AE	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL PUTKATI	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000

BAGIAN HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 051-WONOSARI
KELURAHAN: 014-DULOHUPA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN TOPOLO	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	DUSUN AMPERA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	DUSUN AMPERA.	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	DUSUN BONGO HULAWA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	DUSUN MAPER	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	DUSUN MAPERA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL AMPERA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
001	JL DUSUN AMPERA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL BONGOHULAWA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DSN BONGOHULAWA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN BONGOHULAWA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	DSN BONGOHULAWA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	DSN TOPOLO	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	DUSUN TOPOLO	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	DUSUN TOPOLO	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DESA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN BONGOHULAWA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN BONGOHULAWA	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DUSUN TOPOLO	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
003	JL DUSUN TOPOLO	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DUSUN TOPOLO	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
003	JL. DUSUN BONGO HULAWA	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
004	DSN TOPOLO	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DUSUN TOPOLO	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL DUSUN TOPOLO	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
004	JL DUSUN TOPOLO	AE	089	4.100	s/d	5.900	5.000
004	JL TOPOLO	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	DSN MERPATI	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
005	JL DSN MERPATI	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
005	JL DUSUN MERPATI	AC	089	4.100	s/d	5.900	5.000
005	JL DUSUN MERPATI	AD	088	5.900	s/d	8.400	7.150
006	DSN MERPATI	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
006	JL DSN MERPATI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450
006	JL DSN MERPATI	AB	090	2.900	s/d	4.100	3.500
006	JL DUSUN MERPATI	AA	091	2.000	s/d	2.900	2.450

KA BAG HUKUM	[illegible] KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

006	JL DUSUN MERPATI	AB	090	2.900	s/d	4.100		3.500
006	JL DUSUN MERPATI	AC	089	4.100	s/d	5.900		5.000

ASISTEN HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 060-BOTUMOITO
KELURAHAN: 01- BOLIHUTUO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	-	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	DUSUN II	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DESA DSN II	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN II	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL SUBSIDI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL TRANS	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL TRANS	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TRANS	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL TRANS SULAWESI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL TRANS SULAWESI	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN DESA DSN II	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JLN DESA DSN III	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JLN DESA DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN DESA DUSUN II	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JLN DSN III WUTA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JLN DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN TRANS	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN TRANS	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN TRANS	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	DSN III SALAONTE	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	DSN III SALAWONTE	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN III WUTA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN III WUTA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DSN III WUTA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN II	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN II	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN II	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN III	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN III	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN III	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN III BOLIHUTUO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN III SALAONDE	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN III SAPA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN III WUTA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KEUTGR	ASS	SEKDA	WABUP

002	JL DUSUN III WUTA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN III WUTA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL SN III WUTA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL SUBSIDI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL TRANS	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TRANS	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JLN DSN III WUTA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JLN DSN III WUTA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JLN DSN III WUTA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JLN DUSUN III WUTA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DUSUN I	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	DUSUN I	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	DUSUN I	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN I	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN I	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN I	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TRANS	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JLN DESA DSN 1	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	DUSUN I	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DSN I	AG	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DSN I ALUMBANGO	AG	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN I	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN I	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DUSUN I	AG	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL.DESA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL.DSN I	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL.DSN I	AG	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN II	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DUSUN II BUTU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN II HULUNGIO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL TRANS	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL TRANS	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL TRANS	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL TRANS LAMUSU	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL TRANS SULAWESI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL TRANS SULAWESI	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL TRANS SULAWESI	AF	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JLN SUBSIDI DSN 3 WUTA	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	KABAG UMUM & KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

005	JLN TRANS							
005	JLN TRANS	AE	087	8,400	s/d	12,000		10,000
		AF	086	12,000	s/d	17,000		14,000

ASISTEN	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 060-BOTUMOITO
KELURAHAN: 02- TAPADAA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JLN DESA DSN III	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL TRANS	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL TRANS	AI	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL TRANS	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL TRANS	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL TRANS DSN II	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL TRANS DSN III	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL TRANS SULAWESI	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JLN DESA DSN III	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JLN TRANS DSN III	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	TRANS SULAWESI	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL BBM	AA	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL BBM	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL BBM	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL BBM	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA DSN III	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA DSN III	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL TRANS DUSUN III	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TRANS DUSUN III	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL.TRANS	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JLN DESA DSN III	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA DSN I	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA DUSUN I	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DSN	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL SN	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA DSN I	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA DUSUN I	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA DUSUN I	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DSN	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL TRANS	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL TRANS DUSUN I	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL TRANS DUSUN I	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN DESA DSN I	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JLN DESA DSN I	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500

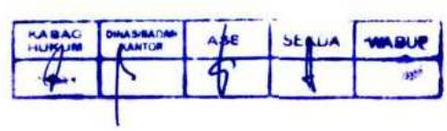

005	DESA DSN III	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DESA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DESA DSN II	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DESA DSN II	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DESA DSN II	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DESA DUSUN I	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DESA DUSUN II	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DESA DUSUN II	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DESA DUSUN II	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DESA DUSUN II	AG	086	12,000	s/d	17,000	14,000
005	JL DESA DUSUN II	AH	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DESA DUSUN II	AK	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL DSN II	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL TRANS	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL TRANS DSN I	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL TRANS DSN II	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL TRANS DUSUN I	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL TRANS DUSUN I	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL TRANS DUSUN I	AH	087	8,400	s/d	12,000	10,000
006	JL TRANS DUSUN	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL TRANS DUSUN II	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DESA DUSUN II	AC	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DESA DUSUN II	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL TRANS DUSUN I	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL TRANS DUSUN II	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL TRANS DUSUN II	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM		ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 060-BOTUMOITO
KELURAHAN: 03- RUMBIA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DSN IV DATAHE	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL RUMBIA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL RUMBIA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL. RUMBIA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL.RUMBIA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JLN DESA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL RUMBIA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL RUMBIA	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL RUMBIA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL RUMBIA	AG	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL.RUMBIA	AG	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL KEBUN	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL KEBUN	AG	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL RUMBIA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL RUMBIA	AG	088	5,900	s/d	8,400	7,150

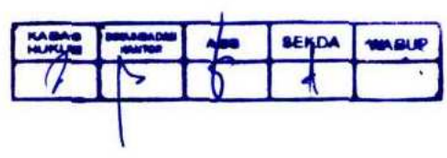

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 060-BOTUMOITO
KELURAHAN: 04- HUTAMONU

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DESA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	DSN III TILAYO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	DUSUN III TILAYO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL DESA DUSUN III TILAYO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DSN III TILAYO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN III	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN III TILAYO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL TIGA TILAYO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL TRANS SULAWESI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL. DUSUN III TILAYO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL. DUSUN TILAYO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL.DESA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL.DUSUN III TILAYO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JALAN KOLONISASI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL KOLONISASI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL KOLONISASI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL SETAPAK / DUSUN II	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL TRANS SULAWESI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TRANS SULAWESI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	DUSUN I PONTOLO	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL KOLONISASI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS SULAWESI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS SULAWESI	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	TRANS SULAWESI	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	DS POLULUWA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	DSN I PONTOLO	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DESA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA	AE	086	12,000	s/d	17,000	14,000
004	JL DESA	AF	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DESA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DESA POLULAWA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL POLULUWA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	[illegible]	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL POLULUWA	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
004	JL POLULUWA	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	JL PONTOLO	AA	090	2,900	s/d	4,100		3,500
004	JL TRANS SULAWESI	AE	086	12,000	s/d	17,000		14,000
004	JL TRANS SULAWESI	AF	088	5,900	s/d	8,400		7,150
004	JL TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	LORONG	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	LORONG DSN I	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	POLULUWA	AE	086	12,000	s/d	17,000		14,000
004	POLULUWA	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	TRAN SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	TRANS SULAWESI	AA	090	2,900	s/d	4,100		3,500
004	TRANS SULAWESI	AE	086	12,000	s/d	17,000		14,000
005	JL DUSUN	AH	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	JL KOLONISASI	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL LORONG	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL LORONG DSN 2 ILOHUTODE	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL LORONG DSN 2 ILOHUTODE	AH	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	JL LORONG TARAYE	AH	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	JL PANTAI	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL PANTAI	AH	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	JL PANTAI HUTAMONU	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL TANJUNG BATU	AA	090	2,900	s/d	4,100		3,500
005	JL TARAYE	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL TRANS SULAWESI	AE	086	12,000	s/d	17,000		14,000
005	JL TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000
005	JL TRANS SULAWESI	AH	088	5,900	s/d	8,400		7,150
005	TARAYE	AG	089	4,100	s/d	5,900		5,000

KABAG HUKUM	SEKRETARIS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 060-BOTUMOITO
KELURAHAN: 05- BOTUMOITO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN III	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DSN IV MEBONGO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN IV MEBONGO	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DSN MEBONGO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN MEBONGO	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DSN VI MEBONGO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN VI MEBONGO	AD	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DSN VI MEBONGO	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DSN VI MEBONGO	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN III	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN III	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN JJJ	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN MEBONGO	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL LORONG	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL LORONG DUSUN IV	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL MEBONGO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL MEBONGO	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL MEBONGO	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL TRANS DSN III	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL TRANS DSN III LIMUTUTU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL TRANS SULAWESI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL TRANS SULAWESI	AE	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JLN DUSUN VI MEBONGO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	DSN II	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	DUDUN IV BONTULA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	DUSUN II	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	DUSUN IV BONTULA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN II	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DSN III LIMUTUTU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN IV BONTULA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN IV BONTULA	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DSN IV BONTULA	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DSN IV BONTULA	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL DSN MEBONGO	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150

KA BAG HUKUM	[illegible]	[illegible]	SEKDA	WABUP

002	JL DSN VI MEBONGO	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DSN VI MEBONGO	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DSN VI MEBONGO	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DSN VI MEBONGO	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL DUSUN II	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN II	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL DUSUN II	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DUSUN II	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL DUSUN II	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL LORONG	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL LORONG	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL LORONG	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL LORONG	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL LORONG DSN III	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL LORONG DSN IV	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL LORONG DSN IV	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL LORONG DSN IV	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL LORONG DSN IV BONTULA	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL LORONG DSN IV BONTULA	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL TRANS DSN III LIMUTUTU	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL TRANS DUSUN I	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL TRANS DUSUN II	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL TRANS DUSUN II	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL TRANS DUSUN III	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL TRANS DUSUN III	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL TRANS SULAWESI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL TRANS SULAWESI	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	JL TRANS SULAWESI	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL TRANS SULAWESI	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL TRANS SULAWESI DSN IV	AG	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL. TRANS SULAWESI	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JLN DUSUN IV	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	LORONG DSN IV BONTULA	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	TRANS SULAWESI DSN IV	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
002	TRANS SULAWESI DSN IV	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DSN I PATOABINTALO	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DSN III LIMUTUTU	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN I	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL DUSUN I	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN I	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150

KABAG HUKUM	KOMANDAN KANTOR	AJUN	SEKDA	WABUP

003	JL DUSUN I	AK	091	2,000	s/d	2,900		2,450
003	JL DUSUN I	AL	087	8,400	s/d	12,000		10,000
003	JL LORONG	AK	091	2,000	s/d	2,900		2,450
003	JL LORONG DSN III	AI	090	2,900	s/d	4,100		3,500
003	JL LORONG DSN III	AK	091	2,000	s/d	2,900		2,450
003	JL TRANS DSN III LIMUTUTU	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
003	JL TRANS DSN III LIMUTUTU	AK	091	2,000	s/d	2,900		2,450
003	JL TRANS DUSUN I	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
003	JL TRANS DUSUN II	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
003	JL TRANS SULAWESI	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
003	JL TRANS SULAWESI	AK	091	2,000	s/d	2,900		2,450
003	JL.TRANS	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
004	DSN I PATOABINDALO	AG	085	17,000	s/d	23,000		20,000
004	DSN I PATOABINTALO	AK	091	2,000	s/d	2,900		2,450
004	DUSUN I	AM	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	JL DSN I	AL	087	8,400	s/d	12,000		10,000
004	JL DSN III	AK	091	2,000	s/d	2,900		2,450
004	JL DSN III LIMUTU	AK	091	2,000	s/d	2,900		2,450
004	JL DSN III LIMUTUTU	AG	085	17,000	s/d	23,000		20,000
004	JL DSN III LIMUTUTU	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
004	JL DSN III LIMUTUTU	AK	091	2,000	s/d	2,900		2,450
004	JL DSN III LIMUTUTU	AM	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	JL DSN VI MEBONGO	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
004	JL DSN VI MEBONGO	AM	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	JL DUSUN I	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
004	JL DUSUN I	AK	091	2,000	s/d	2,900		2,450
004	JL DUSUN I	AL	087	8,400	s/d	12,000		10,000
004	JL DUSUN I	AM	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	JL DUSUN IV	AM	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	JL LORONG	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
004	JL LORONG	AK	091	2,000	s/d	2,900		2,450
004	JL LORONG DSN III	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
004	JL LORONG DSN III	AK	091	2,000	s/d	2,900		2,450
004	JL LORONG DSN III	AM	089	4,100	s/d	5,900		5,000
004	JL LORONG DSN III LIMUTUTU	AK	091	2,000	s/d	2,900		2,450
004	JL LORONG DSN IV	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
004	JL TRANS DSN II	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
004	JL TRANS DSN III	AG	085	17,000	s/d	23,000		20,000
004	JL TRANS DSN III	AH	084	23,000	s/d	31,000		27,000
004	JL TRANS DSN III LIMUTUTU	AG	085	17,000	s/d	23,000		20,000

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL TRANS DSN III LIMUTUTU	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL TRANS DSN III LIMUTUTU	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL TRANS DUSUN I	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL TRANS DUSUN II	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL TRANS SULAWESI	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL TRANS SULAWESI	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JLN DSN II BOTUDULUWO	AL	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JLN DSN III LIMUTUTU	AH	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JLN DSN III LIMUTUTU	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JLN DSN III LIMUTUTU	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JLN LORONG	AK	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 060-BOTUMOITO
KELURAHAN: 06- TUTULO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	DSN 1 HALABOLU	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	DSN HALABOLU	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	DSN I HALABOLU	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	DSN I HALABOLU	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DESA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DESA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DESA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DESA	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN I HALABOLU	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN I	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL PASAR	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL PASAR	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TRANS SULAWESI	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL TRANS SULAWESI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TRANS SULAWESI	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL. TRANS. SULAWESI	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JLN DESA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL PASAR	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL PASAR	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL TRANS SULAWESI	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DESA	AG	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DESA	AJ	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DESA	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL SMA	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL SMA	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL SMA	AL	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL SMA	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS SULAWESI	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL TRANS SULAWESI	AJ	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TRANS SULAWESI	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS SULAWESI	AM	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

003	JL TRANS SULAWESI	AP	084	23,000	s/d	31,000	27,000
003	JL.TRANS SULAWESI	AP	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	DSN IV MOOTINELO	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	DSN MOOTINELO	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DSN IV MOOTILANGO	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DSN IV MOOTINELO	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DSN MOOTINELO	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN IV	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN IV	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN IV	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL PANTAI	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL PANTAI DUSUN IV	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL TRANS SULAWESI	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL TRANS SULAWESI	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL TRANS SULAWESI	AC	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL PELABUHAN	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL PELABUHAN	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL PELABUHAN	AN	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL PELABUHAN	AO	085	17,000	s/d	23,000	20,000

KA BAG HUKUM	KABAGBAGIAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 060-BOTUMOITO
KELURAHAN: 07- PATOAMEME

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DESA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DSN BAALA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN BA'ALA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN BAALA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN I LOMULI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL TRANS	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL TRANS DUSUN LOMULI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DESA	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DSN BAALA	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN BA'ALA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN BA'ALA	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL DUSUN BA'ALA	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN BA'ALA	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL HALABOLU	AC	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL HALABOLU	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL KEBUN	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL TRANS	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL TRANS	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL TRANS	AG	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL TRANS SULAWESI	AG	084	23,000	s/d	31,000	27,000
002	JL TRANS	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN BA'ALA	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN BA'ALA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN BA'ALA	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL KEBUN	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL TRANS	AG	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	DESA PATOAMEME	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DSN IV MILANGO	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DUSUN	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN	AN	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

004	JL KEBUN	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL PATOA BANDERA	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL PATOA BANDERA	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL PATOA BANDERA	AN	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL PATOAMEME	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL PELABUHAN	AG	084	23,000	s/d	31,000	27,000
004	JL PELABUHAN	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL PELABUHAN	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL PELABUHAN	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL PELABUHAN	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL PELABUHAN	AN	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL TRANS	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL PELABUHAN	AH	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL DSN I LOMULI	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL DUSUN LOMULI	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL FLAMBOYAN	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL FLAMBOYAN	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
005	JL KEBUN	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL PATOA BANDERA	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL TRANS	AG	084	23,000	s/d	31,000	27,000
005	JL TRANS	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
005	JL TRANS SULAWESI	AJ	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL ANGGREK	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL DESA	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL FLAMBOYAN	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
006	JL KEBUN	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL PATOA BANDERA	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL TRANS	AG	084	23,000	s/d	31,000	27,000
006	JL TRANS	AK	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL TRANS	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL DESA	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL DN TUWODU	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL DSN TUWODU	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL KEBUN	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL MELATI	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL PATOA BANDERA	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL PATOA BANDERA	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL PELABUHAN	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL TRANS	AG	084	23,000	s/d	31,000	27,000
007	JL TRANS	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	ASISTEN ADM UMUM	ASS II	SEKDA	WABUP

007	JL.DESA	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	DSN LOMULI	AN	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DSN TUWODU	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DUSUN TUMODU	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DUSUN TUMODU	AN	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL PATOA BANDERA	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL PATOA HAIPI	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL TRANS	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL TRANS	AN	091	2,000	s/d	2,900	2,450
008	JL DUSUN TUMODU	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
009	JL PATOA BANDERA	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
009	JL TRANS	AM	088	5,900	s/d	8,400	7,150
009	JL TRANS	AN	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KA BAG HUKUM	DPMPMPTSP KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 060-BOTUMOITO
KELURAHAN: 08- POTANGA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DESA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DESA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DSN TOMBAHA	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL TRANS	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
001	JL TRANS SULAWESI	AD	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL TRANS SULAWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
002	JL KEBUN	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TRANS SULAWESI	AD	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL TRANS SULAWESI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL TRANS SULAWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL DESA	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
003	JL TRANS SULAWESI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL TRANS SULAWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL DESA	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DESA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL KEBUN	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL TRANS	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL TRANS	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL TRANS SULAWESI	AA	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL TRANS SULAWESI	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL TRANS SULAWESI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL TRANS SULAWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
004	JL TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DESA	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL TRANS SULAWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
005	JL TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN II LEA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL TRANS	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL TRANS	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL TRANS SULAWESI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
006	JL TRANS SULAWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
006	JL TRANS SULAWESI	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN II LEA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
007	JL DSN III	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150

KA BAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

007	JL DUSUN III BULALO	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
007	JL TRANS	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL TRANS	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL TRANS SULAWESI	AF	085	17,000	s/d	23,000	20,000
007	JL TRANS SULAWESI	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL TRANS SULAWESI	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DSN IV HUATA	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DESA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL DESA	AH	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL DESA	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DSN HUATA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL DSN IV HUATA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL DSN TUTULOA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL TRANS SULAWESI	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500
008	JL TRANS SULAWESI	AI	088	5,900	s/d	8,400	7,150
008	JL DESA	AE	090	2,900	s/d	4,100	3,500

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 060-BOTUMOITO
KELURAHAN: 09- DULANGEYA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JL TRANS SULAWESI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL TRANS SULAWESI	AF	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL TRANS SULAWESI	AG	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL TRANS SULAWESI	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JLN TANI	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	JLN TRANS	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
001	TRANS. SULAWESI	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JL TRANS	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL TRANS SULAWESI	AA	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL TRANS SULAWESI	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL TRANS SULAWESI	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
002	JLN DESA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JLN TRANS SULAWESI	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL DUSUN I	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TANI	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TRANS SULAWESI	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL TRANS SULAWESI	AC	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL TRANS SULAWESI	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL TRANS SULAWESI	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000
003	JL TRANS SULAWESI	AI	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL TRANS SULAWESI	AJ	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL.TRANS	AD	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL.TRANS	AH	086	12,000	s/d	17,000	14,000

KA BAG HUKUM	DRH SEKDA BANTUR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 070-PAGUYAMAN PANTAI
KELURAHAN: 01- LIMBATIHU

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL BENGAWAN	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL BENGAWAN	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN BUNTULIA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN BUNTULIA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN BUNTULIA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN BUNTULIA	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DUSUN BUNTULIA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN BONTULA	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DUSUN LIMBA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN LIMBA	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DUSUN LIMBA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN LIMBA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN LOMULI	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
005	JL DUSUN LOMULI	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
006	JL DUSUN TIHU	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
006	JL DUSUN TIHU	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN TIHU	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN TIHU	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL DUSUN TIHU	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
008	JL DUSUN LOMULI	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JL DUSUN LIMBA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	JL DUSUN LIMBA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
009	JL DUSUN LIMBA	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
009	JL DUSUN LIMBA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
009	JL DUSUN LIMBA	AG	088	5,900	s/d	8,400	7,150
009	JL DUSUN LOMULI	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 070-PAGUYAMAN PANTAI
KELURAHAN: 02- BIJBAA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN ILOHELUMA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN ILOHELUMA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN ILOHELUMA	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN ILOHELUMA	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
001	JL DUSUN ILOHELUMA	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN ILOHELUMA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN ILOHELUMA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DESA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN ILOHELUMA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN ILOHELUMA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN ILOHELUMA	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
002	JL DUSUN ILOHELUMA	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN ILOHELUMA	AF	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN ILOHELUMA	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN JAYA KARYA	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN JAYA KARYA	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN ILOHELUMA	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN JAYA KARYA	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN PADAT KARYA	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
003	JL DUSUN PADAT KARYA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN PADAT KARYA	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN PADAT KARYA	AK	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN PADAT KARYA	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN PADAT KARYA	AM	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN JAYA KARYA	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN JAYA KARYA	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN JAYA KARYA	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
004	JL DUSUN JAYA KARYA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN JAYA KARYA	AH	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DUSUN JAYA KARYA	AL	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DUSUN JAYA KARYA	AN	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DESA	AJ	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DSN SUMBER KARYA	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000
005	JL DSN SUMBER KARYA	AI	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN SUMBER KARYA	AC	087	8,400	s/d	12,000	10,000

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 070-PAGUYAMAN PANTAI
KELURAHAN: 03- LITO

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DESA	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
001	JL DUSUN	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL KEBUN	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL KEBUN	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL KEBUN	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL KEBUN	AH	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL KEBUN	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL KEBUN	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DESA	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DESA	AH	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL KEBUN	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL KEBUN	AH	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DESA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DESA	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL DESA	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL DESA	AH	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DUSUN	AE	088	5,900	s/d	8,400	7,150
004	JL KEBUN	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL KEBUN	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL KEBUN	AG	090	2,900	s/d	4,100	3,500
004	JL KEBUN	AH	092	1,400	s/d	2,000	1,700

KABAG HUKUM			SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 070-PAGUYAMAN PANTAI
KELURAHAN: 04- BUKIT KARYA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN III TOHUPO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DUSUN III TOHUPO	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN III TOHUPO	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN III TOHUPO	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN III TOHUPO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN III TOHUPO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN III TOHUPO	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DUSUN III TOHUPO	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DUSUN III TOHUPO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN III TOHUPO	AD	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN III TOHUPO	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DUSUN III TOHUPO	AJ	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DUSUN II DUDEPO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN I TUMBA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN I TUMBA	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DUSUN I TUMBA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
004	JL DUSUN I TUMBA	AJ	092	1,400	s/d	2,000	1,700
004	JL DUSUN I TUMBA	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN I TUMBA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
005	JL DUSUN I TUMBA	AF	089	4,100	s/d	5,900	5,000
005	JL DUSUN I TUMBA	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
005	JL DUSUN I TUMBA	AH	092	1,400	s/d	2,000	1,700
006	JL DUSUN II DUDEPO	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
006	JL DUSUN II DUDEPO	AH	092	1,400	s/d	2,000	1,700
006	JL DUSUN II DUDEPO	AI	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN II DUDEPO	AB	091	2,000	s/d	2,900	2,450
007	JL DUSUN II DUDEPO	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
007	JL DUSUN II DUDEPO	AI	089	4,100	s/d	5,900	5,000
007	JL DUSUN II DUDEPO	AJ	092	1,400	s/d	2,000	1,700

KA BAG HUKUM	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 070-PAGUYAMAN PANTAI
KELURAHAN: 05- APITALAWU

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN TUMBA	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN TUMBA	AD	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN BATU JAJAR	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN BATU JAJAR	AC	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN LEYANGO	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN LEYANGO	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DUSUN LEYANGO	AB	088	5,900	s/d	8,400	7,150
003	JL DUSUN LEYANGO	AE	091	2,000	s/d	2,900	2,450

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 070-PAGUYAMAN PANTAI
KELURAHAN: 06- TOWAYU

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DESA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
001	JL DESA	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DESA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
002	JL DESA	AC	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DESA	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DESA	AB	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA	AD	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DESA	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000
003	JL DUSUN 1	AE	089	4,100	s/d	5,900	5,000

KA BAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 070-PAGUYAMAN PANTAI
KELURAHAN: 07- OLIBUU

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL DUSUN KARANG INDAH	AA	092	1,400	s/d	2,000	1,700
001	JL DUSUN KARANG INDAH	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
001	JL DUSUN KARANG INDAH	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
001	JL DUSUN KARANG INDAH	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
002	JL DUSUN OLIBUU	AB	089	4,100	s/d	5,900	5,000
002	JL DUSUN OLIBUU	AC	092	1,400	s/d	2,000	1,700
002	JL DUSUN OLIBUU	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DESA	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DUSUN MOMBINGE	AD	091	2,000	s/d	2,900	2,450
003	JL DUSUN MOMBINGE	AE	092	1,400	s/d	2,000	1,700
003	JL DUSUN MOMBINGE	AF	090	2,900	s/d	4,100	3,500
003	JL DUSUN MOMBINGE	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN KARANG INDAH	AG	091	2,000	s/d	2,900	2,450
004	JL DUSUN KARANG INDAH	AH	092	1,400	s/d	2,000	1,700

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PROVINSI: 75-GORONTALO
KAB/KOTA: 01-BOALEMO

KECAMATAN: 070-PAGUYAMAN PANTAI
KELURAHAN: 08- BANGGA

BLK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGGOLONGAN NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)			KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
001	JL AMD DSN HUIDU	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL AMD DUSUN HUIDU	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
001	JL DSN HUIDU	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL DUSUN HUIDU	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
001	JL DUSUN HUIDU	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL AMD DUSUN HUIDU	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL AMD DUSUN HUIDU	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL AMD DUSUN HUIDU	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
002	JL DUSUN	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL DUSUN HUIDU	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
002	JL DUSUN HUIDU	AB	091	2.000	s/d	2.900	2.450
002	JL DUSUN HUIDU	AC	090	2.900	s/d	4.100	3.500
003	JL DUSUN PANGATO	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
003	JL DUSUN PANGATO	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500
004	JL DUSUN KARANG INDAH	AA	092	1.400	s/d	2.000	1.700
004	JL DUSUN KARANG INDAH	AD	090	2.900	s/d	4.100	3.500

KABAG HUKUM	UMUM/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR ...22...TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KLASIFIKASI DAN BESARAN NJOP BANGUNAN

KLASIFIKASI HARGA DAN KLAS BANGUNAN PER METER PERSGI

KELAS BANGUNAN	TAHUN AWAL BANGUNAN	TAHUN AKHIR BANGUNAN	NILAI MINIMAL BANGUNAN	NILAI MAXIMAL BANGUNAN	NILAI PER M2 BANGUNAN (Rp.1000)
001	2011	9999	14700	15800	15250
002	2011	9999	13600	14700	14150
003	2011	9999	12550	13600	13075
004	2011	9999	11550	12550	12050
005	2011	9999	10600	11550	11075
006	2011	9999	9700	10600	10150
007	2011	9999	8850	9700	9275
008	2011	9999	8050	8850	8450
009	2011	9999	7300	8050	7675
010	2011	9999	6600	7300	6950
011	2011	9999	5850	6600	6225
012	2011	9999	5150	5850	5500
013	2011	9999	4500	5150	4825
014	2011	9999	3900	4500	4200
015	2011	9999	3350	3900	3625
016	2011	9999	2850	3350	3100
017	2011	9999	2400	2850	2625
018	2011	9999	2000	2400	2200
019	2011	9999	1666	2000	1833
020	2011	9999	1366	1666	1516
021	2011	9999	1034	1366	1200
022	2011	9999	902	1034	968
023	2011	9999	744	902	823
024	2011	9999	656	744	700
025	2011	9999	534	656	595
026	2011	9999	476	534	505
027	2011	9999	382	476	429
028	2011	9999	348	382	365
029	2011	9999	272	348	310
030	2011	9999	256	272	264
031	2011	9999	194	256	225
032	2011	9999	188	194	191
033	2011	9999	136	188	162
034	2011	9999	128	136	132
035	2011	9999	104	128	116
036	2011	9999	92	104	98
037	2011	9999	74	92	83
038	2011	9999	68	74	71
039	2011	9999	52	68	60
040	2011	9999	0	52	50

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN BOALEMO

NO	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS / TYPE / VOL	LANTAI / TINGGI KLM	NILAI (Rp. 1.000)
1	KOMPONEN UTAMA			
	PERUMAHAN	0 s.d 69	1 s.d 1	510
	PERUMAHAN	70 s.d 99	1 s.d 1	658
	PERUMAHAN	100 s.d 149	1 s.d 1	671
	PERUMAHAN	150 s.d 224	1 s.d 1	807
	PERUMAHAN	225 s.d 299	1 s.d 1	920
	PERUMAHAN	300 s.d 449	1 s.d 1	977
	PERUMAHAN	450 s.d 549	1 s.d 1	1.049
	PERUMAHAN	550 s.d 9999	1 s.d 1	1.086
	PERUMAHAN	0 s.d 69	2 s.d 999	510
	PERUMAHAN	70 s.d 99	2 s.d 999	671
	PERUMAHAN	100 s.d 149	2 s.d 999	899
	PERUMAHAN	150 s.d 224	2 s.d 999	1.119
	PERUMAHAN	225 s.d 299	2 s.d 999	1.294
	PERUMAHAN	300 s.d 449	2 s.d 999	1.535
	PERUMAHAN	450 s.d 549	2 s.d 999	1.772
	PERUMAHAN	550 s.d 9999	2 s.d 999	1.912
	PERKANTORAN SWASTA	0 s.d 69	1 s.d 1	510
	PERKANTORAN SWASTA	70 s.d 99	1 s.d 1	658
	PERKANTORAN SWASTA	100 s.d 149	1 s.d 1	671
	PERKANTORAN SWASTA	150 s.d 224	1 s.d 1	807
	PERKANTORAN SWASTA	225 s.d 299	1 s.d 1	920
	PERKANTORAN SWASTA	300 s.d 449	1 s.d 1	977
	PERKANTORAN SWASTA	450 s.d 649	1 s.d 1	1.049
	PERKANTORAN SWASTA	650 s.d 9999	1 s.d 1	1.086
	PERKANTORAN SWASTA	0 s.d 69	2 s.d 4	510
	PERKANTORAN SWASTA	70 s.d 99	2 s.d 4	671
	PERKANTORAN SWASTA	100 s.d 149	2 s.d 4	899
	PERKANTORAN SWASTA	150 s.d 224	2 s.d 4	1.139
	PERKANTORAN SWASTA	225 s.d 299	2 s.d 4	1.224
	PERKANTORAN SWASTA	300 s.d 449	2 s.d 4	1.371
	PERKANTORAN SWASTA	450 s.d 649	2 s.d 4	1.498
	PERKANTORAN SWASTA	650 s.d 9999	2 s.d 4	1.628
	RUMAH SAKIT/KLINIK	0 s.d 69	1 s.d 1	612
	RUMAH SAKIT/KLINIK	70 s.d 99	1 s.d 1	790
	RUMAH SAKIT/KLINIK	100 s.d 149	1 s.d 1	805
	RUMAH SAKIT/KLINIK	150 s.d 224	1 s.d 1	968
	RUMAH SAKIT/KLINIK	225 s.d 299	1 s.d 1	1.104
	RUMAH SAKIT/KLINIK	300 s.d 449	1 s.d 1	1.172
	RUMAH SAKIT/KLINIK	450 s.d 649	1 s.d 1	1.259
	RUMAH SAKIT/KLINIK	650 s.d 9999	1 s.d 1	1.303
	RUMAH SAKIT/KLINIK	0 s.d 69	2 s.d 4	612
	RUMAH SAKIT/KLINIK	70 s.d 99	2 s.d 4	805
	RUMAH SAKIT/KLINIK	100 s.d 149	2 s.d 4	1.079
	RUMAH SAKIT/KLINIK	150 s.d 224	2 s.d 4	1.367
	RUMAH SAKIT/KLINIK	225 s.d 299	2 s.d 4	1.469
	RUMAH SAKIT/KLINIK	300 s.d 449	2 s.d 4	1.645
	RUMAH SAKIT/KLINIK	450 s.d 649	2 s.d 4	1.798
	RUMAH SAKIT/KLINIK	650 s.d 9999	2 s.d 4	1.954
	BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN/DAYA DUKUNG	0 s.d 9	0 s.d 4	430
		0 s.d 9	5 s.d 7	545
		0 s.d 9	8 s.d 10	679
		0 s.d 9	11 s.d 99	879
		10 s.d 13	0 s.d 4	473
		10 s.d 13	5 s.d 7	574
		10 s.d 13	8 s.d 10	712
		10 s.d 13	11 s.d 99	885
		14 s.d 17	0 s.d 4	511
		14 s.d 17	5 s.d 7	605
		14 s.d 17	8 s.d 10	746
		14 s.d 17	11 s.d 99	903

KABAG HUKUM	DINAS/UNIT KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

KLASIFIKASI JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN

NO	KOMPONEN JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS / TYPE / VOL	LANTAI / TINGGI KLM	NILAI (Rp. 1.000)
		18 s.d 21	0 s.d 4	557
		18 s.d 21	5 s.d 7	647
		18 s.d 21	8 s.d 10	783
		18 s.d 21	11 s.d 99	926
		22 s.d 25	0 s.d 4	611
		22 s.d 25	5 s.d 7	699
		22 s.d 25	8 s.d 10	833
		22 s.d 25	11 s.d 99	958
		26 s.d 29	0 s.d 4	679
		26 s.d 29	5 s.d 7	766
		26 s.d 29	*8 s.d 10*	*901*
		26 s.d 29	11 s.d 99	1.012
		30 s.d 33	0 s.d 4	774
		30 s.d 33	5 s.d 7	862
		30 s.d 33	8 s.d 10	1.001
		30 s.d 33	11 s.d 99	1.105
		34 s.d 37	0 s.d 4	875
		34 s.d 37	5 s.d 7	967
		34 s.d 37	8 s.d 10	1.117
		34 s.d 37	11 s.d 99	1.219
		38 s.d 99	0 s.d 4	993
		38 s.d 99	5 s.d 7	1.095
		38 s.d 99	8 s.d 10	1.252
		38 s.d 99	11 s.d 99	1.351

	PABRIK	0 s.d 9	0 s.d 4	559
		0 s.d 9	5 s.d 7	709
		0 s.d 9	8 s.d 10	883
		0 s.d 9	11 s.d 99	1.143
		10 s.d 13	0 s.d 4	615
		10 s.d 13	5 s.d 7	746
		10 s.d 13	8 s.d 10	926
		10 s.d 13	11 s.d 99	1.151
		14 s.d 17	0 s.d 4	664
		14 s.d 17	5 s.d 7	787
		14 s.d 17	8 s.d 10	970
		14 s.d 17	11 s.d 99	1.174
		18 s.d 21	0 s.d 4	724
		18 s.d 21	5 s.d 7	841
		18 s.d 21	8 s.d 10	1.018
		18 s.d 21	11 s.d 99	1.204
		22 s.d 25	0 s.d 4	794
		22 s.d 25	5 s.d 7	909
		22 s.d 25	8 s.d 10	1.083
		22 s.d 25	11 s.d 99	1.245
		26 s.d 29	0 s.d 4	883
		26 s.d 29	5 s.d 7	996
		26 s.d 29	8 s.d 10	1.171
		26 s.d 29	*11 s.d 99*	*1.316*
		30 s.d 33	0 s.d 4	1.006
		30 s.d 33	5 s.d 7	1.121
		30 s.d 33	8 s.d 10	1.301
		30 s.d 33	11 s.d 99	1.437
		34 s.d 37	0 s.d 4	1.138
		34 s.d 37	5 s.d 7	1.257
		34 s.d 37	8 s.d 10	1.452
		34 s.d 37	11 s.d 99	1.585

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

		38 s.d 99	0 s.d 4	1.291
		38 s.d 99	5 s.d 7	1.424
		38 s.d 99	8 s.d 10	1.628
		38 s.d 99	11 s.d 99	1.756
	PERKANTORAN	1	6 s.d 12	1.365
		1	13 s.d 19	1.525
		1	20 s.d 24	1.630
		1	25 s.d 99	1.805
		2	6 s.d 12	1.150
		2	13 s.d 19	1.300
		2	20 s.d 24	1.400
		2	25 s.d 99	1.560
		3	1 s.d 2	575
		3	3 s.d 5	715
		3	6 s.d 12	895
		3	13 s.d 19	1.045
		4	1 s.d 2	465
		4	3 s.d 5	555
	TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO	1	3 s.d 4	1.130
		1	5 s.d 99	1.290
		2	1 s.d 2	584
		2	3 s.d 4	703
		2	5 s.d 99	869
		3	1 s.d 2	465
	RUMAH SAKIT/KLINIK	1	3 s.d 5	1.245
		1	6 s.d 99	1.395
		2	1 s.d 2	720
		2	3 s.d 5	865
		2	6 s.d 99	1.040
		3	1 s.d 2	577
		3	3 s.d 5	669
		4	1 s.d 2	482

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

	OLAH RAGA/REKREASI	1		800
		2		550
	GEDUNG PEMERINTAHAN	1	6 s.d 12	1.365
		1	13 s.d 19	1.525
		1	20 s.d 24	1.630
		1	25 s.d 99	1.805
		2	6 s.d 12	1.150
		2	13 s.d 19	1.300
		2	20 s.d 24	1.400
		2	25 s.d 99	1.560
		3	1 s.d 2	575
		3	3 s.d 5	715
		3	6 s.d 12	895
		3	13 s.d 19	1.045
		4	1 s.d 2	465
		4	3 s.d 5	555
	HOTEL	*1 s.d 1*	*3 s.d 5*	*1.430*
		1 s.d 1	6 s.d 12	1.530
		1 s.d 1	13 s.d 20	1.670
		1 s.d 1	21 s.d 24	1.760
		1 s.d 1	25 s.d 99	1.915
		1 s.d 2	3 s.d 5	1.285
		1 s.d 2	6 s.d 12	1.375
		1 s.d 2	13 s.d 20	1.510
		1 s.d 2	21 s.d 24	1.610
		1 s.d 2	25 s.d 99	1.745
		1 s.d 3	1 s.d 2	810
		1 s.d 3	3 s.d 5	845
		1 s.d 3	6 s.d 12	1.030
		1 s.d 3	13 s.d 20	1.170

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

		1 s.d 4	1 s.d 2	735
		1 s.d 4	3 s.d 5	795
		1 s.d 4	6 s.d 12	985
		1 s.d 5	1 s.d 2	645
		1 s.d 5	3 s.d 5	710
		1 s.d 5	6 s.d 12	870
		2 s.d 1	1 s.d 2	1.575
		2 s.d 1	3 s.d 5	1.585
		2 s.d 1	6 s.d 12	1.625
		2 s.d 2	1 s.d 2	1.405
		2 s.d 2	3 s.d 5	1.425
		2 s.d 2	6 s.d 12	1.460
		2 s.d 3	1 s.d 2	825
		2 s.d 3	3 s.d 5	915
		2 s.d 3	6 s.d 12	1.120
		2 s.d 4	1 s.d 2	645
		2 s.d 4	3 s.d 5	785
		2 s.d 4	6 s.d 12	995
		2 s.d 5	1 s.d 2	590
		2 s.d 5	3 s.d 5	730
	PARKIR	1		450
		2		550
		3		600
		4		750
	APARTEMEN	1	6 s.d 12	1.455
		1	13 s.d 20	1.605
		1	21 s.d 24	1.690
		1	25 s.d 99	1.860
		2	3 s.d 5	1.235
		2	6 s.d 12	1.305
		2	13 s.d 20	1.435
		2	21 s.d 24	1.540
		2	25 s.d 99	1.690

		3	1 s.d 2	795
		3	3 s.d 5	845
		3	6 s.d 12	1.030
		3	13 s.d 20	1.170
		4	1 s.d 2	730
		4	3 s.d 5	800
		4	6 s.d 12	985
	GEDUNG SEKOLAH	1	1 s.d 2	530
		1	3 s.d 5	610
		1	6 s.d 99	780
		2	1 s.d 2	410
		2	3 s.d 5	500
	MEZANIN			300
	POMPA BENSIN			300
	TANGKI DIATAS TANAH	0 s.d 50		36.121
		51 s.d 75		45.770
		76 s.d 100		56.020
		101 s.d 150		76.245
		151 s.d 200		90.705
		201 s.d 250		105.636
		251 s.d 500		171.897
		501 s.d 750		228.631
		751 s.d 1250		339.360
		1251 s.d 1500		386.669
		1501 s.d 1750		429.739
		1751 s.d 2000		474.470
		2001 s.d 2250		517.980
		2251 s.d 2500		560.782
		2501 s.d 2700		603.120
		2701 s.d 3000		662.141
		3001 s.d 3500		743.650

KARAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

		3501 s.d 4000		825.626
		4001 s.d 4500		903.290
		4501 s.d 5000		1.103.431
		5001 s.d 6000		1.215.796
		6001 s.d 7000		1.381.037
		7001 s.d 8000		1.537.589
		8001 s.d 9000		1.692.595
		9001 s.d 10000		1.790.367
		10001 s.d 12500		2.154.578
		12501 s.d 15000		2.505.281
		15001 s.d 17500		2.855.882
		17501 s.d 99999		3.076.793
	TANGKI DIBAWAH TANAH	0 s.d 1		2.076
		2 s.d 3		4.070
		4 s.d 5		5.086
		6 s.d 7		6.548
		8 s.d 10		8.854
		11 s.d 13		11.281
		14 s.d 16		13.550
		17 s.d 20		17.026
		21 s.d 25		20.525
		26 s.d 30		24.284
		31 s.d 40		28.281
		41 s.d 50		34.378
		51 s.d 60		40.992
		61 s.d 80		57.930
		81 s.d 99999		71.341

KABAG HUKUM	DINAS/BAGIAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR .....22..... TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

Nomor Formulir

Tep. (0443)

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK /RETRIBUSI PRIBADI

Kepada Yth

Di

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda (pada kotak*) ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada petugas atau dikirim lewat pos paling lambat tgl

DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI PRIBADI

1. Nama Lengkap
2. Kewarga Negaraan
3. Alamat Tempat Tinggal
   - Jalan / No
   - RT/RW/Blok
   - Desa/Kelurahan
   - Kecamatan
   - Kabupaten/Kotamadya
   - Nomor Telepon
   - Kode Pos
4. Tanda Bukti Diri
5. No. dan Tgl. Tanda bukti diri (Fotocopy dilampirkan)
6. No. dan Tgl. Kartu Keluarga (Fotocopy dilampirkan)
7. Pekerjaan/Usaha*) ☐ Pegawai Negeri ☐ Pegawai Swasta ☐ A B R I ☐ Pemilik Usaha ☐
8. Nama / alamat tempat pekerjaan atau Usaha
9. Alamat (dari No. 8)

Tahun

Nama Jelas

Tanda Tangan

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

diterima tanggal

Nama jelas/NIP

Tanda Tangan

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWPD yang diberikan

☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

NPWRD yang diberikan

☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Nama Jelas /NIP

Tanda Tangan

Mode : DPD 01A

Gunting disini

No. Formulir

TANDA TERIMA

Nama

Alamat

Tahun

Yang Menerima

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR
.22...TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

(1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) yaitu:NSR = NJOPR + NSL.

(2) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) diperoleh dari hasil perkalian antara luas reklame dengan besaran Nilai Pokok Obyek Reklame (NPOR), yaitu:
NJOPR = Luas Reklame x NPOR.

(3) Nilai Strategi Lokasi (NSL) diperoleh dari hasil perkalian antara Harga Titik (HT) dan Nilai Titik (NT), yaitu:NSL = HT x NT.

(4) Nilai Titik (NT) diperoleh dari hasil perhitungan berdasarkan bobot dan score pemasangan reklame.

(5) Harga Titik (HT) ditetapkan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

(6) Nilai Strategi Lokasi (NSL) ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
a. lokasi reklame;
b. ukuran reklame
c. penempatan reklame; dan
d. kelas jalan.

(7) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada point (7) masing-masing diberi bobot dan score.

(8) Nilai Strategi Lokasi (NSL) adalah jumlah hasil perkalian antara bobot dan score dari masing-masing faktor-faktor sebagaimana *dimaksud pada point (7).*

(9) Bobot sebagaimana dimaksud pada point (8) adalah:
a. lokasi reklame diberi bobot 25% (dua puluh lima persen);
b. ukuran reklame diberi bobot 40% (empat puluh persen);
c. penempatan reklame diberi bobot 20% (dua puluh persen); dan
d. kelas jalan diberi bobot 15% (lima belas persen).

BAGIAN HUKUM	SINKRONISASI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

(10) Lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam point (7)) huruf a adalah lokasi pemasangan reklame pada tempat keramaian umum, jalan umum, lokasi perkantoran dan di tempat usaha.

(11) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam point (7) huruf b adalah luas atau besaran reklame yang dihitung dalam satuan meter bujursangkar (m^2).

(12) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam point (7) huruf c adalah penempatan pada posisi atau arah yang dapat dilihat dari sudut pandang satu arah, dua arah, tiga arah, atau empat arah.

(13) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam point (7) huruf d adalah kelas jalan yang dimanfaatkan untuk lokasi pemasangan reklame.

(14) Score masing-masing faktor sebagaimana dimaksud dalam point (8) ditetapkan dengan angka indeks yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor

(15) Nilai Sewa Reklame untuk reklame tempel, stiker dan selebaran serta poster perhitungannya dilakukan atas dasar jumlah lembaran reklame dengan Nilai Pokok Obyek Reklame (NPOR).

(16) Nilai Sewa Reklame untuk reklame kain dan reklame kendaraan perhitungannya dilakukan atas dasar luas dengan Nilai Pokok Obyek Reklame (NPOR).

(17) Nilai Sewa Reklame untuk reklame slide dan reklame perhitungannya dilakukan atas dasar jumlah melakukan kegiatan peragaan maupun slide.

(18) Untuk setiap jenis reklame yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol NJOPR ditambah 50 % (lima puluh persen).

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

NILAI POKOK OBYEK REKLAME (NPOR)

NO	JENIS REKLAME	BAHAN / KOMPONEN	NILAI JUAL (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Reklame Papan	Kayu dan sejenisnya	350.000.-	Ditempel, digantung/tahun/m^2
2	Reklame Billboard:			
	a. Billboard ukuran 0,50-3M	Besi/Logam dan sejenisnya	400.000.-	Ditempel, digantung/tahun/m^2
	b. Billboard ukuran >3M	Besi/Logam dan sejenisnya	500.000,-	Ditempel, digantung/tahun/m^2
3	Reklame Billboard bersinar	Elektronik/Logam & sejenisnya	600.000.-	Ditempel, digantung/tahun/m^2
4	Reklame Billboard sejenisnya:	Logam, Plastik, Seng & sejenis	425.000,-	Ditempel, digantung/tahun/m^2
	a. Tim Plat	Kertas, Plastik dan sejenisnya	425.000,-	Ditempel, digantung/tahun/m^2
	b. Shop Sign	Kertas, Plastik dan sejenisnya	200.000,-	Per tahun /m^2
	c. Shop Panting	Kertas, Plastik dan sejenisnya	350.000,-	Per tahun /m^2
5	d. Sun Screen Reklame	Elektronik/Logam & sejenisnya	2.000.000,-	Per tahun / unit
6	Videotron Reklame	Elektronik/Logam & sejenisnya	5.000.000,-	Per tahun / unit
7	Megatron Reklame Kain:			
	a. Spanduk	Kain dan sejenisnya	40.000.-	Perbulan / m^2
	b. Umbul-umbul	Kain dan sejenisnya	40.000.-	Perbulan / m^2
	c. Banner	Kain dan sejenisnya	40.000.-	Perbulan / m^2
8	d. Baliho	kain, plastik dan sejenisnya	40.000.-	Perbulan / m^2
9	Reklame Tempel, Stiker Reklame	kertas, plastik dan sejenisnya	6.000.-	Perbulan / lembar
	Selebaran :	kertas, plastik dan sejenisnya	6.000.-	Perbulan / lembar
10	-. Selebaran	logam, plastik dan sejenisnya	15.000.-	Perbulan / lembar
11	-. Poster	plastik, Gas dan sejenisnya	500.000.-	Pertahun / m^2
12	Reklame Kenderaan	logam/plastik/viberglas	1.000.000.-	Perbulan / m^2
13	Reklame Udara	elektronik/Logam sejenisnya	250.000.-	Perbulan / m^2
14	(Balon) Reklame Apung Reklame Slide Reklame Peragaan	peragaan dan sejenisnya	600.000.-	Perbulan / m^2
			600.000.-	Perhari

BAGIAN HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

BOBOT DAN SCORE MASING-MASING FAKTOR NILAI STRATEGIS

PEMASANGAN REKLAME

NO.	LOKASI PEMASANGAN		LUAS REKLAME		SUDUT PANDANG		KELAS JALAN	
	BOBOT 25%	SCORE	BOBOT 40%	SCORE	BOBOT 20%	SCORE	BOBOT 15%	SCORE
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	TEMPAT PEMBELANJAAN UMUM	18	0,50 m^2 ke bawah	10	1	5	I	20
			0,51 - 1 m^2	12	2	10	II	10
			1,01 - 3 m^2	14	3	15	III	15
			3,01 - 5 m^2	16	4	20	IV	5
			5,01 - 10 m^2	18				
			10 m^2 ke atas	20				
2.	TEMPAT KERAMAIAN UMUM	15	0,50 m^2ke bawah	8				
			0,51 - 1 m^2	10				
			1,01 - 3 m^2	12				
			3,01 - 5 m^2	14				
			5,01 - 10 m^2	16				
			10 m^2 ke atas	18				
3.	JALAN UMUM	12	0,50 m^2ke bawah	6				
			0,51 - 1 m^2	8				
			1,01 - 3 m^2	10				
			3,01 - 5 m^2	12				
			5,01 - 10 m^2	14				
			10 m^2 ke atas	16				
4.	TEMPAT USAHA	3	0,50 m^2ke bawah	1				
			0,51 - 1 m^2	2				
			1,01 - 3 m^2	4				
			3,01 - 5 m^2	6				
			5,01 - 10 m^2	8				
			10 m^2 ke atas	10				

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PERHITUNGAN NILAI REKLAME

NAMA WAJIB PAJAK :
N P W P D :
JENIS OBYEK PAJAK :
UKURAN :
SUDUT PANDANG :
LOKASI PEMASANGAN :
JUMLAH REKLAME :

		BOBOT	X	SKOR
Lokasi Pemasangan	:	25%	X	=
Luas	:	40%	X	=
Sudut Pandang	:	20%	X	=
Klas Jalan	:	15%	X	=
		Nilai Titik (NT)		=

N S P R	=	HT X NT
N J P O R	=	Luas X NPOR
NSR	=	NSPR X NJOPR
PAJAK REKLAME	=	NSR X 25 %

Keterangan	:	
NJOPR	:	Nilai Jual Obyek Pajak Reklame
NPOR	:	Nilai Pokok Obyek Reklame
NSPR	:	Nilai Strategis Pajak Reklame
NSR	:	Nilai Sewa Reklame
HT	:	Harga Titik
NT	:	Nilai Titik

PERHITUNGAN NILAI PENETAPAN REKLAME INSIDENTIL

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWPD :

JENIS REKLAME :

UKURAN :

LUAS REKLAME (M^2)	NPOR	TARIF REKLAME	MASA TAYANG
Panjang x Lebar	40.000	25%	PER BULAN
Nilai Penetapan = Luas X NPOR X Tarif Reklame X Masa Tayang			

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR
..22.... TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga standar per M^3 (RP)	Keterangan
1.	Granit/Andesit		
	- Batu Pecah 1/2 cm	70.000,-	
	- Batu Pecah 1/5 cm	70.000,-	
	- Batu Pecah 3/5 cm	70.000,-	
	- Batu Kali	100.000,-	
2.	Pasir	50.000,-	
3.	Kerikil	80.000,-	
4.	Pasir Kuarsi	40.000,-	
5.	*Tanah Diatome*	20.000,-	
6.	Tanah Liat	20.000,-	
7.	Basal	20.000,-	
8.	Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	50.000,-	

BAGIAN HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 22.....TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT PPDTO

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jln. Merdeka, Limbato - Tilamuta 96271

Website www.bkad.boalemokabgo.id Email bkad@boalemokabgo.id

Tilamuta, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nomor :
Sifat: Rahasia
Lampiran :
Perihal : **Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)**

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Kabupaten
Boalemo Di-
Tilamuta

Bahwa piutang Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya Kepada PUPN/DJKN atas nama.....dengan nomor kode registrasi (jika ada).....Tahun (tercatat).....telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi piutang pajak daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada)

Atas piutang daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana telah dijelaskan diatas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp.....dengan rincian (pokok, bunga/denda/ongkos).

Mengingat penanggung utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan piutang daerah tersebut diatas, kami menyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan/

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya.

KEPALA BPKPD KABUPATEN BOALEMO

.....

Tembusan Yth:

1. Bupati Boalemo di Tilamuta
2. Arsip

BAGIAN HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG

DAFTAR NOMINATIF PIUTANG DAERAH
YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

No	Identitas Penanggung Utang		Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTD			Pengurangan/Penghapusan Setelah PPDTD	Sisa Utang	Ket
					Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Tempat.....Tanggal.....Tahun.....
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

.....

Keterangan
1 Nomor Urut
2 Alamat Penanggung Utang
3 Nama dan Alamat Penanggung Utang
4 Tanggal Pencatatan Piutang pada Neraca (atau pencatatan lain)
5 Tanggal Piutang dinyatakan sebagai Piutan Macet
6 Sebutkan Jenis Mata Uang
7 Tuliskan nominal jumlah utang
8 Tuliskan tanggal pembayaran utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran
9 Tuliskan Jumlah seluruh Pembayaran (jika ada)
10 Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pemabayaran pada kolom 8
11 Isi dengan nomor surat PPDTD
12 Isi dengan tanggal PPDTD
13 Isi dengan instansi pengelola keuangan daerah
14 Isi jumlah pembayaran setelah PPDTD (jika ada)
15 Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTD
16 Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya penanggung utang telah tidak ditemukan keberadaannya

Format sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR
22 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT PENETAPAN PENGHAPUSAN BERSYARAT

BUPATI BOALEMO

KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO

NOMOR.....

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG DAERAH
YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA
KEPADA PANITIA PIUTANG NEGARA
PADA.....(DINAS.....)[1]..... ATAS
NAMA.....(PENANGGUNG PIUTANG)[2].....

BUPATI BOALEMO

Menimbang : a.

b. Bahwa.....(Instansi yang mengusulkan penghapusan bersyarat).....[3] dalam surat nomor.....tanggal.....tahun telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah atas nama....(penanggung utang)..[2] dengan nilai Rp.....

c. Bahwa piutang daerah atas nama.....(penanggung utang)..... [4], telah diurus secara optimal oleh

KABAG HUKUM	DIMINTAKAN PARAF KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

pengelola keuangan daerah dan diterbitkan Pernyatan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

d. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam surat nomor .....Tanggal.....telah memberikan rekomendasi untuk penghapusan secara bersyarat piutang daerah tersebut pada huruf c...[6]

e. Bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah pada huruf b telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang tatacara penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas perturan pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang tatacara penghapusan piutang negara/daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor137/PMK.06/2022 tentang penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada panitia urusan piutang negara

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana *dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf* e perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penghapusan secara bersyarat piutang daerah pada (Dinas.....[7]atas nama.....(penanggung utang).....[5](.....penanggung utang.....)[8]

Mengingat : 1.

2 .

3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : *PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG* DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PANITIA PIUTANG

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

NEGARA PADA.....(DINAS.....)...
[9]ATAS

NAMA.....(PENANGGUNG PIUTANG)[10].....

KESATU : Menetapkan penghapusan secara bersyarat piutang daerah pada....(Dinas)[11]...atas nama....(penanggung utang....(...penanggung utang ...)[12] dengan nilai.....dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini

KEDUA : Penghapusan secara bersyarat piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih daerah terhadap piutang daerah atas nama penanggung utang sampai dengan ditetapkannya penghapusan secara mutlak piutang daerah

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di ..... pada tanggal.....

BUPATI BOALEMO,

.....

Keterangan :

a. Untuk nomor notasi 1). 7), 9) dan 11) agar dituliskan nama Dinas Pengelola Keuangan Daerah

b. Untuk nomor notasi 2), 4), 5), 8), 10) dan 12) agar dituliskan nama penanggung utang jika penanhhung utang lebih dari satu agar dituiskan satu nama penanggung utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk, terus dilengkapi jumlah total penanggung utang misal atas nama Mr X Dkk (213 debitur)

c. Untuk nomor notasi 3) agar dituliskan pejabat yang mengusulkan penghapusan

d. Untuk nomor notasi 6) agar dituliskan nomor dan tanggal surat dari BPK RI, khusus untuk piutang daerah TGR/TP. Selain TGR/TP tidak diperlukan

e. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsider

KABAG HUKUM	SEKRETARIS DAERAH	ASS	SEMUA	WABUP

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Alamat : Jln. Merdeka, Limbato - Tilamuta 96271
Website www.bkad.boalemokabgo.id Email bkad@boalemokabgo.id

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo
di
Tilamuta

NPWPD : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

A. DATA WAJIB PAJAK

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :

B. DATA OBJEK PAJAK

3. MASA PAJAK : ☐☐ / ☐☐☐☐
4. PAJAK TERUTANG :

No.	Jenis kendaraan	Jenis MBLB - NOPD	Jumlah tonase/kubikasi	NILAI JUAL	TARIF	PAJAK TERUTANG
TOTAL						

5. KREDIT PAJAK :
6. PAJAK KURANG BAYAR :
7. KETERANGAN :

Tilamuta, ...

KABAG HUKUM	UNIT/BAGIAN TERKAIT	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
[illegible]

No. SPTPD : _____
Masa Pajak : _____
Tahun Pajak : _____

SPTPD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK REKLAME

N.P.W.P.D

Kepada Yth.
_____
_____
di _____

PERHATIAN :
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada BPKAD ..... paling lambat pada tanggal ..... (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment).
4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data obyek pajak

No.	Jenis Reklame dan Judul (Lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu Pemasangan
1.	Jenis ☐ Judul : _____	_____	P ____ m L ____ m T ____ m	_____	_____ s/d _____
2.	Jenis ☐ Judul : _____	_____	P ____ m L ____ m T ____ m	_____	_____ s/d _____
3.	Jenis ☐ Judul : _____	_____	P ____ m L ____ m T ____ m	_____	_____ s/d _____
4.	Jenis ☐ Judul : _____	_____	P ____ m L ____ m T ____ m	_____	_____ s/d _____
5.	Jenis ☐ Judul : _____	_____	P ____ m L ____ m T ____ m	_____	_____ s/d _____

Keterangan :
Jenis Reklame
1. Reklame papan/billboard/megatron 6. Reklame udara

Ukuran :
P = Panjang
[illegible]

BAGIAN HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

BENTUK DAN ISI SPTPD PAJAK SARANG BURUNG WALET

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Merdeka Tilamuta Telp (0443) 211001

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)
PAJAK SARANG BURUNG WALET

No. Formulir ☐☐☐☐ No. Registrasi ☐☐☐☐ NPWPD ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Jenis Transaksi: ☐ Perekaman Data ☐ Perubahan Data ☐ Penghapusan Data

PERHATIAN

1. Harap di isi dengan Benar, Jelas dan Lengkap
2. Berilah tanda (" V ") atau (" X ") pada kotak pilihan
3. Setelah di isi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya harap dikembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan paling lambat 2 minggu setelah SPTPD ini diterima

DATA SUBYEK / WAJIB PAJAK

1. Nama WP ☐
2. Alamat Jalan ☐ Gang ☐ No ☐ Rt ☐ Rw ☐
3. Kelurahan ☐ 4. Kecamatan ☐

DATA OBYEK PAJAK

1. Lokasi tempat Sarang Burung Walet ☐ Goa alami ☐ Bangunan Buatan (rumahan)
2. Jenis Sarang Burung Walet ☐ Sarang Putih ☐ Sarang Hitam ☐ Rumahan Umum ☐ Mangkok ☐ Sudut ☐ Patahan ☐ Lainnya
3. Harga Pasaran Umum ☐ Rp 1.500.000 s/d Rp 2.000.000 ☐ Rp 2.000.000 s/d Rp 2.500.000 ☐ Rp 4.000.000 s/d Rp 5.000.000 ☐ Rp 6.000.000 s/d Rp 8.000.000
4. Harga Pasaran yang berlaku Rp ☐
5. Jumlah Volume Penjualan ☐ kg
5. Keterangan Lain Tentang Obyek Pajak ☐

PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBAT TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA ATAU YANG SAYA BERI KUASA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH KAMI BERITAHUKAN BESERTA LAMPIRAN LAMPIRANNYA ADALAH BENAR LENGKAP DAN JELAS
DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS

☐ ☐ ☐ ☐

Wajib Pajak / A.n. Wajib Pajak

☐

DI ISI OLEH PETUGAS

DITERIMA TANGGAL ☐ BULAN ☐ TAHUN ☐

NAMA ☐

NIP ☐

TANDA TANGAN

KABAG [illegible]	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Alamat : Jln. Merdeka, Limboto Telephone (0435)
Website www.bkad.boalemokab.go.id Email bkadgpboalemokab@gmail.com

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)
PBJT PEROKOTELAN

Masa Pajak :
Tahun Pajak :
Pembetulan ke [ ]

Kepada
Yth.
di
Tempat

Perhatian :
1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan diisi dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. *Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dimana Wajib Pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya*
4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

I. Identitas Wajib Pajak :

a. Nama Wajib Pajak
b. Alamat
RT RW Kode Pos
c. Nama Objek/Usaha
d. Alamat
e. NPWPD
f. NOPD

II. Diisi Oleh Pengusaha Hotel :

a. Klasifikasi Hotel [ ]
1. Bintang Lima Berbah
2. Bintang Lima
3. Bintang Empat
4. Bintang Tiga
5. Bintang Dua
6. Bintang Satu
7. Melati Tiga
8. Melati Dua
9. Melati Satu
10. Rumah Kos
11. Motel
12.

b. Data Pembayaran

1) Pembayaran Dari :	Dalam Rupiah
a) Persewaan Kamar	Rp
b) Penjualan Makanan dan Minuman	Rp
c) Fasilitas Hotel	Rp
Fitnes Center/Pusat Kebugaran	Rp
Health Center/Pusat Kesehatan	Rp
Kolam Renang	Rp
Lapangan Tenis	Rp
Klub Malam/Karaoke	Rp
Diskotik	Rp
Pub/Bar/Kafe	Rp
Spa	Rp
	Rp
d) Pelayanan Penunjang	Rp
Telepon	Rp
Faksimili	Rp
Telex	Rp
Internet	Rp
Photo Copy	Rp
Laundry/Binatu	Rp
Taxi	Rp
Service Charge	Rp

	Dalam Rupiah
2) **Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**	
Jumlah 1 (a + b + c + d)	Rp
3) Pajak Terutang (10% X DPP)	Rp
4) Pajak Yang Telah Dibayar	Rp
5) Pajak Kurang Atau Lebih Bayar (3) - (4)	Rp
6) *Pajak Hotel kurang dibayar dilunasi tanggal*	*(dd mm yy)*

III. Data Pendukung :

	Lampiran *)
a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak ada
b) Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/Tidak ada
c) Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill	Ada/Tidak ada
d)	Ada/Tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar benarnya dan apabila terdapat kebidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku

Diterima oleh Petugas
tanggal

WP/Penanggung Pajak/Kuasa

NIP

Nama jelas/Cap/Stempel

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :
lembar 1 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
2 Wajib Pajak

KABAG HUKUM	DINAS BADAN ASISTEN	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jln. Merdeka, Limboto - Tilamuta 96271

Website www.bkad.boalemokabgo.id Email bkad@boalemokabgo.id

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) **PBJT MAKANAN DAN MINUMAN** Masa Pajak Tahun Pajak Pembetulan ke	Kepada Yth di Tilamuta

Perhatian :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Unit Pajak dan Retribusi Daerah dimana Wajib Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

I. Identitas Wajib Pajak :

a Nama Wajib Pajak
b Alamat
RT RW Kode Pos
c NPWPD
d NOPD
e Nama Objek/Usaha
f Alamat

II. Diisi Oleh Pengusaha Restoran :

a Klasifikasi Usaha
1 Restoran
2 Kafe
3 Kantin/Kafetaria/Warung Makan
4 Cepat Saji/*Fast Food*
5 Jasa Boga/Katering
6

b	Pendapatan dari Makanan Dan Minuman	Rp
c	Pendapatan dari Service Charge	Rp
d	Pendapatan Lain-lain	Rp
e	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp
f	Pajak Terutang (10 % X DPP)	Rp
g	Pajak Yang Telah Dibayar	Rp
h	Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp
i	Pajak Restoran kurang dibayar dilunasi tanggal ----------	_____(dd-mm-yy)

III. Data Pendukung :	Lampiran *)
a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak ada
b) Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/Tidak ada
c) Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill	Ada/Tidak ada
d)	Ada/Tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku

Diterima oleh Petugas,
tanggal

WP/Penanggung Pajak/Kuasa,

NIP

Nama jelas/Cap/Stempel

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Alamat Jln. Merdeka, Limboto - Filomuto 96271
Website www.bkad.boalemokabgo.id Email bkad@boalemokabgo.id

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH(SPTPD) **PBJT KESENIAN DAN HIBURAN** Masa Pajak Tahun Pajak Pembetulan ke	Kepada Yth di Jakarta

Perhatian :

1 Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK
2 Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3 Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Unit Pajak dan RetribusiDaerah dimana Wajib Pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
4 Keterlambatan penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

I. Identitas Wajib Pajak :

a Nama Wajib Pajak
b Alamat RT RW Kode Pos
c NPWPD
d Nama Objek/Usaha
e Alamat
f NOPD

II. Diisi Oleh Pengusaha Hiburan :

a Klasifikasi Hiburan
1 Tontonan Film
2 Pagelaran Kesenian Musik, Tari dan/atau busana
3 Kontes Kecantikan
4 Pameran
5 Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya
6 Sirkus, Akrobat, dan Sulap
7 Permainan Bilyar dan Bowling
8 Pacuan Kuda dan Pacuan Kendaraan Bermotor
9 Permainan Ketangkasan
10 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan PusatKebugaran (*Fitness Center*)
11 Pertandingan Olah Raga

b Data Pembayaran

1). Pembayaran Dari :	**Dalam Rupiah**
a) Persewaan Ruangan/Kamar	Rp
b) Penjualan Makanan dan Minuman	Rp
c) Cover Charge/Minimum Charge	Rp
d) Penjualan Karcis	Rp
e) Penjualan Fasilitas Lainnya (dalam satu Bill/Bon)	Rp
f) Penjualan Score/Coin	Rp
g)	Rp
2). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (jumlah 1 a s.d 1 g)	Rp
a) Tarif Pajak %	Rp
b) Pajak Terutang (Tarif x DPP)	Rp
c) Pajak Yang Telah Dibayar	Rp
d) Pajak Yang Kurang atau Lebih Bayar (b) – (c)	Rp
e) Pajak Hiburan kurang dibayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yy)

III. Data Pendukung :	Lampiran *)
a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak ada
b) Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/Tidak ada
c) Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill	Ada/Tidak ada
d)	Ada/Tidak ada

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku

Diterima oleh Petugas
tanggal

WP/Penanggung Pajak/Kuasa

NIP

Nama jelas/Cap/Stempel

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan:
Lembar 1 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
2 Wajib Pajak

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN KEUANGAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. KENDAL

1. JENIS TRANSAKSI [ ] 1. Pendaftaran Data [ ] 2. Perubahan Data [ ] 3. Penghapusan Data

2. NOP [PROV] [KAB] [KEC] [KELURAHAN] [BLOK] [NO URUT] [KODE]

3. NOP BERSAMA [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

B. DATA SUBJEK PAJAK

5. STATUS [ ] 1. Pemilik [ ] 2. Penyewa [ ] 3. Pengelola [ ] 4. Pemakai [ ] 5. Sengketa

6. PEKERJAAN [ ] 1. PNS [ ] 2. ABRI [ ] 3. Pensiunan [ ] 4. Badan [ ] 5. Lainnya

7. NOMOR KTP

8. NAMA SUBJEK PAJAK

9. NPWP

10. NAMA JALAN

11. BLOK/KAV/NOMOR

12. KELURAHAN / DESA KECAMATAN

13. RW 14. RT

15. KABUPATEN / KOTA

16. KODE POS

C. DATA OBJEK PAJAK

17. NO. PERSIL

18. NAMA JALAN

19. BLOK/KAV/NOMOR

20. KELURAHAN / DESA

21. RW 22. RT

D. DATA TANAH / BUMI

23. LUAS TANAH (M2)

24. ZONA NILAI TANAH

25. JENIS TANAH [ ] 1. Tanah & Bangunan [ ] 2. Kavling Siap Bangun [ ] 3. Tanah Kosong [ ] 4. Fasilitas Umum

Lampiran : ... yang menyertakannya semua nomor tersebut dan gambar objek yang bersangkutan

E. DATA BANGUNAN

26. JUMLAH BANGUNAN [ ] [ ] [ ]

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini beserta lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap, termasuk kesadaran yang sebenarnya sesuai dengan pasal 51 ayat (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN

Dalam hal bertindak sebagai kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan

Dalam hal Subjek Pajak membutuhkan lampiran Objek Pajak, supaya menggunakan/lampirkan Sket/Denah Lokasi Objek pajak

Batas Waktu pengembalian SPOP (Diisi oleh Petugas) harus sesuai dengan Surat Subjek Pajak sesuai Perbup Bupati No. 13 Tahun 2013 Tanggal 2 Mei 2013

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
29. TANGGAL(TGL/BLN/THN)	33. TANGGAL(TGL/BLN/THN)
30. TANDA TANGAN	34. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS	35. NAMA JELAS
32. NIP	36. NIP

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

NOMOR PENGHALUS : 2 0 2 [ ][ ][ ][ ] [ ][ ][ ]

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data ☐ 4. Penilaian Individual

2. NOP PROV 3 3 | KAB 2 4 | KEC [ ][ ][ ] | KEL/DESA [ ][ ][ ] | BLOK [ ][ ][ ] | NO.URUT [ ][ ][ ][ ] | KODE [ ]

3. JUMLAH BNG [ ][ ]
4. BANGUNAN KE [ ][ ]

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5 JNS PENGGUNAAN BANGUNAN
☐ 1 Perumahan ☐ 2 Perkantoran Swasta ☐ 3 Pabrik
☐ 4 Toko/Apotik/Pasar/Ruko ☐ 5 Rumah Sakit/Klinik ☐ 6 Olah/Raga/Rekreasi
☐ 7 Hotel / Wisma ☐ 8 Bengkel/Gudang/Pertanian ☐ 9 Gedung Pemerintah
☐ 10 Lain-lain ☐ 11 Bng Tidak Kena Pajak ☐ 12 Bangunan Parkir
☐ 13 Apartemen ☐ 14 Pompa Bensin ☐ 15 Tangki Minyak
☐ 16 Gedung Sekolah

6 LUAS BANGUNAN (M2) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
7 JUMLAH LANTAI [ ][ ]
8 THN DIBANGUN [ ][ ][ ][ ]
9 THN DIRENOVASI [ ][ ][ ][ ]
10 DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

11 KONDISI PADA UMUMNYA ☐ 1 Sangat Baik ☐ 2 Baik ☐ 3 Sedang ☐ 4 Jelek
12 KONSTRUKSI ☐ 1 Baja ☐ 2 Beton ☐ 3 Batu Bata ☐ 4 Kayu
13 ATAP ☐ 1 Decrabon/ Beton/ Gtg Glazur ☐ 2 Gtg Beton/ Aluminium ☐ 3 Gtg Biasa/ Sirap ☐ 4 Asbes ☐ 5 Seng
14 DINDING ☐ 1 Kaca/ Aluminium ☐ 2 Beton ☐ 3 Batu Bata/ Conblok ☐ 4 Kayu ☐ 5 Seng ☐ 6 Tidak Ada
15 LANTAI ☐ 1 Marmer ☐ 2 Keramik ☐ 3 Tegso ☐ 4 Ubin PC/ Papan ☐ 5 Semen
16 LANGIT-LANGIT ☐ 1 Akustik/ Jati ☐ 2 Triplek/Asbes Bambu ☐ 3 Tidak Ada

B. FASILITAS

17 JUMLAH AC ☐☐ Split ☐☐ Window
18 AC Sentral ☐ 1 Ada ☐ 1 Tidak Ada

19 LUAS KOLAM RENANG (M2) [ ][ ][ ][ ]
☐ 1 Diplester ☐ 2 Dengan Pelapis

20 LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
[ ][ ][ ][ ][ ] Ringan [ ][ ][ ][ ][ ] Berat
[ ][ ][ ][ ][ ] Sedang [ ][ ][ ][ ][ ] Dengan Penutup Lantai

21 JUMLAH LAPANGAN TENIS

	DGN LAMPU	TNP LAMPU
Beton	☐☐	☐☐
Aspal	☐☐	☐☐
Tanah Liat/ Rumput	☐☐	☐☐

22 JUMLAH LIFT
☐☐ Penumpang
☐☐ Kapsul
☐☐ Barang

23 JUMLAH TANGGA BERJALAN
Lbr ≤ 0.80 M ☐☐
Lbr > 0.80 M ☐☐

24 PANJANG PAGAR (M) [ ][ ][ ][ ]
BAHAN PAGAR ☐ 1 Baja/Besi ☐ 2 Baja/ Batako

25 PEMADAM KEBAKARAN
☐ 1 Hydrant ☐ 1 Ada ☐ 2 Tidak Ada
☐ 2 Sprinkler ☐ 1 Ada ☐ 2 Tidak Ada
☐ 3 Fire Al ☐ 1 Ada ☐ 2 Tidak Ada

26 JML SALURAN PES PABX [ ][ ][ ][ ]
27 KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M) [ ][ ][ ][ ]

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKPD)

Jl. Merdeka Tilamuta Desa Limbato Kec. Tilamuta

SSPD

(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)

Tahun .....

Nomor : .....

Tanggal : .....

Nama : .....

Alamat : .....

.....

Nama Usaha : .....

Alamat Usaha : .....

NPWPD : .....

Menyetor berdasarkan : SKPD STPD SKPDKBT

SKPDT SPTPD SK Keberatan

SKPDKB SK Pembetulan Lain - lain

Dokumen Penetapan : .....

Masa Pajak : .....

Tahun : .....

Cara Pembayaran : Tunai

Bank

Bank Penerima Setoran : BANK SULUTGO RKUD KABUPATEN BOALEMO , No.

Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh :	Tilamuta, Penyetor
.....	.....	.....

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Jln. Merdeka -Limbato - Tilamuta 96271

(SKPD)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Nomor : .....
Masa Pajak : .....

Nama : .....
Alamat : .....
Nama Usaha : .....
Alamat Usaha : .....
NPWRD : .....
Tgl Jatuh Tempo : .....
Keterangan .....

NO.	KODE REKENING	URAIAN PAJAK	JUMLAH (Rp.)
1			
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a Bunga	
		b Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan Huruf (.....)

PERHATIAN

1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Sendanara Penerimaan atau (BANK SULUTGO_RKUD KABUPATEN BOALEMO No Rekening 0150112000000001) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daera (SSPD)

2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (.....) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % perbulan

Tilamuta 20

An. KEPALA BPKPD
KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH

.....
Nip

KA BAG HUKUM	KA BID/KA SUBBAG/KA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

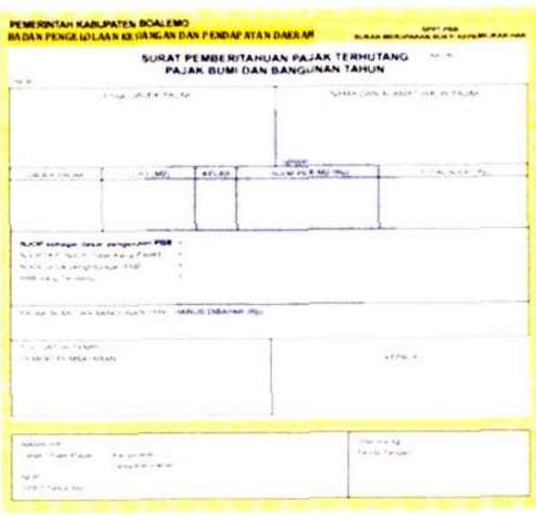

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

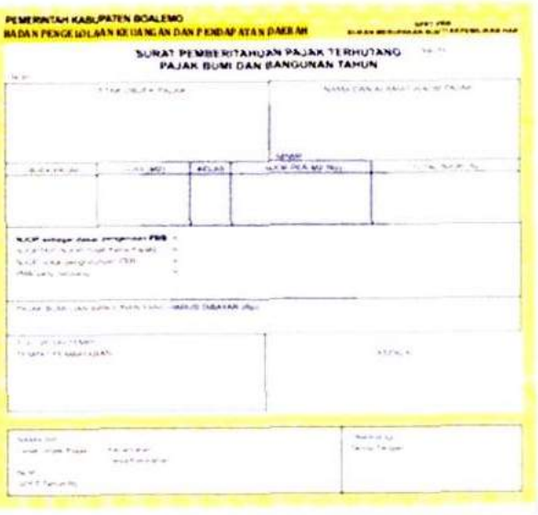

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

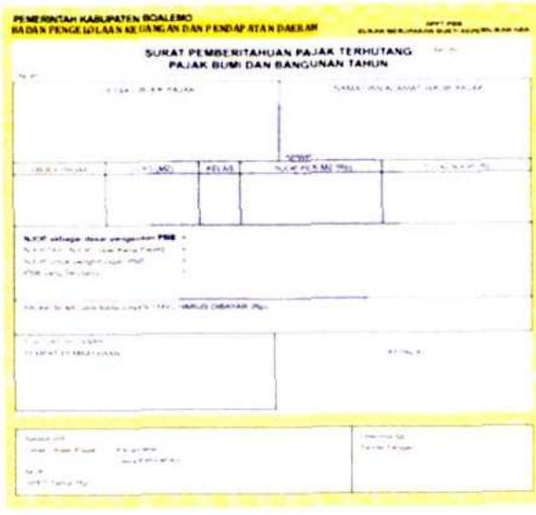

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

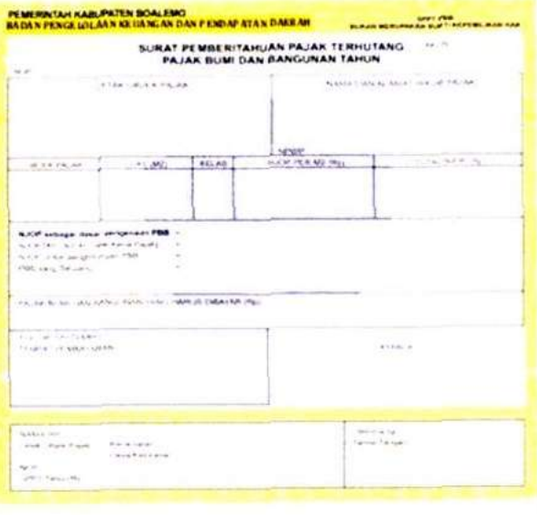

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

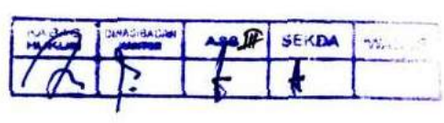

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Jln. Merdeka -Limbato - Tilamuta 96271

SKPDKB

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Masa Pajak : .....
Tahun : .....

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐
Tgl. Jatuh Tempo : .....

I. Berdasarkan pasal 9 Undang Undang No.18 Tahun 1997 telah dilakukna pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Ayat : ☐☐☐☐☐
Nama Pajak : .....

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain diatas, penghitungan jumlah yang masih dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan			Rp
2.	Pajak yang terhutang			Rp
3.	Kredit pajak			
	a.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	
	b.	Setoran yang dilakukan	Rp	
	c.	Lain - lain	Rp	
	d.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkann (a+b+c)	Rp	
4.	Jumlah keuangan pembayaran pokok pajak (2-3d)			Rp
5.	Sanksi administrasi			
	a.	Bunga)(9 (1))	Rp	
	b.	Kenaikan (ps! 9 (5))	Rp	
	c.	Jumlah sanksi Administrasi (a+b)		Rp
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)			Rp

Dengan Huruf (.....)

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan atau (BANK SULUTGO_RKUD KABUPATEN BOALEMO No Rekening 0150112000000 1) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daera (SSPD)
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % perbulan

Tahun
An. KEPALA BPKPD
KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH

.....
Nip

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ALAMAT Jln. Merdeka -Limbato - Tilamuta 96271

SKPDKBT

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Masa Pajak :.....

Tahun :.....

Nama .....

Alamat .....

NPWPD ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐

Tgl. Jatuh Tempo .....

I Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No 18 Tahun 1997 telah dilakukna pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban

Ayat ☐☐☐☐☐

Nama Pajak .....

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain diatas, penghitungan jumlah yang masih dibayar adalah sebagai berikut

1.	Dasar Pengenaan			Rp
2.	Pajak yang terhutang			Rp
3.	Kredit pajak			
	a.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	
	b.	Setoran yang dilakukan	Rp	
	c.	Lain - lain	Rp	
	d.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkann (a+b+c)	Rp	
4	Jumlah keuangan pembayaran pokok pajak (2-3d)			Rp
5.	Sanksi administrasi			
	a.	Bunga pl 9 (1))	Rp	
	b.	Kenaikan (psl 9 (5))	Rp	
	c.	Jumlah sanksi Administrasi (a+b)		Rp
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)			Rp

Dengan Huruf (.....)

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan atau (BANK SULUTGO_RKUD KABUPATEN BOALEMO No Rekening 0150112000001) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daera (SSPD)
2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % perbulan

..... Tahun .....

An. KEPALA BPKPD

KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH

Nip

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SKPDN

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

Masa Pajak : .....

Tahun : .....

Nama : .....

Alamat : .....

NPWPD : ☐ ☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ | |

Tgl. Jatuh Tempo : .....

I Berdasarkan pagal 9 Undang-Undang No 18 Tahun 1997 telah dilakukna pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban

Ayat : ☐☐☐☐☐

Nama Pajak : .....

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain diatas, penghitungan jumlah yang masih dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan			Rp
2	Pajak yang terhutang			Rp
3.	Kredit pajak			
	a.	Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	
	b.	Setoran yang dilakukan	Rp	
	c.	Lain - lain	Rp	
	d.	STP Pokok	Rp	
	e.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkann (a+b+c+d)		Rp
4	Jumlah keuangan pembayaran pokok pajak (2-3e)			Rp NIHIL
5	Sanksi administrasi			
	a.	Bunga)(9 (1))	Rp	
	b.	Kenaikan (psl 9 (5))	Rp	
	c.	Jumlah sanksi Administrasi (a+b)		Rp
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)			Rp

Tahun .....

An. KEPALA BPKPD
KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH

Nip

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DINAS .....

(SKRDLB)

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar

Masa Pajak : .....

Tahun : .....

Nama : .....

Alamat : .....

NPWRD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐

Tgl. Jatuh Tempo : .....

I. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukna pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban

Ayat : ☐☐☐☐☐

Nama Pajak : .....

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain diatas, penghitungan jumlah yang masih dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Dasar Pengenaan			Rp.
2.	Pajak yang terhutang			Rp.
3.	Kredit Retribusi			
	a.	Setoran yang dilakukan	Rp.	
	b.	Lain - lain	Rp.	
	c.	Dikurangi Kompensasi ke Tahun yang akan datang/hutang Retribusi	Rp.	
	d.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkann (a+b-c)	Rp.	
4.	Jumlah kelebinan pembayaran pokok Retribusi (3d-2)			Rp.
5.	Jumlah keuangan pembayaran pokok Retribusi (2-3d)			
	Jum Bunga ll 9 (1))		Rp.	
	Jum Kenaikan (psl 9 (5))		Rp.	
	Jum Jumlah sanksi Administrasi (a+b)		Rp.	
6.	Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang (4+5c)			Rp.

Dengan Huruf (.....)

PERHATIAN

Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Derah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)

Tahun

An. KEPALA .....

Nip .....

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Jln. Merdeka -Limbato - Tilamuta 96271

(STPD)

Surat Tagihan Pajak Daerah

Masa Pajak :.....
Tahun :.....

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ | |
Tgl. Jatuh Tempo : .....

I. Berdasarkan pagal 7 Undang-Undang No 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban
Ayat : ☐☐☐☐☐
Nama Pajak : .....

II. Dari penelitian dan . Atau pemeriksaan atau keterangan lain diatas, penghitungan jumlah yang masih dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang harus dibayar Rp.
2. Sanksi adminsitrasi
   a. Bunga Rp. _____
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp.

Dengan Huruf . (.....)

PERHATIAN

1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan atau (BANK SULUTGO_RKUD KABUPATEN BOALEMO No Rekening 01501120000001) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daera (SSPD)

2 Apabila STPD ini tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % perbulan

..... Tahun .....
An. KEPALA BPKPD
KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH

_____
Nip

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

NO SERI

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

KARCIS

BANANA BOAT

TARIF : Rp 30.000,- /Orang/2 Lintasan

(Tiga puluh ribu Rupiah perorang perdua lintasan)

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

NO SERI

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,PARIWISATA
DAN OLAH RAGA
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

KARCIS

JETSKY

Tarif : Rp 600,000,- /Unit/Jam

(Enam ratus ribu Rupiah, per Unit per jam)

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

NO SERI

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,PARIWISATA
DAN OLAH RAGA
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

KARCIS TANDA MASUK
PANTAI WISATA BOLIHUTUO

Dewasa

TARIF : Rp 10.000,- /Orang

(Sepuluh ribu Rupiah perorang)

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

NO SERI

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAH RAGA
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

KARCIS

WATER PARK

TARIF : Rp 30.000,- /Orang

(Tiga puluh ribu Rupiah)

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

NO SERI

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DASAR PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

KARCIS TANDA MASUK
PANTAI WISATA BOLIHUTUO

Anak-Anak

TARIF : Rp 5.000,- /Orang
(Lima ribu Rupiah)

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
Jl. Merdeka Desa Lumbato Kec. Tilamuta

NO SERI

RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI
PARIWISATA DAN OLAH RAGA
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

SEWA

ALAT SELAM

Tarif : Rp 250.000,- /set
(Dua Ratus Lima Puluh ribu Rupiah perset)

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
Jl. Merdeka Desa Lumbato Kec. Tilamuta

NO SERI

RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI
PARIWISATA DAN OLAH RAGA
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

SEWA

TAMBAHAN TABUNG OKSIGEN

Tarif : Rp 75.000,- /tabung
(Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah pertabung)

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
Jl. Merdeka Desa Lumbato Kec. Tilamuta

NO SERI

RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI
PARIWISATA DAN OLAH RAGA
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

SEWA

GAZEBO

Tarif : Rp 50.000,- Unit/Hari
(Lima Puluh Ribu Rupiah perunit perhari)

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
Jl. Merdeka Desa Limbato Kec. Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERMASUK FASILITAS LAINYA DALAM LINGKUNGAN PELELANGAN
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO NOMOR 6 TAHUN 2022

TPI

Tarif : Rp 2.500,- /Orang/kali
(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah perorang perkali)

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
Jl. Merdeka Desa Limbato Kec. Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN TERNAK, TERMASUK FASILITAS LAINYA DALAM LINGKUNGAN PELELANGAN
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO NOMOR 6 TAHUN 2022

RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN TERNAK

Tarif : Rp 5.000,- /Orang/kali
(Lima Ribu Rupiah perorang perkali)

BAG. HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
jl. Merdeka Desa Limbato Kec. Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

PASAR KELAS 1

TARIF : Rp.5.000,- /Orang/Hari
(Lima Ribu Rupiah perorang perhari)

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
jl. Merdeka Desa Limbato Kec. Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

PASAR KELAS 1

TARIF : Rp.5.000,- /Orang/Hari
(Lima Ribu Rupiah perorang perhari)

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
jl. Merdeka Desa Limbato Kec. Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

PASAR KELAS 2

TARIF : Rp.4.000,- /Orang/Hari
(Empat Ribu Rupiah perorang perhari)

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
jl. Merdeka Desa Limbato Kec. Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

PASAR KELAS 2

TARIF : Rp.4.000,- /Orang/Hari
(Empat Ribu Rupiah perorang perhari)

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
jl. Merdeka Desa Limbato Kec. Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

PASAR KELAS 3

TARIF : Rp.3.000,- /Orang/Hari
(Tiga Ribu Rupiah perorang perhari)

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
jl. Merdeka Desa Limbato Kec. Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

PASAR KELAS 3

TARIF : Rp.3.000,- /Orang/Hari
(Tiga Ribu Rupiah perorang perhari)

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
Jl. Mereka Desa Limbato Kecamatan Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DITEPI JALAN UMUM
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022
KENDARAAN TRONTON,
ALAT BERAT DAN SEJENISNYA

TARIF : Rp. 10.000,- /HARI
(Sepuluh Ribu Rupiah perhari)

Petugas tidak bertanggungjawab
atas hilangnya kendaraan maupun alat alat kendaraan

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
Jl. Mereka Desa Limbato Kecamatan Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DITEPI JALAN UMUM
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

KENDARAAN TRONTON ALAT BERAT DAN SEJENISNYA

TARIF : Rp. 10.000,- /HARI
(Sepuluh Ribu Rupiah perhari)

Petugas tidak bertanggungjawab
atas hilangnya kendaraan maupun alat alat kendaraan

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
Jl.Mereka Desa Limbato Kecamatan Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DITEPI JALAN UMUM
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) / RODA 6 (ENAM)

TARIF : Rp. 5.000,- /HARI
(Lima Ribu Rupiah perhari)

Petugas tidak bertanggungjawab
atas hilangnya kendaraan maupun alat alat kendaraan

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
Jl. Mereka Desa Limbato Kecamatan Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DITEPI JALAN UMUM
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

KENDARAAN RODA 4 (empat)/RODA 6 (Enam)

TARIF : Rp. 5.000,- /HARI
(Lima Ribu Rupiah perhari)

Petugas tidak bertanggungjawab
atas hilangnya kendaraan maupun alat alat kendaraan

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
Jl Mereka Desa Limbato Kecamatan Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DITEPI JALAN UMUM
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

KENDARAAN RODA 2 (DUA) / RODA 3 (TIGA)

TARIF : Rp. 2.000,- /HARI
(Dua Ribu Rupiah perhari)

Petugas tidak bertanggungjawab
atas hilangnya kendaraan maupun alat alat kendaraan

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
Jl. Mereka Desa Limbato Kecamatan Tilamuta

NO. SERI

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DITEPI JALAN UMUM
DASAR : PERDA KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 6 TAHUN 2022

KENDARAAN RODA 2 (DUA)/RODA 3 (TIGA)

TARIF : Rp. 2.000,- /HARI
(Dua Ribu Rupiah perhari)

Petugas tidak bertanggungjawab
atas hilangnya kendaraan maupun alat alat kendaraan

PENDAG PENGDAM	DANSATPOMDAM KENTOR	ASS	SEKDA	WABUP

NAMA HOTEL

Jln. .....
No. Telpon Hp. .....
Kabupaten Boalemo

No. Seri :

Nama / Name : ..... Alamat / Adress : .....

Kamar / Room No : _____ Tgl Datang / Arrival date : _____ Tgl.Keluar / Departure date : _____

Sewa Kamar / Room Change : _____ Rp

Makan tanpa makan / Meals Win out meals : _____ Rp

Banyaknya Tamu / Total Guest : _____ Rp

Makanan Extra / Extra Meals : _____ Rp

Minuman / Drink : _____ Rp

Interlocal / Long distance telephone cals : _____ Rp

Cuctan / Loundry : _____ Rp

Total Rp

Pajak Hotel (Tax) 10% Rp

Total pembayaran

Ket :

Rangkap 1 : ***Untuk wajib Pajak***
Rangkap 2 : ***Untuk Wapu***
Rangkap 3 : ***Untuk BKAD***

Boalemo, ...
KASIR

_____

				WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Merdeka No ..... Telp. .....

PENGINAPAN

NPWPD :

No. Seri :

Nama / Name : ..... Alamat / Adress : .....

Kamar / Room No : _____ Tgl Datang / Arrival date : _____ Tgl.Keluar / Departure date : _____

Sewa Kamar / Room Change : _____ Rp

Makan tanpa makan / Meals Win out meals : _____ Rp

Banyaknya Tamu / Total Guest : _____ Rp

Makanan Extra / Extra Meals : _____ Rp

Minuman / Drink : _____ Rp

Interlocal / Long distance telephone cals : _____ Rp

Cucian / Loundry : _____ Rp

Total Rp

Pajak Hotel (Tax) 10% Rp

Total pembayaran

ket

Rangkap 1 : Untuk wajib Pajak

Rangkap 2 : Untuk Wapu

Rangkap 3 : Untuk BKAD

Boalemo, ...

KASIR

_____

		ASS	SEKDA	WABUP
2	1	6	X	

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Merdeka Telp. (0443) 211001 Fax. (0443) 211000

Nama R.M / Cafe :

No. seri :

A l a m a t :

Banyaknya	M e n u	Harga	Jumlah

Jumlah Rp.
Pajak Restaurant 10 % Rp. Rp.
Total Rp. Rp.

Kasir

Jumlah pembayaran sudah termasuk Pajak Restaurant 10% (Perda No. 6 Thn. 2022)

		Asst	SEKDA	WABUP

K O P

KEPALA DAERAH

SURAT KEPUTUSAN

.....KEPALA DAERAH

NOMOR .....

Tentang

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Membaca : Surat Permohonan Nomor.....Tanggal.....
Atas nama : .....
Alamat : .....
NPWPD/NPWPRD : .....

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima Surat Permohonan nomor.....Tanggal
Atas nama : .....
Alamat : .....
NPWPD/NPWPRD : .....
Berhubung.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuia dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan *sebagaimana terlampir.*

KETIGA : Apabila dikemudian hari kekeliruan dalam Surat Ketetapan ini akan diadakan pembetulan aeperlunya.

Ditepakan di : .....
Pada Tanggal : .....

KEPALA DAERAH

.....

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

KOP

KEPALA DAERAH

SURAT KEPUTUSAN

.....KEPALA DAERAH

NOMOR .....

Tentang

KEBERATAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Membaca : Surat Permohonan Nomor ..... Tanggal .....
Atas nama : .....
Alamat : .....
NPWPD/NPWPRD : .....

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Surat Ketetapan .....
Nomor urut : .....
Tahun / Bulan : .....
Nama / Merek Usaha : .....
Alamat : .....
NPWPD/NPWPRD : .....
Nama Pemilik/Pengelola : .....

Semula ditetapkan : Rp .....
Dikurangi (ditambah) dengan jumlah : Rp .....
Besarnya ketetapan Menjadi : Rp .....
Dengan Huruf (.....)

KEDUA : Apabila dikemudian hari kekeliruan dalam Surat Ketetapan ini akan diadakan *pembetulan sepertinya*.

Ditetapkan di : .....
Pada Tanggal : .....

KEPALA DAERAH

.....

BAGIAN HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

(Bagian Depan)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KATU NPWPD

NO. Reg :.....

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : .....

....., ...

KEPALA BPKPD KABUPATEN BOALEMO

.....

(Bagian Belakang)

PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan baik – baik dan bila hilang segera melaporkannya ke BPKPD
2. Kartu ini henfaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transasksi *perpajakan daerah*
3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, hendaknya melapoekan di ke BPKPF

KABAG HUKUM	KEPALA BADAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO Jln. Merdeka - Tilamuta Telpon (0443)211001	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI **(S K R)**	NO URUT

NO MASA
TAHUN

Nama .....
Alamat .....
NPWRD .....
Tgl Jatuh Tempo .....

NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sank a Bunga	
		b Kenakan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan Huruf (.....)

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan
2. Apabila SKR ini tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan

Tilamuta ..... 20 .....
KEPALA .....

Nip .....

TANDA TERIMA No Urut
NAMA .....
ALAMAT ..... Tahun 20
NPWPD ..... Yang menerima

(.....)

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl..... .....Telp.....	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) Tahun.....

No.

Nama : .....

Alamat : .....

NPWRD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Menyetor berdasarkan *)

☐ SKRD ☐ STRD

☐ SKRDT ☐ SK Pembetulan

☐ SK Keberatan ☐ Lain - lain

:

Masa Retribusi : ..... Tahun .. .. No. Urut :.....

No	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rp.
		Jumlah setoran Retribusi	

Dengan Huruf ☐

Ruang untuk Teraan Kas register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan :	Nama Terang : .....,Tahun..... Penyetor (.....)

*) beri tanda V pada kotak ☐ sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

MODEL : DPD-13

Lembar I : Untuk subyek Pajak/Penyetor

Lembar II : Untuk Bukti Kas BKAD

Lembar III : Untuk seksi Tagihan

BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKDA	ASS	DINAS/BADAN/KANTOR	BUPATI

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Jln. Merdeka -Limbato - Titamuta 96271

SKPDLB

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

Masa Pajak : .....
Tahun : .....

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐
Tgl. Jatuh Tempo : .....

I. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang No 18 Tahun 1997 telah dilakukna pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban
Ayat : ☐☐☐☐☐
Nama Pajak : .....

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain diatas, penghitungan jumlah yang masih dibayar adalah sebagai berikut

1	Dasar Pengenaan			Rp.
2	Pajak yang terhutang			Rp.
3	Kredit pajak			
	a. Setoran yang dilakukan		Rp.	
	b. Lain - lain		Rp.	
	c. Dikurangi Kompensasi ke Tahun yang akan datang/hutang pajak		Rp.	
	d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkann (a+b-c)		Rp.	
4	Jumlah kelebihan pembayaran pokok pajak (3d-2)			Rp.
5	Jumlah keuangan pembayaran pokok pajak (2-3d)			
	Jum Bunga)(9 (1))		Rp.	
	Jum Kenaikan (psl 9 (5))		Rp.	
	Jum Jumlah sanksi Administrasi (a+b)		Rp.	
6	Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang (4+5c)			Rp.

Dengan Huruf : (.....)

PERHATIAN :
Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Derah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)

Tahun

An. KEPALA BPKPD
KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH

Nip

KATAO	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DINAS.....

STRD

Surat Tagihan Retribusi Daerah

Masa Retribusi : .....

Tahun : .....

Nama : .....

Alamat : .....

NPWRD : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ | |

Tgl. Jatuh Tempo : .....

I Berdasarkan pagal 27 Undang-Undang No 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban

Ayat Retribusi : ☐☐☐☐☐

Nama Retribusi : .....

II Dari penelitian dan . Atau pemeriksaan atau keterangan lain diatas, penghitungan jumlah yang masih dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retribusi yang harus dibayar Rp
2. Sanksi adminsitrasi
   a. Bunga Rp _____
3. *Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)* *Rp*

Dengan Huruf (.....)

PERHATIAN

1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan atau (BANK SULUTGO_RKUD KABUPATEN BOALEMO No Rekening 01501120000001) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

2 Apabila STRD ini tidak atau kurang di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % perbulan

.....Tahun.....

An. KEPALA BPKPD

KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH

_____

Nip

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Alamat : Jln. Merdeka, Limbato - Tilamuta 96271
Website www.bkad.boalemokabgo.id Email bkad@boalemokabgo.id

NPWPD / NPWRD .....

Kepada Yth :

.....

Di-

.....

SURAT TEGURAN

Nomor : .....

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak/retribusi sebagai berikut

Jenis Pajak/ Retribusi	Tahun	Nomor/Tanggal SKPD,SKPDT,SKPDKB,SKPDKBT,STPD, SKRD, SKRDT,STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan	Tanggal jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp
JUMLAH				

Dengan Huruf (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Sauadara agar melunasi jumlah Tungakan dalam waktu 7 (tujuh) setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi penagihan)

PERHATAIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGUARAN INI, SESUDAH BATAS ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAAN SURAT PAKSA.
(KEP. MENDAGRI NO. 170 TAHUN 1997)

..... Tahun .....
Kepala BPKPD

Tingkat .....

(.....)

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP